

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 17 No 3 September 2018
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

1. Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo 207 - 216
Portrait of Community Empowerment-Based on Local Assets in Koi Fish Farming Group in Banyuglugur Village Banyuglugur District of Situbondo Regency
Nuril Endi Rahman
2. Faktor yang Mempengaruhi Upaya Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 217 - 226
Factors Affecting the Housewife Efforts in Improving Social Welfare
Marietta Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni
3. Pantang Mengemis Demi Sejahterakan Keluarga 227 - 238
Implementasi Program Desaku Menanti di Pasuruan
Abstinence Begging for The Sake of Family Prosperity
The Implementation of Program Desaku Menanti
Tyas Eko Raharjo F.
4. Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengurangi Konsumsi Rokok di Indonesia 239 - 256
The Effort of Poverty Alleviation by Reducing Cigarettes Consumption in Indonesia
Memi Almizi dan Istiana Hermawati
5. Resiliensi Kepala Keluarga Perempuan (KEPPA) dalam Memenuhi Fungsi Keluarga pada Anggota PJJl Armalah Yogyakarta 257 - 266
Resilience of Women Family Head (KEPPA) in Meeting Family Functions in Members PJJl Armalah Yogyakarta
Rr. Christiana Mayang Anggraeni Stj. dan Kokom Komariah
6. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017 267 - 286
Evaluation on Regional Government Policy in Solving the Problem of Indonesian Migrant Workers in East Lombok District in Year 2015-2017
Siti Hidayatul Jumaah, dan Rahmawati Husein

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) volume 17 Nomor 3 ini di buka dengan tulisan Nuril Endi Rahman yang berjudul Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo *Portrait of Community Empowerment-Based on Local Assets in Koi Fish Farming Group in Banyuglugur Village Banyuglugur District of Situbondo Regency*. Diikuti oleh tulisan Maretta Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Upaya Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosil *Factors Affecting the Houswife Efforts in Improving Social Welfare*. Pada tulisan ketiga Tyas Eko Raharjo menulis tentang Pantang Mengemis Demi Sejahterakan Keluarga: Implementasi Program Desaku Menanti di Pasuruan *Abstinence Begging for The Sake of Family Prosperity The Implementation of Program Desaku Menanti*. Artikel keempat Memi Almizi dan Istiana Hermawati mengulas tentang Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengurangi Konsumsi Rokok di Indonesia *The Effort of Poverty Alleviation by Reducing Cigarettes Consumption in Indonesia*. Selanjutnya Rr. Cristina Mayang Anggraeni Stj dan Kokom Komariah mengulas tentang Resiliensi Kepala Keluarga Perempuan (Keppa) dalam Memenuhi Fungsi Keluarga pada Anggota PJJl Armalah Yogyakarta *Resilience of Women Family Head (Keppa) in Meeting Family Functions in Member PJJl Armalah Yogyakarta*. Artikel terakhir Siti Hidayatul Jumaah mengulas tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok Timur

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 17 No 3 September 2018

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Nuril Endi Rahman (Fisipol UGM Yogyakarta)

Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo

Portrait of Community Empowerment-Based on Local Assets in Koi Fish Farming Group in Banyuglugur Village Banyuglugur District of Situbondo Regency

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 3 September 2018, hal 207 - 216

Empowerment has recently become a keyword in any poverty alleviation programs, which is either conducted by the government or by any companies through CSR programs. Empowerment is closely related to potential, participation, and capacity enhancement, therefore it cannot be separated from the role of local institutions or local actors that exist in the society, because of their function as the 'driver' in the empowerment. This study is aimed to comprehend the success of the empowerment program by the approach of the Koi fish farming groups' asset growth in the village of Banyuglugur, especially during the empowerment process. The research used qualitative descriptive method and both the location and the informants were decided purposively to gain the samples. The data was collected by conducting observation, interviews, and documents study. The result showed that the success of the empowerment was achieved by the appliance of local asset-based approach, by local actors' roles in encouraging the awareness of youth participation and in identifying the village potential collaboratively, and also by the proper cooperative factors between the Community Development Officer as the representative of PT PJB Paiton and the head of Karang Taruna Youth Local Organization.

Keyword: CSR and empowerment; local actor; local asset; social dynamics

Kata pemberdayaan belakangan ini telah menjadi kata kunci dalam setiap program pengentasan kemiskinan, baik itu program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau program yang dilakukan oleh perusahaan melalui CSR. Pemberdayaan erat kaitannya dengan partisipasi, potensi, dan peningkatan kapasitas, oleh karena itu pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari peran institusi lokal atau aktor lokal yang ada dalam masyarakat karena elemen-elemen sosial tersebut berfungsi sebagai penggerak dalam pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan melihat keberhasilan program pemberdayaan dengan pendekatan aset pada kelompok budidaya ikan koi di Desa Banyuglugur dalam proses pemberdayaan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dengan penentuan lokasi dan informan penelitian menggunakan *purposive sampling*, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan, keberhasilan kelompok budidaya ikan koi di Desa Banyuglugur dalam program pemberdayaan, merupakan keberhasilan dari penerapan pendekatan yang berbasis aset lokal, adanya peran aktor lokal dalam membangun kesadaran partisipasi pemuda dan mengidentifikasi potensi desa secara kolaboratif, merupakan element penting dalam keberhasilan program, serta adanya faktor kerjasama yang baik antara CDO sebagai wakil dari PT PJB Paiton dengan ketua Karang Taruna.

**Kata-kata kunci: CSR dan pemberdayaan;
aktor local; aset local; dinamika sosial**

Marietta Marlina Telaumbanua¹ dan Mutiara Nugraheni² (¹Program Pascasarjana Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta dan ²Jurusan Pendidikan Tata Boga dan Busana, Universitas Negeri Yogyakarta)

Faktor yang Mempengaruhi Upaya Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Factors Affecting the Housewife Efforts in Improving Social Welfare

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 3 September 2018, hal 217 - 226

Every family is responsible for maintaining, growing, and developing family members on various types of life needs. Housewives can help their husbands in earning for a living, besides of their own duty as a housewife. In some families living in Cokrodiningratan sub-district of Jetis – Yogyakarta, it was found out that many obstacles occurred in fulfilling their daily needs and it had not been known precisely the factors that influenced many housewives worked in Watsawi Industry yet. This study aims to determine the internal factors that affect housewives to work and and that of the efforts required to improve the family welfare. The data was collected by conducting direct observations, interviews, documentation, and by distributing questionnaire to 44 housewives working in this industry. The data was analyzed by using the test of variable validity and the test of reliability by using Alpha Cronbach, then data was processed by doing editing, coddling, tabulation, and graphs. The results showed that most working housewives had a strong character in the religious aspect, more tolerance, discipline, self-reliance, honesty, and being hard workers. Low family welfare and income level (60% of underprivileged families) had become the triggers for housewives to work. It was proven by result analysis that the factor of physiology needs became the main factor causing housewives worked in this industry. The other factors that caused housewives to work were recognition of being worked and getting experiences, pride, being assigned at challenging work, the desire to grow, and the factor of responsibility. Housewives working

Keluarga bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan, dan mengembangkan anggota keluarga dari berbagai jenis kebutuhan. Ibu rumah tangga dapat membantu suami dalam hal menambah pendapatan keluarga, selain peran utama untuk mengurus rumah tangga. Keluarga yang tinggal di Kelurahan Cokrodiningratan - Jetis - Yogyakarta ditemukan banyak yang terkendala dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan belum diketahui secara pasti faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja di Industri Watsawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja dan upaya yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan angket atau kuesioner kepada 44 ibu rumah tangga yang bekerja di industri ini. Analisa dengan menggunakan uji validitas variabel dan uji reliabilitas dengan *Alpha Cronbach*, kemudian pengolahan data dilakukan dengan *editing, coddling*, tabulasi, dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga yang bekerja memiliki karakter kuat pada bidang religius, toleransi, disiplin, mandiri, jujur, dan pekerja keras. Tingkat kesejahteraan dan pendapatan keluarga yang rendah (60% keluarga prasejahtera) menjadi pemicu bagi ibu rumah tangga untuk bekerja. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis bahwa faktor kebutuhan fisiologi sebagai faktor utama penyebab ibu rumah tangga bekerja di industri ini. Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab ibu rumah tangga bekerja adalah pemahaman

in the Watsawi Industry have a low level of creativity, therefore it is advisable to increase the creativity of workers through informal and non-formal education.

Keywords: *family; housewife; internal factors; social welfare*

akan pekerjaan, rasa bangga, pekerjaan yang menantang, keinginan untuk berkembang, dan faktor tanggung jawab. Ibu rumah tangga yang bekerja di Industri Watsawi memiliki tingkat kreativitas yang rendah, untuk itu disarankan peningkatan kreativitas pekerja melalui pendidikan informal dan nonformal.

Kata kunci: keluarga; ibu rumah tangga; faktor internal; kesejahteraan sosial

Tyas Eko Raharjo F. (B2P3KS Yogyakarta)

Pantang Mengemis Demi Sejahteraan Keluarga Implementasi Program Desaku Menanti di Pasuruan

Abstinence Begging for The Sake of Family Prosperity The Implementation of Program Desaku Menanti

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 3 September 2018, hal 227 - 238

This study aimed to determine the independence of bums and beggars through fulfilling family's needs the needs both physical, psychological, and social. A qualitative descriptive and qualitative approach to uncover Gepeng's independence in meeting family needs. The research was conducted in Pasuruan District with the location setting of the village settlement awaiting Prodo Village Winongan District. The data source was determined purposively, the head of the beneficiary family of my village awaiting who has gained skills guidance. Data collection was conducted through interviews with guidelines, observation, document review and bibliography, with qualitative data analysis. The results show that beneficiary families have been able to fulfill family needs. Efforts to fulfill the needs by doing basic work and being worshiped with the ownership of side jobs by family members. The needs of the family include physical, psychological, and social needs. It is recommended that the Ministry of Social Affairs synergize with the local government which is the location of "Desaku Menanti" monitoring and guidance on a regular basis. In relation to this research, East Java Provincial Social Service and Pasuruan District Social Service become

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesejahteraan gelandangan dan pengemis penghuni pemukiman desaku menanti melalui pemenuhan kebutuhan keluarga, baik fisik, psikis, dan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengungkap kesejahteraan Gepeng. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dengan lokasi pemukiman desaku menanti Desa Prodo Kecamatan Winongan. Sumber data ditetapkan secara *purposive*, yaitu kepala keluarga penerima manfaat desaku menanti yang telah mendapatkan bimbingan keterampilan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pedoman, observasi, telaah dokumen dan kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis, secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keluarga penerima manfaat telah sejahtera yang dibuktikan dengan mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dengan melakukan pekerjaan pokok dan ditambah pekerjaan sampingan. Keterpenuhan kebutuhan keluarga tersebut meliputi kebutuhan fisik, psikis, dan kebutuhan sosial. Direkomendasikan agar Kementerian Sosial bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi lokasi program desaku menanti

central in conducting guidance to beneficiary families of ex Gepeng

Keywords: *Needs fulfillment; Homeless and Beggar; My village is waiting.*

untuk melakukan monitoring dan bimbingan secara berkala. Berkait dengan penelitian ini maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menjadi sentral bimbingan keluarga penerima manfaat eks Gepeng.

Kata Kunci: *Pemenuhan kebutuhan; Gelandangan dan Pengemis; Desaku menanti.*

Memi Almizi¹ dan Istiana Hermawati² (¹Universitas Negeri Yogyakarta, dan ²B2P3KS Yogyakarta)

Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengurangi Konsumsi Rokok di Indonesia
The Effort of Poverty Alleviation by Reducing Cigarettes Consumption in Indonesia
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 3 September 2018, hal 239 - 256

Poverty is a main problem that should be seriously handled by the government. The second of the biggest poverty causes in Indonesia is the cigarettes smoking consumption. This research is aimed to analyze the connection between poverty and cigarette smoking consumption, its impact and the efforts of alleviating the poverty by reducing the consumption of cigarettes. This research is a bibliography study that uses descriptive qualitative approach. The data sources of this study comes from statistical data, articles on newspapers, and results of the previous research accordingly. The facts show that cigarette smoking consumption causes a bad impact in both, either health and economy that brings people get trapped in the circle of poverty. Poverty alleviation is a responsibility of both the government and the society. There are three recommendations as suggested by this research as follows: 1. The Directorate of Customs and Tax needs urgently to really increase the price of cigarettes; 2. The Ministry of Finance and State Budget Planning Body (Bappenas) needs to recalculate the budget for health expenses allocation and the customs revenue of the cigarettes; 3. The Social Ministry needs to tightly monitor those receive the social aid through Hoped Family Program (Program Keluarga Harapan) as they have to expend it productively and the Ministry

Kemiskinan adalah masalah pokok yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Salah satu penyumbang kemiskinan terbesar kedua di Indonesia adalah konsumsi rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan dengan konsumsi rokok, dampak merokok, dan upaya pengentasan kemiskinan dengan mengurangi konsumsi rokok. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data statistik, berita koran dan hasil penelitian. Fakta membuktikan, bahwa konsumsi rokok memberikan dampak yang buruk, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi sehingga masyarakat terjebak pada lingkaran kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah melalui: 1. Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai agar benar-benar menaikkan harga rokok; 2. Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu memperhitungkan ulang pembiayaan untuk kesehatan dan pendapatan dari bea cukai rokok; 3. Kementerian Sosial perlu memberikan pengawasan kepada masyarakat penerima bantuan sosial melalui program keluarga harapan agar bantuan itu digunakan untuk hal yang produktif, perlu melakukan sosialisasi dan membuat aturan baru mengenai

needs to socialize it accordingly and to apply new regulations on the criteria of the social aid recipient, namely for those who are poor indeed and not cigarette smokers.

Keywords: *cigarette smoking consumption; poverty alleviation.*

kriteria penerima bantuan sosial yaitu masyarakat miskin yang tidak merokok.

Kata Kunci: *konsumsi rokok; pengentasan kemiskinan.*

Rr. Christiana Mayang Anggraeni Stj. dan Kokom Komariah (Universitas Negeri Yogyakarta)

Resiliensi Kepala Keluarga Perempuan (Keppa) dalam Memenuhi Fungsi Keluarga pada Anggota PJJl Armalah Yogyakarta

Resilience of Women Family Head (Keppa) in Meeting Family Functions in Members PJJl Armalah Yogyakarta

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 3 September 2018, hal 257 - 266

This study aims to describe (1) the resilience level of Keppa, (2) differences in Keppa resilience in terms of age, (3) differences in Keppa resilience in terms of education level, and (4) differences in Keppa resilience in terms of household income. This research is a quantitative research. The sampling technique using simple random sampling. The sample of research is Keppa in PJJl Armalah Association as many as 84 people. Methods of data collection using questionnaires. Data analysis techniques in this study using crosstabb analysis. The results showed that (1) The resilience level of Keppa majority was in the high category of 51 people (60,7%). (2) There is a positive and significant difference between the age level of Keppa resilience in fulfilling the family functions of PJJl Armalah Yogyakarta members. This is indicated by a significance value of 0.007 less than 0.05 ($0.007 < 0.05$). (3) There is a positive and significant difference between the level of education towards Keppa resilience in fulfilling the family functions of PJJl Armalah Yogyakarta members. This is shown from the significance value of 0.005 is smaller than 0.05 ($0.005 < 0.05$). (4) There is positive and significant difference between the income level of Keppa resilience in fulfilling the family functions of PJJl Armalah Yogyakarta members. This is shown from the

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) tingkat resiliensi Keppa, (2) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari usia, (3) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari tingkat pendidikan, dan (4) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari pendapatan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Sampel penelitian adalah Keppa di Perhimpunan PJJl Armalah sebanyak 84 orang. Metode pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *crosstabb*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat resiliensi Keppa mayoritas berada pada kategori tinggi sebanyak 51 orang (60,7%). (2) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat usia terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi keluarga pada anggota PJJl Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). (3) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi keluarga pada anggota PJJl Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). (4) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendapatan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi keluarga

significance value of 0.032 greater than 0.05 ($0.032 < 0.05$).

Keywords: Keppa Resilience, Family Function

pada anggota PJJJ Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih besar dari 0,05 ($0,032 < 0,05$).

Kata Kunci: Resiliensi Keppa, Fungsi Keluarga

Siti Hidayatul Jumaah dan Rahmawati Husein (Universitas Muhammdiyah Yogyakarta)
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017

Evaluation on Regional Government Policy in Solving the Problem of Indonesian Migrant Workers in East Lombok District in Year 2015-2017

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 3 September 2018, hal 267 - 286

East Lombok is the region with the largest number of migrant workers. The main factor that drives the high number of migrant workers (TKI) is the economic factor, namely, working abroad can solve various economic problems of TKI's family. On the other hand, the sending of migrant workers also has some negative impact as seen from various problems suffered by the workers since pre, during, until post placement. This article aims to evaluate the implementation of local policies in overcoming the problems of migrant labors. This study used qualitative method in which the data collected was gained by conducting interviews and FGD. The results showed that from the business evaluation point of view, it was found out that; the allocation of human resources who worked and handled the migrant labors was at low quality and small quantity, from the handling time of migrant workers issues, it was noticed that it was conducted in time-consuming and slow action, and the expenses allocation point of view, it showed the incapability of the authorities in making use of high allocated budget. The evaluation on the process of handling the issues showed that the policies implementation was neither effective nor efficient. From the achieved results evaluation, it showed that the authorities had not handled the issues optimally as there were a lot of migrant issues that had not been handled and settled yet. And from the evaluation on impact point of view, it proved

Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar. Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah TKI adalah faktor ekonomi, yaitu bekerja di luar negeri mampu memecahkan berbagai permasalahan ekonomi keluarga. Disisi lain, pengiriman TKI juga memiliki dampak negatif yang dilihat dari banyaknya masalah yang menimpa para TKI sejak pra, selama, hingga pasca penempatan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan TKI. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi usaha ditemukan; alokasi SDM yang digunakan rendah secara kuantitas dan kualitas, alokasi waktu menunjukkan proses penanganan masalah TKI yang lamban, dan alokasi biaya menunjukkan ketidakmampuan pelaksanaan kebijakan dalam memanfaatkan tingginya anggaran yang ada. Evaluasi proses ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif dan efisien. Evaluasi hasil menunjukkan hasil yang belum optimal sebab banyak permasalahan TKI yang belum dapat diselesaikan. Evaluasi dampak, ditemukan bahwa: pelaksanaan kebijakan belum menghasilkan dampak yang signifikan pada penyelesaian masalah TKI. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah menambah regulasi mengenai calo/tekong dan regulasi mengenai prosedur

that the implementation of policies had not brought significant resolution on migrant workers issues yet. Based on these facts, it is recommended that the local government improves it by adding a comprehensive regulation on workers brokerage (=Calo/Tekong) and that of procedures in forwarding complaints, in enhancing human resources competences of the authorities and in tightening more on monitoring the use of the allocated budget.

Keywords: *policy evaluation; problems of migrant workers; protection; impact.*

untuk melakukan pengaduan, meningkatkan kompetensi SDM, dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan; masalah TKI; perlindungan; dampak.

Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo

Portrait of Community Empowerment-Based on Local Assets in Koi Fish Farming Group in Banyuglugur Village Banyuglugur District of Situbondo Regency

Nuril Endi Rahman

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.2 Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman Yogyakarta 55281
Email: endynurill@yahoo.co.id HP: 081357017070
diterima 16 Mei 2018, diperbaiki 25 Juni 2018, disetujui 23 Agustus 2018

Abstract

Empowerment has recently become a keyword in any poverty alleviation programs, which is either conducted by the government or by any companies through CSR programs. Empowerment is closely related to potential, participation, and capacity enhancement, therefore it cannot be separated from the role of local institutions or local actors that exist in the society, because of their function as the 'driver' in the empowerment. This study is aimed to comprehend the success of the empowerment program by the approach of the Koi fish farming groups' asset growth in the village of Banyuglugur, especially during the empowerment process. The research used qualitative descriptive method and both the location and the informants were decided purposively to gain the samples. The data was collected by conducting observation, interviews, and documents study. The result showed that the success of the empowerment was achieved by the appliance of local asset-based approach, by local actors' roles in encouraging the awareness of youth participation and in identifying the village potential collaboratively, and also by the proper cooperative factors between the Community Development Officer as the representative of PT PJB Paiton and the head of Karang Taruna Youth Local Organization.

Keyword: CSR and empowerment; local actor; local asset; social dynamics

Abstrak

Kata pemberdayaan belakangan ini telah menjadi kata kunci dalam setiap program pengentasan kemiskinan, baik itu program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau program yang dilakukan oleh perusahaan melalui CSR. Pemberdayaan erat kaitannya dengan partisipasi, potensi, dan peningkatan kapasitas, oleh karena itu pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari peran institusi lokal atau aktor lokal yang ada dalam masyarakat karena elemen-elemen sosial tersebut berfungsi sebagai penggerak dalam pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan melihat keberhasilan program pemberdayaan dengan pendekatan aset pada kelompok budidaya ikan koi di Desa Banyuglugur dalam proses pemberdayaan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dengan penentuan lokasi dan informan penelitian menggunakan *purposive* sampling, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan, keberhasilan kelompok budidaya ikan koi di Desa Banyuglugur dalam program pemberdayaan, merupakan keberhasilan dari penerapan pendekatan yang berbasis aset lokal, adanya peran aktor lokal dalam membangun kesadaran partisipasi pemuda dan mengidentifikasi potensi desa secara kolaboratif, merupakan element penting dalam keberhasilan program, serta adanya faktor kerjasama yang baik antara CDO sebagai wakil dari PT PJB Paiton dengan ketua Karang Taruna.

Kata-kata kunci: CSR dan pemberdayaan; aktor lokal; aset lokal; dinamika sosial

A. Pendahuluan

Gagasan mengenai konsep pemberdayaan bukan merupakan konsep baru, tetapi konsep

pemberdayaan ini muncul sebagai solusi atas realita ketimpangan struktur kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat selama ini, dimana

masyarakat bawah membutuhkan kekuasaan dan kekuatan dalam mengatur diri mereka sendiri. Dalam perkembangannya, konsep pemberdayaan pada saat sekarang dipahami jauh lebih moderat. Appelbaum, et al dalam Tonny dan Kolopaking (2004), mengemukakan bahwa memberdayakan suatu komunitas tertentu mengandung makna: (1) *Authority*, yaitu bahwa pemberdayaan membawa konotasi pemberian kewenangan lebih luas kepada komunitas tertentu; dan (2) *Capacity*, yaitu bahwa kekuasaan bermakna sebagai energi, artinya pemberdayaan bermakna sebagai ‘pemberian energi’ dari pihak yang kuat kepada komunitas yang lemah (Fahrudin, 2011:152).

Pada konsep pemberdayaan, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak lagi disebut sebagai kelompok yang lemah dan tidak memiliki potensi apa-apa. Justru masyarakat dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup, sosi-ekonomi. Yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dalam hal pemberdayaan lebih kepada ketiadaan akses untuk memaksimalkan potensi mereka, dan masih terbatasnya sistem sumber yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi mereka. Kekuasaan/*power* dalam suatu pemberdayaan juga diperlukan adanya peran fasilitator untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada dan menghubungkannya dengan sistem sumber lainnya untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kapasitas.

Salah satu aspek penting dari proses pengembangan masyarakat adalah bahwa proses tersebut tidak dapat dipaksakan. Agar proses berjalan baik, diperlukan langkah yang ‘*natural*’ untuk memulainya, dan untuk mendorong proses tersebut menyelaraskan dengan langkah tersebut. Ini merupakan hasil yang alamiah dari gagasan ‘pengembangan organik’ yang merupakan pendekatan untuk melihat perubahan terjadi pada beberapa dimensi, melalui proses pengembangan yang bertahap bukan perubahan radikal

yang dipaksakan (Ife dan Tesoriero, 2016:356-357).

Program *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh PT PJB Paiton di Desa Banyuglugur, merupakan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016. Melalui budidaya ikan koi, perusahaan menyerahkan pengelolaan kolam ikan kepada karang taruna Desa Banyuglugur dengan disertai pendampingan dan pelatihan untuk mencapai keberhasilan program, yakni terciptanya peningkatan ekonomi para anggota kelompok melalui aktivitas budidaya ikan koi dan terciptanya kemandirian kelompok dalam mengelola aset yang telah ada dan aset lain yang terdapat di Desa Banyuglugur.

Pelaksanaan program CSR PT PJB Paiton merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, sebagai salah satu desa terdampak, Desa Banyuglugur menjadi binaan perusahaan. Melalui budidaya ikan koi, pihak perusahaan melalui *Community Development Officer* (CDO) mencoba menggunakan strategi pemberdayaan yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Mengingat pengalaman sebelumnya, yakni kelompok pemanfaat yang gagal dalam program budidaya ikan koi mengingat program yang dilakukan bersifat parsial tidak disertai pelatihan dan strategi yang komprehensif. Setelah sempat 2 tahun tidak dimanfaatkan, pihak perusahaan melalui CDO mencoba mengidentifikasi kelompok-kelompok dan aktor lokal yang ada di Desa Banyuglugur, yang akan dijadikan sasaran program budidaya ikan koi selanjutnya.

Fokus penelitian ini ialah untuk melihat keberhasilan program pemberdayaan CSR PJB Paiton yang memanfaatkan potensi lokal, yakni melalui budidaya ikan koi, yang kemudian memanfaatkan aktor lokal yakni ketua karang taruna Desa Banyuglugur untuk mengelola kolam ikan koi tersebut yang pemanfaatannya untuk memberdayakan seluruh anggota karang taruna dan para pemuda di Desa Banyuglugur secara berkelanjutan.

Dalam memperkuat analisis terhadap penelitian, peneliti menggunakan teori pendekatan berbasis aset yang dijelaskan oleh Dureau (2013:08), yang menjelaskan bahwa pendekatan berbasis kekuatan melihat realitas dengan cara yang jauh lebih alami dan holistik. Kegiatan pembangunan harus ditetapkan dalam konteks organisme hidup yang memiliki sejarah dan aspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Selain menggunakan logika dan analisis, memori dan imajinasi juga penting dihidupkan dalam mencipta perubahan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Patton (2009:13) rancangan penelitian kualitatif bersifat naturalistik, dan pendekatan naturalistik utamanya berguna untuk mengkaji berbagai variasi implementasi program. Apa yang terjadi dalam program seringkali bervariasi seperti halnya para peserta dan perubahan kondisi. Program yang dalam proses implementasi pada banyak lokasi akan menyatakan perbedaan yang penting dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pemberdayaan berbasis aset lokal melalui program pemberdayaan CSR. Fokus utama penelitian ini ialah melihat bagaimana kelompok pemanfaat program mampu mengelola program dengan baik, dimana peran aktor lokal menjadi faktor kunci dan disertai kerjasama dengan pihak CDO sebagai pendamping program.

Sementara Penentuan informan dalam penelitian menggunakan *purposive* sampling, menurut Neuman (2013:298) *purposive* sampling merupakan sampel non acak yang penelitiannya menggunakan berbagai metode untuk mencari semua kemungkinan kasus yang begitu spesifik dan populasinya sulit dijangkau. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan berdasarkan informasi dari CDO sebagai pendamping program yang juga menjadi informan primer bersama ketua kelompok pemanfaat.

Pengumpulan data dalam penelitian dengan observasi di lokasi pelaksanaan program di Desa Banyuglugur khususnya pada aktivitas kelompok budidaya ikan koi, wawancara mendalam dilakukan kepada ketua kelompok dan anggota kelompok serta CDO yang merupakan pendamping program, dan dokumentasi yakni dengan mengambil foto aktivitas kelompok. Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yakni hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

C. Program CSR PJB Paiton sebagai Stimulus bagi Kelompok Budidaya Ikan Koi

Desa Banyuglugur merupakan desa yang yang berada dekat kawasan objek vital nasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU Paiton). Desa Banyuglugur berada di wilayah operasi ring 1 PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB Paiton), keberadaan industri pembangkit tenaga listrik telah menyebabkan berbagai dampak baik lingkungan maupun sosial di Desa Banyuglugur. Pada tahun 1992, PT.PJB Paiton melakukan perluasan untuk menyokong tenaga listrik, yakni dengan menggunakan tenaga air di mana di Desa Banyuglugur terdapat sumber mata air yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk keperluan sehari-hari, dengan adanya kebutuhan tenaga pembangkit tersebut kemudian PJB Paiton membuat bendungan dan memanfaatkan sumber air di Desa Banyuglugur untuk keperluan pembangkit listrik tambahan di PLTU Paiton. Dampak dari pembuatan bendungan bagi masyarakat Desa Banyuglugur yakni, kehilangan akses terhadap sumber mata air untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan adanya tanggung jawab sosial dari pihak PJB Paiton maka melalui program CSR PT.PJB Paiton membuat kolam yang sumber airnya dialiri dari bendungan yang dibangun oleh pihak perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh informan Ib:

Kalau kita itu mulai tahun 2015 ya ada disini, karena kolam mini sudah ada sejak tahun 1992 tapi belum jelas dulu itu pemanfaatannya, nah waktu mau diserahkan ke kita awalnya saya dipanggil diajak bicara sama pihak CSRnya PJB itu dan bilang kalau kolam ikan ini akan diaktifkan lagi ketimbang nganggur kayak sekarang ini ya saya sebagai ketua karang taruna bersedia aja karena saya pikir ini bisa lah digunakan untuk kegiatan pemuda sini biar ndak nganggur.

Pada awal pembuatan tahun 1992, kolam di Desa Banyuglugur masih dipergunakan sebagai tempat untuk mandi oleh masyarakat sekitar yang pada saat itu sebagian belum mempunyai kamar mandi. Memasuki tahun 2012 pihak PJB Paiton merencanakan revitalisasi kolam di Desa Banyuglugur yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, program budidaya ikan koi akhirnya dipilih sebagai sarana pemberdayaan bagi masyarakat, pada awal pelaksanaan program. Pihak PJB Paiton menetapkan penerima manfaat program secara acak yakni masyarakat Desa Banyuglugur yang tempat tinggalnya paling dekat dengan lokasi bendungan dan kolam. Memasuki tahun 2015, penerima manfaat dialihkan ke kelompok karang taruna Desa Banyuglugur yang diketuai oleh Bapak Ibnu, alasan pengalihan penerima manfaat dikarenakan penerima manfaat sebelumnya yang kurang berhasil mengelola budidaya ikan koi sehingga kurang memberikan manfaat bagi penerima manfaat sebelumnya.

Keterangan berikutnya mengenai pemilihan karang taruna Desa Banyuglugur sebagai sasaran program disampaikan oleh R sebagai CDO:

Kolam itu lumayan lama ya vakumnya semenjak saya baru masuk disini itu masih belum ada yang ngelola akhirnya kita berinisiatif lagi mengaktifkan kolam itu sebagai program CSR kita, pada tahap awal kita

melakukan identifikasi ya salah satunya ya aktor lokal yang punya pengaruh kuat di desa ini dan harapan kita agar nantinya para pemudanya bisa berpartisipasi dan bisa dapet pendapatan lah dari program ini, alasan kami menunjuk ketua karang taruna Desa Banyuglugur karena pak Ib dekat dengan pemuda dan cukup punya pengetahuan lah untuk mengelola kolam itu.

Penunjukan kelompok karang taruna sebagai penerima manfaat program budidaya ikan koi berdasarkan hasil identifikasi dari tim CSR PT.PJB Paiton bahwa kelompok karang taruna Desa Banyuglugur merupakan organisasi kepemudaan di mana para anggotanya memiliki potensi untuk mengelola kolam ikan. Peran dari kelompok karang taruna dalam pengelolaan program menjadi faktor kunci, ketua karang taruna Desa Banyuglugur juga memiliki pengetahuan akan potensi desa serta memiliki peran yang kuat juga di masyarakat terutama pemuda, sehingga Bapak Ibnu dijadikan ketua kelompok dalam budidaya ikan koi.

Tujuan pemetaan aset adalah agar masyarakat menyadari bahwa pada kenyataannya ada banyak jenis aksi yang bisa mereka lakukan bila mereka mulai menghubungkan dan memobilisasi aset yang ada. Aset mewakili kesempatan untuk melakukan aksi terutama bila aset tersebut digolongkan berdasarkan potensi unit produktif yang potensial (Dureau, 2013:161).

Dari hasil pemetaan aset secara kolaboratif dengan pihak *Community Development Officer* (CDO), kesadaran para anggota kelompok mulai terbangun bahwa di wilayah mereka terdapat potensi yang potensial dimana mereka dapat melakukan aktivitas yang produktif selain dari budidaya ikan koi, mengingat di sekitar lokasi kolam merupakan lahan subur yang dapat dimanfaatkan. Energi anggota kelompok mulai terpacu setelah mereka menemukan potensi mereka.

Peran Aktor Lokal dan CDO dalam Menjalankan Pemberdayaan

Dalam membangkitkan energi komunitas diperlukan suatu komitmen bersama antara pihak luar dan aktor lokal yang berkaitan dengan pemetaan potensi secara kolaboratif, kemudian menyerahkan kegiatan pemberdayaan kepada aktor lokal dengan disertai pemantauan partisipatif. Pada tahap awal pengelolaan, ketua kelompok budidaya ikan koi Desa Banyuglugur diberikan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan pengelolaan program di mana pendampingan dari pihak CDO juga dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh informan R:

Setelah kita menetapkan pak Ib sebagai ketua kelompok, ya akhirnya tanggung jawab berikutnya kita serahkan sepenuhnya sama beliau untuk mengelola kolam itu, termasuk juga mengajak anggotanya bisa aktif dalam kegiatan dan harapan kita juga keikutsertaan pemudanya meningkat ya dengan pak Ib sebagai ketuanya.

Hal tersebut menunjukkan adanya pemberian peluang kepada aktor lokal untuk mengelola program secara mandiri, dimana program tersebut akan memberikan dampak peningkatan sosio-ekonomi masyarakat. Pemberian kewenangan penuh tersebut juga akan meningkatkan partisipasi para pemuda dalam aktivitas program, mengingat ketua kelompok mempunyai sebuah energi sosial untuk merangkul para pemuda terlibat dalam kegiatan.

Seperti yang dijelaskan Soetomo (2008:13) apabila dalam perspektif pembangunan konvensional digunakan pendekatan yang bersifat sentralistik, maka dalam perspektif alternatif ini menggunakan hal yang sebaliknya yaitu mengutamakan desentralisasi. Desentralisasi terutama dilakukan dalam pengambilan keputusan yang meliputi keseluruhan proses pembangunan, mulai dari identifikasi persoalan dan kebutuhan, penyusunan program, dan pengelolaan program. Oleh sebab itu dalam pelaksana-

annya lebih mengutamakan swakelola, dalam pengertian masyarakat lokal mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan kegiatan pemenuhan kebutuhannya.

Dalam hal ini desentralisasi merupakan *entry point* dalam pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diikuti dengan pemetaan potensi aset, kapasitas aktor lokal, dan kesadaran para anggota kelompok dalam menjalankan aksi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dureau (2013:17) pemetaan aset yang dilakukan oleh anggota kelompok, organisasi atau komunitas menjadi gambaran yang sangat persuasif tentang apa yang bisa dicapai dan bisa dimulai secepatnya, pemetaan aset adalah proses belajar menghitung dan menghargai untuk menata dan memberi makna pada aset yang dimiliki komunitas, baik yang bisa ditemukanali, sebagai sumberdaya produktif milik sendiri, maupun diterima dari pihak luar.

Aset yang terdapat di Desa Banyuglugur merupakan aset gabungan yakni aset yang berupa sumber daya dan aset yang berupa teknologi dan infrastruktur pendukung yang dibangun oleh PT. PJB Paiton sebagai wujud program CSR. Lokasi Desa Banyuglugur yang berada di ring satu PJB Paiton merupakan konsekuensi dimana pihak perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Mulyadi (2007:346) memasuki era desentralisasi, di Indonesia telah terjadi gerakan yang dilakukan oleh sektor privat untuk mempropagandakan pentingnya pelaksanaan program perlindungan lingkungan hidup dan *community development*. Wujud dari gerakan itu adalah terbentuknya beberapa lembaga dalam bentuk asosiasi dan forum yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk mengerangai gerakan tersebut. Di tingkat yang lebih mikro, di perusahaan muncul berbagai divisi yang dibangun untuk mengorganisir realisasi program *community development*. Melalui lembaga-lembaga ini, perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa mereka peduli dengan nasib masyarakat miskin yang hidup di sekitarnya.

Era desentralisasi merupakan era perubahan dari pendekatan pembangunan, kekuatan lokal merupakan element-element sosial yang mampu menciptakan sebuah perubahan pada level komunitas, apabila diikuti dengan pendampingan yang baik dan partisipatif. Pemanfaatan aset melalui komunitas yang terdapat dalam program CSR PJB Paiton merupakan bentuk komitmen dari pihak CSR dengan kelompok pemanfaat, yang secara kolaboratif membangun kemandirian masyarakat dimana masyarakat dalam hal ini kelompok pemanfaat diberikan kewenangan penuh dalam proses pemberdayaan, mulai dari tahap identifikasi, pelaksanaan hingga pada kegiatan monitoring dan evaluasi.

Dinamika Sosial Kelompok

1. Meningkatkan Kesadaran Pemuda

Pada awal pengelolaan program, keterlibatan anggota kelompok dan pemuda di Desa Banyuglugur masih rendah mengingat kesadaran mereka akan potensi lokal yang dimiliki belum sepenuhnya dipahami. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh ketua kelompok dalam mengelola budidaya ikan koi, pada tahap awal hanya diikuti oleh beberapa anggota saja dan kegiatan awal masih sebatas perawatan harian, seperti yang dijelaskan oleh informan Ib:

Pertamanya masih sepi mas mungkin anak-anak itu belum melihat daya tariknya ya di ikan koi ini ya ajar emang karena awalnya belum ada hasil pemasaran dan pelatihan tentang cara mengembangkan biakkan, mungkin kalo sudah ada pelatihan dan dibantu pemasaran para anggota dan anak-anak muda disini bisa tertarik

Kesadaran masyarakat akan muncul apabila diberikan sebuah stimulus yang menjadikan sebuah aset tersebut dapat memberikan dampak bagi kehidupan mereka. Aktivitas yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, juga memiliki pengaruh bagi kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

Berikut merupakan kutipan wawancara dari informan R sebagai CDO:

Untuk meningkatkan pengetahuan anggota kelompok secara keseluruhan kami kemudian mengadakan pelatihan teknis dari para ahli budidaya koi mengenai mengembangkan biakkan ikan koi dan cara merawat yang baik gak lama setelah adanya pelatihan itu Pak Ib mulai bisa mengajak para pemuda dan mulai banyak yang bergabung.

Dengan adanya aktivitas pelatihan tersebut, masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai cara budidaya ikan koi yang baik, sehingga kesadaran mereka akan tumbuh dan mendorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Peran dari aktor lokal dan CDO dalam hal ini berfungsi sebagai pendidik bagi anggota yang lain.

Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran-tahuan menekankan pentingnya suatu proses edukatif (dalam pengertian luas) melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Ini memasukkan gagasan-gagasan peningkatan kesadaran membantu masyarakat memahami masyarakat dan struktur opresi, memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya (Ife dan Tesoriero, 2016:148).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Soetomo (2006:55) menjelaskan bahwa kesempatan dan peluang bagi masyarakat lokal untuk mengambil keputusan dan merencanakan serta mengelola proses pembangunan di lingkungan komunitasnya, perlu diikuti dengan pengembangan kapasitas masyarakat. Kesempatan dan peluang yang terbuka untuk mengelola pembangunan secara mandiri menjadi percuma dan berhenti sekedar wacana, apabila masyarakat lokal tidak dapat melaksanakannya oleh karena tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan. Setiap masyarakat memiliki potensi terutama melalui berbagai bentuk kearifan dan pengetahuan lokal yang secara alamiah justru lebih

adaptif dengan kondisi baik lingkungan fisik maupun sosio-kultural masyarakatnya.

Upaya mendorong kesadaran pada kelompok budidaya ikan koi di Desa Banyuglugur merupakan agenda bersama antara aktor lokal dan CDO, aktor lokal meningkatkan kesadaran melalui motivasi kepada pemuda melalui pertemuan kelompok rutin, motivasi berkaitan dengan potensi yang apabila dimanfaatkan dan dikelola secara kolaboratif akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sementara peran CDO ialah memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui sumber-sumber yang relevan, seperti kegiatan pelatihan mengembangkan ikan koi yang memerlukan penerangan dari ahli terkait budidaya ikan koi. Dengan demikian kesadaran para pemuda di Desa Banyuglugur semakin meningkat seiring meningkatnya kapasitas mereka pasca adanya pelatihan dan peran dari ketua kelompok yang mengarahkan pemuda untuk melakukan aksi-aksi yang mendukung kegiatan program, seperti kegiatan pemasaran ikan koi yang dilakukan oleh para pemuda.

2. Perubahan Pola Pikir Kelompok Budidaya Ikan Koi

Selama 2 tahun terakhir proses pelaksanaan program CSR PJB Paiton melalui budidaya ikan koi telah berdampak pada terjadinya dinamika sosial dalam kelompok, terutama bagi kalangan pemuda yang sebelumnya tidak memiliki kegiatan/keterampilan (*powerless*) namun selama 2 tahun tergabung dalam kelompok, mengalami perubahan pola pikir mereka menjadi lebih produktif. Seperti yang dijelaskan oleh Informan Ib sebagai ketua kelompok yakni:

Kalau menurut saya ya yang paling kelihatan itu perubahan di anak-anak muda ini karena dulu mereka itu pengangguran dan ndak punya kegiatan yang menghasilkan, tapi setelah saya arahkan dengan sabar akhirnya mereka pelan-pelan mulai mau gabung kan sayang ya masak kita punya aset kola mini ndak dimanfaatkan ya minimal untuk usaha sampingan lah meskipun

bukan untuk penghasilan utama, ya saya sendiri melakukan inovasi kan dipinggir kolam itu masih luas lahannya akhirnya kita menanam sayur-sayuran kayak sawi, terong dan cabai untuk penghasilan tambahan kita ya alhamdulillah sekarang anak-anak itu sudah tidak lagi mabuk-mabukan kayak dulu dan sekarang lebih sering disini untuk kegiatan budidaya ini.

Perubahan pola pikir para pemuda dalam kelompok budidaya ikan koi merupakan hasil dari kerja keras aktor lokal dalam membangkitkan kesadaran dan mendorong partisipasi mereka dalam program. Dengan adanya keterampilan baru oleh para pemuda, juga memberikan dampak perubahan pola pikir mereka yang pada saat ini mengarah ke orientasi produktif, dan munculnya sebuah kebiasaan baru yakni kegiatan berorganisasi di kelompok secara rutin untuk membahas rencana kelompok ke depan terkait inovasi-inovasi untuk meningkatkan pemberdayaan mereka.

Dalam konteks organisasi, terutama lembaga-lembaga tradisional dan kelompok di desa, seringkali insting bertahan hidup lebih kuat dan lebih diutamakan oleh pemimpin dibandingkan pilihan cara berkembang. Pemimpin desa dihormati karena mereka tahu cara melestarikan budaya dan tradisi. Bila kelompok tradisional di desa atau kelompok lain menginginkan perubahan, mereka harus dengan sungguh mempelajari cara baru memahami hidup mereka dan belajar menjadi lebih positif tentang pergerakan menuju masa depan. Mereka harus belajar mengenali apa yang telah membuat mereka berkembang, daripada apa yang membuat mereka aman, apa yang bisa mereka gunakan dalam konteks mereka untuk memperlebar batas-batas mereka daripada mengkhawatirkan kegagalan (Dureau, 2013:21).

Ketua kelompok budidaya pada perkembangan kelompok sampai pada saat ini memiliki visi yakni menciptakan inovasi seluas-luasnya, hal tersebut dilakukan mengingat kegiatan bu-

didaya ikan koi tidak selalu mendatangkan penghasilan yang cukup bagi kelompok, untuk itu inisiatif menanam tanaman sayur di sekitar lokasi kolam adalah representasi dari kelompok untuk dapat berkembang dan memperlebar batas-batas kegiatan untuk lebih meningkatkan sosio-ekonomi para anggota kelompok.

Peran aktor lokal dalam memobilisasi sebuah perubahan erat kaitannya dengan kapabilitas seorang ketua kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh Sen dalam Sunaryo (2017:102) kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu dapat diklasifikasi menjadi kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan. Oleh karena itu, secara garis besar, ada dua pertimbangan yang dianggap bernilai oleh setiap orang. Yang pertama pertimbangan kesejahteraan (*well-being*) berupa motif umum yang dijadikan pertimbangan oleh seseorang dalam bertindak. Dan yang kedua adalah pertimbangan kepelakuan (*agency*). Dengan memasukkan pertimbangan kepelakuan, ia berpandangan tindakan manusia tidak hanya didorong oleh motif kesejahteraan atau yang terkait dengan kepentingan diri (*self-interest*). Tindakan seseorang juga bisa didorong oleh sesuatu yang sama sekali tidak terkait dengan maksimalisasi kepentingan diri.

Kapabilitas seorang aktor lokal dan CDO menjadi point substansial dalam melaksanakan pemberdayaan berbasis aset. Suatu perubahan akan lebih mungkin tercipta dengan proses kolaborasi antara pihak aktor lokal dan fasilitator, mengingat pemetaan aset juga memerlukan pengetahuan ilmiah maka peran fasilitator profesional diperlukan, sedangkan mobilisasi pemanfaatan aset lebih banyak membutuhkan peran dari aktor lokal.

Sejalan dengan itu menurut Yoo et,al (2009,265) menjelaskan transisi sebagai langkah dalam model pemberdayaan yakni:

‘Originally, step 6 was suggested as a stage where facilitators roles are transitioned to community leaders. When time and other resources, allow community groups can move on to another community health’

Relasi sosial yang terjalin antara pihak CDO PT PJB Paiton dan kelompok pemanfaat merupakan relasi yang didalamnya terjadi *transfer of knowledge* dari fasilitator terhadap kelompok, transfer of knowledge tersebut merupakan energi positif kepada kelompok untuk menatap masa depan kelompok melalui pengelolaan aset, *transfer of knowledge* juga memunculkan sikap kritis pada aktor lokal yakni, ketua kelompok. Sikap kritis menjadi penting agar kelompok tetap memiliki kewenangan sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat program pemberdayaan. Sikap kritis juga berguna sebagai alat pengontrol sosial bagi perusahaan untuk selalu menjalankan tanggung jawab sosialnya secara berkelanjutan.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan CSR PT PJB Paiton di Desa Banyuglugur melalui pendekatan berbasis aset, telah menghadirkan sejumlah perubahan pada kelompok penerima manfaat. Perubahan tersebut yakni kesadaran para anggota kelompok yang menyadari bahwa mereka mempunyai potensi yang telah terbukti dapat menjadi sumber penghidupan, meningkatnya partisipasi pemuda dalam kelompok untuk terlibat dalam kegiatan program, dan terjadinya perubahan pola pikir kepada para anggota kelompok yang merupakan pemuda desa di mana mereka pada saat ini telah memiliki kesadaran pentingnya berorganisasi dalam kelompok serta kesadaran mengenai potensi yang mereka miliki.

Keberhasilan program CSR PT PJB Paiton di Desa Banyuglugur melalui budidaya ikan koi ditunjang oleh adanya upaya yang serius dari aktor lokal yakni ketua kelompok dan CDO sebagai fasilitator, yang bekerjasama untuk memberdayakan anggota kelompok. Pemberian kewenangan penuh terhadap kelompok dalam mengelola program juga menjadi faktor yang mendukung kesuksesan program.

Saran: Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti merumuskan saran bagi *stakeholders* guna memperbaiki dan menjaga keberlanjutan keberdayaan.

1. Model pemberdayaan berbasis aset di Desa Banyuglugur perlu dilanjutkan oleh pihak PT PJB Paiton dengan meningkatkan inovasi seperti perluasan kegiatan selain ikan koi serta perlunya perluasan akses pemasaran produk untuk meningkatkan produksi.
2. Model pemberdayaan ini perlu diterapkan di ring 2 dan 3 mengingat wilayah operasi PTPJB Paiton yang cukup luas dan setiap daerah di wilayah operasi masing-masing juga mempunyai potensi yang beragam, sehingga perlunya sebuah *role model* bagi wilayah lain.

Daftar Pustaka

- Dureau, Christopher. (2013). "*Pembaru dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan*". Jakarta: AUS-ID, Kemendagri
- Fahrudin, Adi (ed). (2011). "*Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*". Bandung: Humaniora
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2016). "*Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Neuman, W. Laurance. (2013). "*Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*". Jakarta: Indeks
- Patton, M, Quinn. (2009). "*Metode Evaluasi Kualitatif*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunaryo. (2017). "*Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sumarto, Mulyadi. (2007). "*Kepedulian Sosial Perusahaan: Cermin Disfungsi Pluralisme Kesejahteraan*". Jurnal Sosial Politik, Vol.10 No.3, Maret 2007, 343-364
- Soetomo. (2008). "*Menuju Kesejahteraan Masyarakat: Masyarakat kuat, Negara Kuat Mengapa Tidak?*". Jurnal Sosial Politik, Vol.12 No.1 Juli 2008, 1-120
- Soetomo. (2006). "*Persoalan Pengembangan Institusi Pemberdayaan Masyarakat*". Jurnal Sosial Politik, Vol.10, No.1 Juli 2006, 51-69\
- Yoo, Seunghyun *et.al*. (2009). "*The 6-Step Model For Community Empowerment: Revisited in Public Housing Communities for Low- Income Senior Citizens*". Health Promotion Promotion Practice, Vol.10 No.2, 262-275

Faktor yang Mempengaruhi Upaya Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Factors Affecting the Housewife Efforts in Improving Social Welfare

Marietta Marlina Telaumbanua¹ dan Mutiara Nugraheni²

¹Program Pascasarjana Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 55281, Indonesia

²Jurusan Pendidikan Tata Boga dan Busana, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail: mariettatel17@gmail.com

diterima 01 Juni 2018, diperbaiki 25 Juni 2018, disetujui 13 September 2018

Abstract

Every family is responsible for maintaining, growing, and developing family members on various types of life needs. Housewives can help their husbands in earning for a living, besides of their own duty as a housewife. In some families living in Cokrodiningratan sub-district of Jetis – Yogyakarta, it was found out that many obstacles occurred in fulfilling their daily needs and it had not been known precisely the factors that influenced many housewives worked in Watsawi Industry yet. This study aims to determine the internal factors that affect housewives to work and and that of the efforts required to improve the family welfare. The data was collected by conducting direct observations, interviews, documentation, and by distributing questionnaire to 44 housewives working in this industry. The data was analyzed by using the test of variable validity and the test of reliability by using Alpha Cronbach, then data was processed by doing editing, coddling, tabulation, and graphs. The results showed that most working housewives had a strong character in the religious aspect, more tolerance, discipline, self-reliance, honesty, and being hard workers. Low family welfare and income level (60% of underprivileged families) had become the triggers for housewives to work. It was proven by result analysis that the factor of physiology needs became the main factor causing housewives worked in this industry. The other factors that caused housewives to work were recognition of being worked and getting experiences, pride, being assigned at challenging work, the desire to grow, and the factor of responsibility. Housewives working in the Watsawi Industry have a low level of creativity, therefore it is advisable to increase the creativity of workers through informal and non-formal education.

Keywords: *family; housewife; internal factors; social welfare*

Abstrak

Keluarga bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan, dan mengembangkan anggota keluarga dari berbagai jenis kebutuhan. Ibu rumah tangga dapat membantu suami dalam hal menambah pendapatan keluarga, selain peran utama untuk mengurus rumah tangga. Keluarga yang tinggal di Kelurahan Cokrodiningratan - Jetis - Yogyakarta ditemukan banyak yang terkendala dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan belum diketahui secara pasti faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja di Industri Watsawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja dan upaya yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan angket atau kuesioner kepada 44 ibu rumah tangga yang bekerja di industri ini. Analisa dengan menggunakan uji validitas variabel dan uji reliabilitas dengan *Alpha Cronbach*, kemudian pengolahan data dilakukan dengan *editing*, *coddling*, tabulasi, dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga yang bekerja memiliki karakter kuat pada bidang religius, toleransi, disiplin, mandiri, jujur, dan pekerja keras. Tingkat kesejahteraan dan pendapatan keluarga yang rendah (60% keluarga prasejahtera) menjadi pemicu bagi ibu rumah tangga untuk bekerja. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis bahwa faktor kebutuhan fisiologi sebagai faktor utama penyebab ibu rumah tangga bekerja di industri ini. Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab ibu rumah tangga bekerja adalah pemahaman akan pekerjaan, rasa bangga, pekerjaan yang menantang, keinginan untuk berkembang, dan faktor tanggung jawab. Ibu rumah tangga yang bekerja di Industri Watsawi memiliki tingkat kreativitas yang rendah, untuk itu disarankan peningkatan kreativitas pekerja melalui pendidikan informal dan nonformal.

Kata kunci: *keluarga; ibu rumah tangga; faktor internal; kesejahteraan sosial*

A. Pendahuluan

Kekuatan pembangunan sosial ekonomi akan optimal apabila penduduk dapat berpartisipasi penuh dengan cara menggali semua kemampuan setiap lapisan masyarakat termasuk pemberdayaan kaum wanita untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan itu sendiri. Setiap orang termasuk wanita mampu mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia. Pekerja wanita yang telah berkeluarga juga merupakan aset atau sumber daya manusia yang produktif dalam pembangunan baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Rosni (2017) menyatakan bahwa pembangunan nasional dapat terlihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada kualitas hidup keluarga yang lebih baik.

Umumnya kesejahteraan sosial dipahami pada ketidakmampuan secara ekonomi yang meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Terdapat lima permasalahan kesejahteraan sosial yang tersebar di Indonesia, di antaranya keluarga fakir miskin, keluarga tinggal di rumah tidak layak huni, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan penyandang cacat (Udiati & Murti-widayanti, 2017). Permasalahan utama ada pada kemiskinan dan rumah tidak layak huni bagi keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Muflikhati *et al.* (2010), faktor sosial ekonomi, jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, dan posisi di masyarakat dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Keluarga yang memiliki ciri-ciri makmur, sehat, dan damai terlihat dari indikator aspek fisik, pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi, keluarga yang dikategorikan sejahtera dapat meningkatkan angka kemakmuran pada suatu daerah untuk kemudian menekan jumlah kemiskinan pada suatu daerah (Widyastuti, 2012). Keluarga adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan atas dua orang atau lebih hidup dalam satu rumah tangga yang saling

berinteraksi di antara sesama anggota keluarga dan mempunyai ikatan emosional serta peran masing-masing dalam menciptakan dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarganya. Hasil penelitian Mulyati *et al.* (2018), menunjukkan bahwa dari uji korelasi dukungan sosial berhubungan secara nyata dengan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan yang semakin baik.

Semua anggota keluarga dapat berperan dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Peran seorang ibu rumah tangga dapat menjadi dominan karena mempunyai kewajiban dalam mengurus rumah tangga. Ibu rumah tangga dapat membantu suami dalam hal menambah pendapatan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Rusnani, 2013). Keluarga dengan produktivitas kerja yang lebih baik berpengaruh signifikan pada tingkat kesejahteraan keluarga, karena dapat menunjukkan peningkatan standar hidup melalui pendapatan yang diperolehnya (Widyastuti, 2012).

Tanggung jawab diperlukan untuk mengembangkan fisik, sosial, dan perkembangan akan pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun nonformal yang turut mengembangkan intelektual, sosial, mental, emosional, dan spiritual. Putra *et al.* (2017) menyatakan bahwa selain aspek fisik, aspek sosial memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebijakan pembangunan.

Kesehatan anak tidak selalu identik dengan peningkatan berat badan, dalam beberapa kasus didapatkan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pendapatan rendah memiliki kelebihan berat badan dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga dengan pendapatan yang tinggi (Alaimo *et al.*, 2001). Faktor sosial ekonomi keluarga mempengaruhi kebutuhan anak dalam keluarga (Sebataraja *et al.*, 2014). Kebutuhan anak yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk meningkatkan kesehatannya.

Pendapatan keluarga yang rendah dapat mengurangi kesejahteraan keluarga yang dapat mengakibatkan sistem pengasuhan anak menja-

di berkurang, karena tingkat kesejahteraan yang rendah dapat menghambat penyediaan lingkungan pengasuhan anak yang lebih berkualitas (Elmanora *et al.*, 2017). Keseimbangan pertumbuhan otak kiri dan kanan, logika dan perasaan, seni dan angka-angka, sosial dan pengembangan pribadi, dan antusias bekerja menjadi kaya dan murah hati didapatkan pada anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga sejahtera dan bahagia memiliki (Wijanarko, 2018).

Masyarakat masih berpendapat bahwa keluarga yang ideal adalah suami bekerja dan istri hanya bekerja di dalam rumah. Suami memiliki peran sebagai pencari nafkah dan pemimpin yang penuh wibawa, sementara istri hanya menjalankan tugas sebagai pengasuh anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran masing-masing tidak selalu baku, apalagi kondisi ekonomi yang kurang stabil dengan pengeluaran keluarga yang masih jauh lebih tinggi daripada penghasilan suami sebagai kepala keluarga, sehingga istri pun dituntut untuk dapat berperan sebagai pencari nafkah.

Menurut Mencarini dan Vignoli (2018), pekerja wanita tidak berpengaruh negatif pada stabilitas perkumpulan pekerja, kecuali pembayaran gaji mereka bermasalah. Umumnya suami menginginkan isteri bekerja di rumah untuk mengurus rumah tangga, karena kecenderungan istri mengambil alih tanggung jawab dan keputusan rumah tangga, jika pendapatan istri lebih tinggi dari pada suami (Treas & Tai, 2012).

Terlepas dari pembahasan di atas, perdebatan mungkin muncul lebih karena anggapan dari masyarakat bahwa akan ada akibat yang timbul jika suami-istri bekerja di luar rumah yaitu “mengganggu” keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Bagaimanapun juga, tentu saja memang akan ada dampak yang timbul jika suami-istri bekerja di luar rumah. Solusi yang diambil tidak semestinya membebaskan istri dengan dua peran sekaligus baik dengan peran pengasuh anak (*nursery*) maupun pencari nafkah di luar rumah (*provider*), yang akan lebih membawa wanita kepada beban ganda, akan

tetapi dukungan sistem yang tidak membawa wanita pada posisi yang dilematis (Ermawati, 2016). Hal ini perlu untuk mengurangi tingkat *stress* yang dialami oleh ibu rumah tangga, karena faktor ini dapat menjadi penyebab ketahanan dan keutuhan pernikahan. Izumi *et al.* (2018) mengemukakan bahwa selain tingkat *stress* ibu rumah tangga yang menurun, peran kedua orang tua, dan keharmonisan pernikahan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku anak-anak.

Perlu dikaji lebih jauh, apakah faktor yang menyebabkan ibu rumah tangga harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau adanya faktor-faktor pendukung lainnya. Faktor yang dibangkitkan dari dalam diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar atau dengan kata lain individu tersebut tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek lain (Heryanto & Soekiman, 2009). Tenaga kerja dapat bekerja karena tertarik dan senang dengan pekerjaannya, kepuasan dan kebahagiaan dalam dirinya. Menurut Suryono (2014), peningkatan kesejahteraan sosial dapat diidentifikasi dari tiga elemen pokok yaitu masalah-masalah sosial, kebutuhan yang terpenuhi, dan kesempatan atau peluang yang meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Faktor internal yang terbentuk dalam diri seseorang berperan sangat penting dalam menciptakan prestasi kerja yang tinggi dan kinerja yang optimal secara terus menerus. Yao & Lei (2018) meneliti tentang faktor-faktor pendapatan, kekayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, ras, dan warisan yang mempengaruhi perencanaan keuangan. Siahaan *et al.* (2015) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi niat menggunakan kecap lokal di antaranya sikap terhadap perilaku dan kontrol perilaku seperti memberi keuntungan, membuat masakan menjadi sedap, mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, harga yang terjangkau, mutu yang baik, dan kemudahan yang diperoleh.

Aspek-Aspek internal yang diteliti oleh Heryanto & Soekiman (2009) fokus pada fak-

tor yang mempengaruhi lingkungan kerja, sementara pada penelitian ini memaparkan faktor-faktor internal yang menyebabkan ibu rumah tangga bekerja, dimana faktor-faktor ini di antaranya kebutuhan fisiologi, keinginan untuk berkembang, rasa bangga, pengakuan diri, pemahaman akan pekerjaan, pekerjaan yang menantang, dan tanggung jawab.

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya potensi wanita dalam mendukung perekonomian keluarga. Potensi yang paling menarik untuk dikaji adalah potensi ibu rumah tangga ketika tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga di rumah melainkan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Istri dapat berperan sebagai mitra untuk suami dalam hal membantu untuk menambah penghasilan tanpa mengabaikan tugas utama sebagai seorang istri yang ikut berkiprah membantu keluarga keluar dari masalah keluarga (Sumiarti, 2008).

Berdasarkan observasi awal didapatkan bahwa sebagian besar keluarga-keluarga di Industri Watsawi Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Yogyakarta tergolong dalam keluarga prasejahtera, padahal lokasi kelurahan ini berada di tengah kota Yogyakarta. Hampir semua karyawan yang bekerja di Industri Watsawi merupakan ibu-ibu rumah tangga yang berdomisi di daerah ini.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah masih banyak ditemukan keluarga yang terkendala dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan belum diketahui secara pasti faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja di Industri Watsawi. Bertitik tolak dari permasalahan ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor internal yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja di Industri Watsawi dan upaya yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat pada umumnya dan khususnya kesejahteraan keluarga di Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Yogyakarta, dengan harapan akan diper-

oleh manfaat teoritik tentang gambaran mengapa ibu rumah tangga melakukan keputusan bekerja dan faktor utama yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja di Industri Watsawi Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Yogyakarta. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI, khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pemberian pelayanan pada bidang kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan yang layak bagi masyarakat.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian tesis dengan judul “Faktor-faktor Penentu Ibu Rumah Tangga Bekerja di Industri Watsawi di Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Yogyakarta”. Penelitian ini dilaksanakan dalam satu rentang waktu (*cross sectional*) melalui pengumpulan data pada bulan Maret sampai April 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* di Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan ibu rumah tangga yang bekerja di Industri Watsawi sebanyak 44 ibu rumah tangga. Populasi ini diobservasi secara langsung di Industri Watsawi. Jumlah populasi di bawah angka 100 menjadikan penelitian ini sebagai penelitian populasi. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tulisan dengan metode pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan angket atau kuesioner.

Variabel-variabel yang diperlukan dalam menentukan faktor-faktor internal pada penelitian ini meliputi kebutuhan fisiologi (butir 1-3), keinginan untuk berkembang (butir 4-6), rasa bangga (butir 7-9), pengakuan diri (butir 10 dan 12), pemahaman akan pekerjaan (butir 12-14), pekerjaan yang menantang (butir 15-17), dan tanggung jawab (butir 18-20). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran

tentang sifat (karakteristik) dari setiap variabel yang ada di dalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata, deviasi standar dan nilai minimum serta nilai maksimum dari setiap variabel. Hasil analisis data penelitian yang didasarkan pada jawaban 44 responden melalui kuesioner penelitian untuk masing-masing variabel penelitian akan diuraikan dengan statistik deskriptif. Kriteria penilaian responden terhadap item pertanyaan yang dilakukan dengan interval skor persepsi terendah 1, skor persepsi tertinggi 5, interval $(5-1) / 5 = 0,8$. Batasan persepsi adalah sangat tidak baik (1,00 – 1,80), tidak baik, (1,81 – 2,60), cukup baik (2,61 – 3,40), baik (3,41 – 4,20), dan sangat baik (4,21 – 5,00).

Uji validitas dilakukan dengan pendekatan korelasi *product moment* antar masing-masing item yang mengukur suatu variabel dengan skor total variabel tersebut. Kriteria yang digunakan adalah bila nilai koefisien korelasi (*r-hitung*) bernilai positif dan lebih besar dari *r-tabel*, berarti item dinyatakan valid. Dengan $N = 44$ dan $\alpha = 0,05$ (uji dua sisi) diperoleh nilai *r-tabel* sebesar 0,297. Hasil uji validitas variabel faktor internal dari 44 responden diperoleh nilai korelasi lebih besar dari 0,297, sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa item variabel faktor internal adalah valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Alpha Cronbach* dan hasil yang didapat untuk variabel pada faktor internal sebesar 0,821. Nilai *Alpha Cronbach* lebih dari 0,6 dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki reliabilitas yang baik. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Sistem pengolahan data dilakukan dengan *editing* data, *coding*, tabulasi, dan grafik. Kategori analisis data faktor internal didasarkan pada sangat tidak setuju (STS = skor 0), tidak setuju (TS = skor 1), netral (N = skor 2), setuju (S = skor 3), dan sangat setuju (SS = skor 4).

C. Faktor Pengaruh Ibu Rumah Tangga Bekerja di Industri Watsawi

1. Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden yang diamati adalah pendidikan, umur, jumlah anggota keluarga, jabatan, dan lama bekerja. Mayoritas responden berpendidikan terakhir adalah SD (36,4%), disusul SMP (31,8%), SMA (29,5%), dan D3 (2,3%). Umur responden berada pada rentang 41 – 50 tahun (27,3%), diikuti umur 51-60 tahun dan 61 – 70 tahun masing-masing sebanyak 25,0%, umur < 40 tahun (15,9%), dan > 70 tahun (6,8%). Dapat dikatakan bahwa mayoritas ibu rumah tangga yang bekerja di industri Watsawi berumur 41 – 50 tahun. Jumlah anggota keluarga sebanyak empat orang dengan persentase sebesar 36,4%, disusul tiga anggota keluarga (31,8%), 2 anggota keluarga (27,3%), dan satu orang dan lima orang anggota keluarga masing-masing sebesar 2,3%. Mayoritas responden memiliki jabatan pengguglung, (77,3%), jabatan memproduksi (15,9%), dan pengukus (6,8%). Lama bekerja responden terbanyak adalah 5 – 10 tahun (47,7%), < 5 tahun (29,5%), dan >10 tahun (22,7%).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang dialami ibu rumah tangga di antaranya sumber daya manusia yang rendah, faktor sosial ekonomi, umur, dan jumlah anggota keluarga. Analisis data memperlihatkan bahwa ibu rumah tangga berpendidikan rendah (SMA ke bawah sekitar 87%), berusia tua (di atas 40 tahun sekitar 84%), dan memiliki anggota keluarga yang banyak (> 3 orang sekitar 68%).

Tabel 1. Distribusi frekuensi karakteristik pekerja ibu rumah tangga di Industri Watsawi

No	Sub Indikator	Min	Maks	Rerata	Standar Deviasi	Kategori
1	Religius	3,33	5,00	4,272	0,444	Sangat baik
2	Jujur	2,67	5,00	3,969	0,464	Baik
3	Toleransi	2,00	5,00	4,174	0,505	Baik
4	Disiplin	3,33	5,00	4,030	0,320	Baik
5	Kerja keras	2,67	5,00	3,901	0,363	Baik
6	Kreatif	2,00	5,00	3,477	0,652	Baik
7	Mandiri	3,00	5,00	3,977	0,332	Baik
8	Demokratis	2,67	5,00	3,909	0,369	Baik

Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Menurut Muflikhati et al. (2010), kategori keluarga prasejahtera adalah rumah tangga yang memenuhi sembilan kriteria dari 14 kriteria yang ditetapkan oleh BPS menerima BLT.

Berdasarkan data yang diperoleh ditemukan sebagian besar (60%) dengan kondisi ekonomi keluarga prasejahtera, dengan demikian ibu rumah tangga ini termotivasi untuk berperan dalam membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di Industri Watsawi dengan tidak mengabaikan peran utama untuk mendidik anak, memberi perhatian kepada keluarga, meringankan beban suami dengan membagi waktu untuk bekerja, karena sebagian besar pekerjaan di industri ini dapat dikerjakan di rumah.

2. Karakteristik Pekerja Ibu Rumah Tangga di Industri Watsawi

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, hasil penilaian responden terhadap sub indikator pada faktor karakteristik ibu rumah tangga yang bekerja di Industri Watsawi dapat dilihat pada Tabel 1. Rata-rata skor pada sub indikator religius (4,272) termasuk kategori sangat baik, sementara skor pada sub indikator yang lain termasuk kategori baik.

Sebagian besar ibu rumah tangga yang bekerja di Industri Watsawi memiliki karakteristik religius. Karakteristik lainnya adalah toleransi, disiplin bekerja, mandiri, jujur, demokratis, kerja keras, dan kreatif. Karakteristik kreatif berhubungan erat dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh manusia. Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan daya kreativitas seseorang

dalam bekerja. Abdul & Andayani (2012) berpendapat bahwa karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Karakter dapat diartikan sebagai gambaran watak, tingkah laku baik didasarkan atas pengetahuan akan kebaikan, mencintai kebaikan yang diwujudkan baik secara eksplisit maupun implisit. Nilai karakteristik merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa yang terdiri dari 18 nilai karakter berdasarkan pedoman pendidikan karakter Kemendiknas (Fathurrohman *et al.*, 2013), di antaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

3. Faktor Internal Ibu Rumah Tangga Bekerja

Hasil analisis deskripsi gambaran umum distribusi responden berdasarkan faktor internal yang mempengaruhi ibu rumah tangga untuk bekerja di Industri Watsawi dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil statistik deskriptif ditunjukkan bahwa hasil penilaian responden terhadap sub indikator kebutuhan fisiologi (4,212) masuk dalam kategori sangat baik, sementara sub indikator pengakuan diri (3,034) masuk kategori cukup baik. Selain kedua sub indikator ini, hasil penilaian responden masuk kategori baik.

Tabel 2. Distribusi frekuensi faktor internal ibu rumah tangga

No	Sub indikator	Min	Maks	Rerata	Standar deviasi	Kategori
1	Kebutuhan Fisiologi	1,67	5,00	4,212	0,552	Sangat Baik
2	Keinginan untuk berkembang	2,33	5,00	3,954	0,480	Baik
3	Rasa bangga	2,67	5,00	4,090	0,499	Baik
4	Pengakuan diri	2,00	4,50	3,034	0,613	Cukup baik
5	Pemahaman akan pekerjaan	3,00	5,00	4,090	0,421	Baik
6	Pekerjaan yang menantang	2,67	5,00	4,037	0,375	Baik
7	Tanggung jawab	2,67	5,00	3,840	0,451	Baik

Sumber: (Hasil Analisis,2018)

Berdasarkan deskripsi indikator-indikator pada Tabel 2, maka dapat dilakukan proses pengelolaan data untuk menghitung distribusi persentase setiap kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Rerata dan klasifikasi masing-masing pertanyaan pada setiap sub indikator disajikan pada Tabel 3

Tanggapan responden tertinggi terlihat pada sub indikator kebutuhan fisiologi. Sebanyak 52,3% responden menyatakan sangat setuju (SS) pada sub indikator ini, sedangkan indikator

keinginan untuk kerkembang sebanyak 72,7% menyatakan setuju (S), sub indikator rasa bangga sebanyak 61,4% menyatakan setuju (S), sub indikator pengakuan diri sebanyak 36,4% menyatakan netral (N), sub indikator pemahaman akan kerja sebanyak 61,4% menyatakan setuju (S), sub indikator pekerjaan yang menantang sebanyak 77,3% menyatakan setuju (S), dan sub indikator tanggung jawab sebanyak 70,5% menyatakan setuju (S).

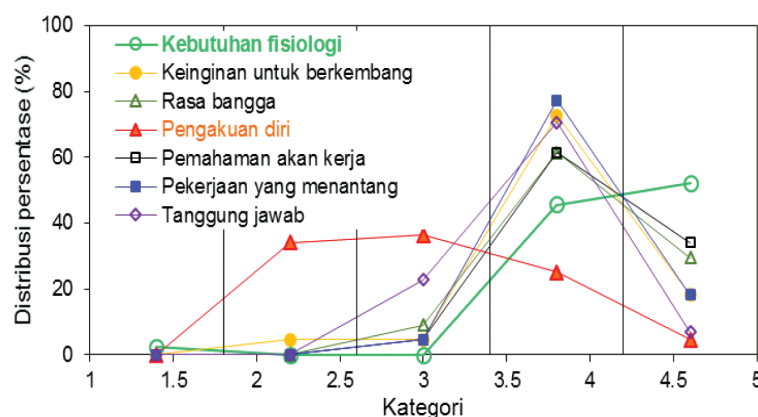
Tabel 3. Distribusi persentase setiap sub indikator pada faktor-faktor internal

Interval	Sub Indikator							
	Kategori	Kebutuhan fisiologi (%)	Keinginan untuk kerkembang (%)	Rasa bangga (%)	Pengakuan diri (%)	Pemahaman akan kerja (%)	Pekerjaan yang menantang (%)	Tanggung jawab (%)
1,00 – 1,80	STS	2,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,80 – 2,60	TS	0,00	4,55	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0
2,60 – 3,40	N	0,00	4,55	9,09	36,4	4,55	4,55	22,7
3,40 – 4,20	S	45,5	72,7	61,4	25,0	61,4	77,3	70,5
4,20 – 5,00	SS	52,3	18,2	29,5	4,55	34,1	18,2	6,82

Sumber: (Hasil Analisis,2018)

Distribusi persentase pada masing-masing sub indikator dapat digambarkan pada Gambar 1. Dari ketujuh faktor-faktor yang diteliti terlihat bahwa ada lima sub indikator yang memberikan kecenderungan tanggapan yang hampir sama (mayoritas setuju) dari semua responden di antaranya keinginan untuk berkembang, rasa bangga, pemahaman akan kerja, pekerjaan yang menantang, dan tanggung jawab. Sub

indikator kebutuhan fisiologi dan pengakuan diri memperlihatkan kecenderungan distribusi persentase yang berbeda dengan yang lainnya, dimana untuk sub indikator kebutuhan fisiologi persentase setuju dan sangat setuju hampir sama, sementara pada sub indikator pengakuan diri terlihat bahwa tanggapan tidak setuju dan netral hampir sama.



Gambar 1. Distribusi persentase masing-masing sub indikator pada faktor internal yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan faktor internal dalam diri seseorang seperti memberikan *reward* atau penghargaan kepada karyawan yang memberikan kinerja optimal dan di atas standar perusahaan, memberikan promosi jabatan kepada karyawan berprestasi, serta memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan kepada karyawan yang berpotensi, dan sebagainya (Christin & Mukzam, 2017).

Faktor utama yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja di Industri Watsawi adalah faktor kebutuhan fisiologi, sedangkan faktor tambahan adalah faktor pemahaman akan pekerjaan, rasa bangga, pekerjaan yang menantang, keinginan untuk berkembang, dan faktor tanggung jawab. Sementara faktor pengakuan diri tidaklah merupakan faktor utama yang menyebabkan ibu rumah tangga harus bekerja di Industri Watsawi. Menurut Maslow (2010), kebutuhan fisiologi termasuk di dalamnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Faktor yang timbul dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi hasil pekerjaan bersifat kondisi jasmani (fisiologi). Apabila seorang tidak mengetahui tanda-tanda yang timbul dari dalam dirinya, maka akan timbul kesulitan pada saat melakukan aktivitas bekerja.

Kebutuhan fisiologi sebagai kebutuhan dalam mempertahankan hidup secara fisik merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki setiap individu. Jumlah anggota keluarga mempengaruhi peningkatan kebutuhan fisik keluarga. Kebutuhan keluarga yang terpenuhi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Ibu rumah tangga yang bekerja dapat meningkatkan pendapatan keluarga, walaupun tingkat kesejahteraan ini tidak selalu dilihat dari tingkat pendapatan, namun pendapatan akan berpengaruh besar terhadap penetapan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan keluarga maka kesejahteraan keluarga semakin meningkat (Silitonga et al., 2018). Seseorang dengan pendapatan relatif tinggi akan merasa sejahtera/puas dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kehidupan sosial bermasyarakat.

Modal sosial memiliki implikasi penting terhadap kesejahteraan sosial, khususnya kesejahteraan keluarga. Ibu rumah tangga yang masih bekerja di Industri Watsawi hidup di kampus dalam kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial yang mereka miliki berimplikasi pada kesejahteraan keluarga. Ibu rumah tangga yang bekerja di Industri Watsawi merupakan salah satu kelompok ibu rumah tangga yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarganya.

D. Penutup

Kesimpulan: Pendidikan rendah, umur tua, jumlah anggota keluarga banyak tidak menghalangi niat ibu rumah tangga untuk dapat bekerja pada Industri Watsawi. Hal ini juga tidak menjadi persyaratan utama untuk dapat bekerja di industri ini, melainkan aspek karakter menjadi pertimbangan tersendiri. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga yang bekerja di industri ini memiliki karakter yang kuat pada bidang religius, toleransi, disiplin, mandiri, jujur, dan kerja keras. Tingkat kesejahteraan dan pendapatan keluarga yang rendah menjadi pemicu bagi ibu rumah tangga untuk bekerja di Industri Watsawi, dimana sebagian besar dari ibu rumah tangga ini masih tergolong ke dalam keluarga prasejahtera. Hal ini dibuktikan dari faktor kebutuhan fisiologi menjadi faktor utama yang menyebabkan ibu rumah tangga bekerja untuk menambah pendapatan keluarga pada Industri Watsawi. Selain faktor utama ini, faktor-faktor lain yang menyebabkan ibu rumah tangga bekerja adalah pemahaman akan pekerjaan, rasa bangga, pekerjaan yang menantang, keinginan untuk berkembang, dan faktor tanggung jawab.

Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis karakteristik menunjukkan bahwa ibu rumah tangga yang bekerja di Industri Watsawi memiliki tingkat kreativitas yang rendah, oleh karena itu disarankan untuk dapat meningkatkan kreativitas pekerja melalui pendidikan informal dan nonformal. Industri rumah tangga seperti ini juga perlu dikembangkan, sehingga peran utama dari ibu rumah tangga untuk mengurus rumah tangga tidak terabaikan, melainkan mereka dapat bekerja sebagian di rumah dan sekaligus dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Untuk mengetahui pengaruh ibu rumah tangga yang bekerja terhadap peningkatan sosial ekonomi keluarga, peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan keluarga, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan. Termasuk peran ibu rumah tangga yang bekerja untuk mendidik anak, memberi perhatian kepada keluarga, dan meringankan beban suami.

Ucapan Terima Kasih

1. Pimpinan Industri Watsawi di Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta atas izin dalam melaksanakan penelitian di Pabrik Tempura Industri Watsawi Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

Pustaka Acuan

- Abdul, M., & Andayani, D. (2012). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Alaimo, K., Olsan, C.M., & Frongillo, E.A. (2001). Low Family Income and Food Insufficiency in Relation to Overweight in US Children. *Arch Pediatr Adolesc Med*, 155, 1161-1167.
- Christin, J. & Mukzam, D. (2017). Pengaruh Motivasi Internal dan Eksternal terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Indomarco Prismatama Distribution Centre Bogor). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 50(5), 108-112.
- Elmanora, Hastuti, D., dan Muflikhati, I. (2017). Lingkungan Keluarga Sebagai Sumber Stimulasi Utama untuk Perkembangan Kognitif Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(2), 143-156.
- Ermawati, S. (2016). Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama*, 2(2), 59-69.
- Fathurrohman, P., Suryana, A.A., & Fatriany, F. (2013). *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.
- Heryanto & Soekiman. (2009, Mei). *Motivasi Kerja sebagai Dorongan Internal dan Eksternal pada Perusahaan Jasa Konstruksi*. Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil - 3 (Konteks 3), Jakarta.
- Izumi, M. & Gullon-Rivera, A. L. (2018). Family Resilience Among Sojourning Japanese Mothers: Links to Marital Satisfaction and Children's Behavioral Adjustment. *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 46(3), 282-296.
- Maslow. (2010). *Motivation and Personality*. Jakarta: Rajawali
- Mencarini, L. & Vignoli, D. (2018). Employed Women and Marital Union Stability: It Helps When Men Help. *Journal of Family Issues*, 39(5), 1348-1373.
- Muflikhati, I., Hartoyo, Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H. (2010). Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Barat. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 3(1), 1-10.
- Mulyati, Martiatuti, K., & Rasha. (2018). Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Kualitas Hidup

- dan Kesejahteraan Lansia. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 5(1), 1-8.
- Putra, R. A. R. S., Ariyadi, B., Kurniawati, N., & Haryadi, F. T. (2017). Pengaruh Modal Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Peternak: Studi Kasus pada Kelompok Peternak Ayam Kampung Ngudi Mulyo, Gunungkidul. *Buletin Peternakan*, 41(3), 349-354.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 53-66.
- Rusnani. (2013). Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kec. Kalianget. *Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi*, 3(2), 83-100.
- Sebataraja, L. R., Oenzil, F. & Asterina. (2014). Hubungan Status Gizi dengan Status Ekonomi Keluarga Murid Sekolah Dasar di Daerah Pusat dan Pinggiran Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(2), 182-187.
- Siahaan, S. B. F., Sumarwan, U., dan Nurrochmat, D. R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Menggunakan Kecap Lokal. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(2), 125-132.
- Silitonga, M., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2018). Modal Sosial, Coping Ekonomi, Gejala Stres Suami dan Kesejahteraan Subjektif Keluarga Pada Keluarga TKW. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 5(1), 20-30.
- Sumiarti, E. (2008). Wirausaha Ibu Rumah Tangga untuk Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal R & B*, 3(2), 182-191.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Treas, J. & Tai, T. (2012). How Couples Manage the Household: Work and Power in Cross-National Perspective. *Journal of Family Issues*, 33(8), 1088-1116.
- Yao, R & Lei, S. (2018). Source of Information and Projected Household Investment Portfolio Performance. *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 46(3), 219-237.
- Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-11.
- Wijanarko, J. (2018). Mendidik Anak dengan Hati. Keluarga Indonesia Bahagia, Jakarta.
- Udiati, T. & Mutiwidayanti, S. Y. (2017). Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16(3), 265-280.

**Pantang Mengemis Demi Sejahterakan Keluarga
Implementasi Program Desaku Menanti di Pasuruan
Abstinence Begging for The Sake of Family Prosperity
The Implementation of Program Desaku Menanti**

Tyas Eko Raharjo F.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta. Tlp. (0274) 377265

HP. 08175455989. E-mail tyasekoraharjo@gmail.com

diterima 20 Maret 2018, diperbaiki 26 Maret 2018, disetujui 12 Agustus 2018

Abstract

This study aimed to determine the independence of bums and beggars through fulfilling family's needs the needs both physical, psychological, and social. A qualitative descriptive and qualitative approach to uncover Gepeng's independence in meeting family needs. The research was conducted in Pasuruan District with the location setting of the village settlement awaiting Prodo Village Winongan District. The data source was determined purposively, the head of the beneficiary family of my village awaiting who has gained skills guidance. Data collection was conducted through interviews with guidelines, observation, document review and bibliography, with qualitative data analysis. The results show that beneficiary families have been able to fulfill family needs. Efforts to fulfill the needs by doing basic work and being worshiped with the ownership of side jobs by family members. The needs of the family include physical, psychological, and social needs. It is recommended that the Ministry of Social Affairs synergize with the local government which is the location of "Desaku Menanti" monitoring and guidance on a regular basis. In relation to this research, East Java Provincial Social Service and Pasuruan District Social Service become central in conducting guidance to beneficiary families of ex Gepeng

Keywords: Needs fulfillment; Homeless and Beggar; My village is waiting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesejahteraan gelandangan dan pengemis penghuni pemukiman desaku menanti melalui pemenuhan kebutuhan keluarga, baik fisik, psikis, dan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengungkap kesejahteraan Gepeng. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dengan lokasi pemukiman desaku menanti Desa Prodo Kecamatan Winongan. Sumber data ditetapkan secara *purposive*, yaitu kepala keluarga penerima manfaat desaku menanti yang telah mendapatkan bimbingan keterampilan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pedoman, observasi, telaah dokumen dan kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis, secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keluarga penerima manfaat telah sejahtera yang dibuktikan dengan mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dengan melakukan pekerjaan pokok dan ditambah pekerjaan sampingan. Keterpenuhan kebutuhan keluarga tersebut meliputi kebutuhan fisik, psikis, dan kebutuhan sosial. Direkomendasikan agar Kementerian Sosial bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi lokasi program desaku menanti untuk melakukan monitoring dan bimbingan secara berkala. Berkait dengan penelitian ini maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menjadi sentral bimbingan keluarga penerima manfaat eks Gepeng.

Kata Kunci: Pemenuhan kebutuhan; Gelandangan dan Pengemis; Desaku menanti.

A. Pendahuluan

Kemajuan pembangunan yang semakin pesat di perkotaan menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan penduduk daerah sekitarnya.

Dampak yang terjadi berupa positif dan negatif, yakni pembangunan di kota mengundang penduduk desa mencari kerja di kota dan menjadi negatif apabila pendatang pencari kerja tersebut

tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat mendukung pemenuhan persyaratan kerja. Pembangunan yang pesat diperkotaan menjadi daya tarik penduduk desa untuk mengadu nasib pindah ke kota walaupun tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan. Timbul arus urbanisasi penduduk desa kota memunculkan gelandangan dan pengemis, karena dengan ketiadaan keterampilan membuat para urban tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Ketidadaan kepemilikan keterampilan dirasa membuat kehidupan yang memprihatinkan dengan tidak memiliki pekerjaan layak.

Berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk pemecahan masalah sosial gelandangan dan pengemis (gepeng) terutama untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Demikian juga berbagai penelitian telah dilakukan demi menemukan model yang tepat dalam merehabilitasi gepeng supaya menjadi mandiri dan memiliki pekerjaan layak dan mulia. Kenyataan belum semua program dapat berjalan dengan baik dan masih mengalami hambatan di lapangan.

Gepeng menjadi permasalahan serius untuk diantisipasi khususnya di kota besar karena mereka menjadi pemandangan yang mengganggu lingkungan. Munculnya gepeng berawal dari urbanisasi penduduk tidak mampu dan tidak berdaya dalam menjalani kehidupan di kota. Pada umumnya mereka melakukan urbanisasi untuk mengubah nasib dengan mencari pekerjaan yang layak demi kesejahteraan keluarganya. Tidak mampuan dalam pengetahuan dan keterampilan maka tidak dapat memperoleh pekerjaan sesuai harapan, dan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Oleh karena itu Gepeng merupakan pilihan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kehidupan keluarga.

Kementerian Sosial menjadikan program rehabilitasi gepeng sebagai program unggulan dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Beberapa program yang diluncurkan Kementerian Sosial dalam penanganan gepeng, diantaranya adalah sistem rehabilitasi

sosial berbasis panti dan non panti atau Lingkungan Pondok Sosial. Program penanganan gepeng tersebut dirasa masih belum menciptakan kemandirian gepeng secara optimal. Hal ini terbukti masih banyak gepeng yang kembali melakukan kegiatan sebagai pengemis di kota.

Penanganan masalah gepeng memerlukan tindakan secara serius dan terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah setempat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis, serta Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Gelandangan Dan Pengemis. Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mengembangkan model rehabilitasi sosial gepeng secara terpadu berbasis desa. Keterpaduan program tersebut diwujudkan dengan mengikutsertakan beberapa kelembagaan terkait untuk merehabilitasi sosial gepeng.

Berdasar permasalahan tersebut pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana kesejahteraan keluarga gepeng setelah mendapat rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti, dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesejahteraan keluarga gepeng dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, baik fisik, psikis, dan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Kementerian Sosial RI Cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial terkait dengan penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pengkajian dari Implementasi Program Desaku Menanti dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Penelitian kualitatif ini untuk mengungkap tentang makna subjektif secara mendalam terkait dengan gejala sosial yang diamati dari sisi pelaku (subjek), termasuk mengungkap proses dan dinamika dari gejala sosial bersangkutan (Noeng Muhajir, 2002),

Sementara menurut Suharsimi Arikunto (2001: 309), penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis permasalahan tertentu, tetapi mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, suatu gejala atau keadaan pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini untuk mengetahui kemandirian gelandangan dan pengemis dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, meliputi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Penerapan pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai informasi, fakta, serta fenomena berkaitan dengan kemandirian pengemis dan gelandangan yang menjadi penghuni desaku menanti.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut menjadi tempat pemukiman para gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti. Dengan demikian peneliti mudah untuk mendapatkan informasi secara detail dan dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yakni penghuni pemukiman Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Data primer diperoleh dari informan, dengan teknik pengumpulan data wawancara secara baku (*standardized interview*), yaitu wawancara yang dilakukan menggunakan panduan untuk menggali informasi berkaitan dengan kesejahteraan gepeng dalam pemenuhan kebutuhan keluarga pascarehabilitasi sosial dari program desaku menanti. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teknik lain, yaitu observasi.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kehidupan gepeng selama tinggal di pemukiman program desaku menanti. Untuk itu peneliti mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian yang menjadi data dalam menganalisis. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini, yakni pengamatan berdasar pada pengalaman secara

langsung atas objek yang diteliti. Kegunaan teknik ini, peneliti dapat melihat dan mencatat mengenai perilaku atau peristiwa yang terjadi, sehingga memungkinkan peneliti memahami berbagai situasi yang ada. Pengamatan merupakan cara terbaik untuk mengecek kebenaran suatu data, sehingga dalam kasus tertentu, apabila komunikasi yang lain tidak memungkinkan maka pengamatan menjadi alat yang dapat dimanfaatkan peneliti. Tentu saja dalam penelitian ini dibutuhkan juga data sekunder untuk melengkapi data lainnya. Data tersebut diperoleh dari buku, laporan, jurnal *website*, dan sumber lain (telaah dokumen).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data pada dasarnya adalah proses mengorganisasikan dan mereduksi data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesainya pengumpulan data.

C. Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis

Gepeng adalah masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus karena memiliki persoalan yang kompleks bersifat pada psikis mental juga memiliki permasalahan patologis yakni tingkah lakunya bertentangan dengan norma kebaikan di masyarakat (Kartini Kartono, 2011). Timbulnya gepeng berawal dari kemiskinan penduduk sebagai dampak adanya ketimpangan sosial terkait dengan perkembangan ekonomi yang biasa terjadi di wilayah perkotaan (Irsan Suani, 2015). Keberadaannya dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan umum yang cenderung lebih melanggar normayang ada di lingkungan masyarakat.

Berdasar permasalahan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bermitra dengan Kementerian Sosial RI dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Sahabat Harapan Mandiri Sejahtera (LKS SAHAJA) melaksanakan kegiatan pen-

anganan masalah gepeng dengan program desaku menanti yang mulai dirancang pada tahun 2012. Program ini bertujuan mengembalikan gepeng yang hidup menggelandang di kota untuk kembali ke desa, dengan maksud memulai hidup baru dan berusaha di desa. Sejak Tahun 2011 Pemerintah provinsi Jawa Timur memprioritaskan program percepatan penanganan lima PMKS yaitu anak jalanan, WTS, gelandangan, pengemis dan gelandangan psikotik.

Lokasi pemukiman gepeng dengan program desaku menanti terletak di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan pusat pemerintahan berada di Kota Bangil. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menangani gepeng, salah satunya merehabilitasi sosial gepeng secara terpadu berbasis desa dengan program desaku menanti. Program desaku menanti merupakan program yang diprakarsai Kementerian Sosial RI dilaksanakan Lembaga Kesejahteraan Sosial salah satunya di Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan pihak LKS bagi gepeng calon penghuni rumah desaku menanti melalui pembekalan berupa bimbingan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Bimbingan dan keterampilan dilakukan selama tiga bulan, demikian juga para gepeng dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan rumah sehingga dengan keterlibatan diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki. Para gepeng penghuni desaku menanti juga mendapatkan bantuan stimulan untuk mengembangkan usaha hasil bimbingan keterampilan yang telah diikuti.

Pada tahun 2014, Desaku Menanti Desa Prodo dihuni sebanyak 35 kepala keluarga dan sebanyak 136 jiwa. Kemudian tahun 2015 bertambah menjadi 50 kepala keluarga, namun pada tahun 2016 mengalami pengurangan penghuni lima keluarga menjadi 45 kepala keluarga. Jumlah keluarga tersebut berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Madiun, dan Pasuruan.

D. Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat

Mendengar istilah gepeng sering kali dihubungkan dengan keramaian kota besar. Anggapan yang sering ditemukan, bahwa keramaian kota besar menimbulkan tumbuh dan berkembangnya gepeng. Permasalahan yang terjadi sering dikarenakan adanya kesenjangan antara desa dengan kota. Keramaian kota dengan berbagai fasilitas menginformasikan penduduk desa untuk pindah ke kota demi mendapatkan pekerjaan. Disayangkan kepindahan penduduk desa tersebut tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan sebagai syarat mencari kerja. Dengan demikian mereka menjadi pengangguran di kota, sementara pemenuhan kebutuhan hidup harus segera terpenuhi, maka menjadi gepeng adalah pilihannya.

Gelandangan adalah orang yang hidupnya dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan layak pada umumnya. Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dengan mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di depan umum dengan berbagai cara dan mengharapkan belas kasihan orang lain (PP. No.31 Tahun 1980). Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan menjadi tempat rehabilitasi gepeng dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 50 kepala keluarga yang berhasil dikumpulkan dan direhabilitasi serta diberdayakan dengan pemberian bimbingan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Jumlah 50 tersebut terdapat lima kepala keluarga yang tidak dapat mengikuti proses pemukiman dengan baik dan mereka menyatakan pergi dari rumah tinggalnya, sehingga sampai saat ini penghuni yang menetap tinggal di pemukiman desaku menanti sebanyak 45 kepala keluarga. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program “Desaku Menanti” di Kabupaten Pasuruan mendapatkan jatah hidup (Jadup) sebanyak Rp 600 ribu per jiwa selama

tiga bulan. Kegiatan program yang berlokasi di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan awalnya pada tahun 2014 memberikan pelayanan bagi 35 KK dan 136 jiwa yang berasal dari Surabaya, Malang, Madiun dan Pasuruan, Lumajang, Nganjuk. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Jatim, Yusmanu (Jumat, 4-5-2017) mengatakan, dalam program ini setiap KK mendapatkan sebidang tanah seluas 100 m² dan berdiri bangunan seluas 4 x 6 m dengan fasilitas air, listrik, jalan perumahan, musholla, ruang pertemuan dengan total nilai Rp 30 juta per KK. Dana tersebut masuk ke rekening masing masing KK dan mereka mengerjakan sendiri rumahnya dengan dibantu beberapa tenaga tukang dari lingkungan desa sekitar. Disamping bantuan tersebut mereka juga mendapatkan bantuan UEP (Usaha Ekonomis Produktif) sesuai dengan minat dan keterampilan masing masing warga binaan sosial dan sesuai dengan kemampuan masing-masing penerima manfaat sesuai minat usahanya. "Setiap KK juga mendapatkan bantuan peralatan dapur dari Kementerian Sosial RI dan peralatan rumah tangga dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya pada tahun 2015 bertambah penghuni Desaku Menanti sebanyak 15 KK, sehingga keseluruhan penghuni warga Desaku Menanti menjadi 50 KK. Namun dengan berjalannya waktu dari jumlah tersebut mulai berkurang 5 KK pada tahun 2016 sampai pada saat peneliti melakukan pengumpulan data dan pengamatan ternyata jumlah warga binaan sosial yang masih aktif tinggal di Desaku Menanti sebanyak 45 KK. PMKS khususnya gelandangan dan pengemis, merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan khusus, karena permasalahannya lebih bersifat psikis, dan mental, permasalahan gelandangan pengemis memiliki permasalahan patologis. Artinya keberadaannya dianggap oleh masyarakat mengganggu ketertiban, keamanan umum serta cenderung melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

Permasalahan gelandangan dan pengemis bermuara dari permasalahan kemiskinan dan sebagai dampak dari ketimpangan sosial dari pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya kecenderungan peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan. Implikasi permasalahan gelandangan dan pengemis cukup kompleks, karena tidak hanya dalam aspek sosial ekonomi saja tetapi juga memberikan dampak pada ketertiban dan keamanan di daerah terutama di perkotaan.

Kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari kepemilikan pekerjaan, jumlah penghasilan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Beberapa aspek dalam kebutuhan keluarga yakni kebutuhan fisik, psikis, sosial, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Oleh karena itu apabila seseorang atau keluarga dapat melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut maka keluarga akan dianggap sejahtera, sesuai pendapat Edi Suharto, (1997) bahwa pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan keadilan.

Berdasar pengamatan dari segi umur ternyata para gepeng yang berhasil diberdayakan dan direhabilitasi termasuk dalam kategori usia produktif. Lebih jelasnya dapat disimak pada tabel 1.

Tabel 1. Umur Kepala Keluarga Penerima Manfaat

No	Umur	F	Persen
1	19 - 35	15	33,33
2	36 - 55	20	44,45
3	>56	10	22,22
Total		45	100

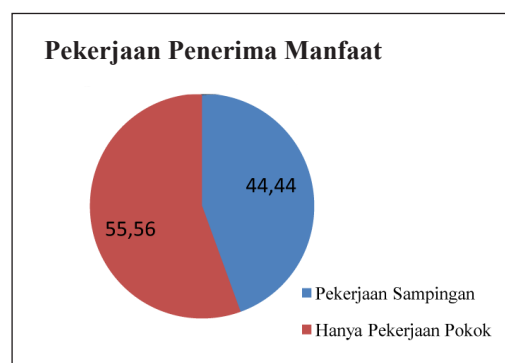
Sumber : data primer, 2017

Data pada tabel 1 menunjukkan, bahwa gepeng sebagai penerima manfaat program desaku menanti sebagian besar masih berusia produktif yakni diantara usia 19 sampai dengan 55 tahun sebanyak 35 kepala keluarga atau 77,78 persen. Umur termuda pada gepeng penerima manfaat berumur antara 19 sampai

dengan 35 tahun sebanyak 15 orang (33,33 persen) dan usia tertua 56 tahun ke atas sebanyak 10 orang (22,22 persen). Meskipun usia penerima manfaat masih produktif, tetapi pada umumnya penghasilan mereka rendah. Hal ini dikarenakan belum secara optimal dalam melakukan pekerjaan dan usaha. Oleh karena itu dengan usia yang masih produktif mereka berupaya menggerakkan anggota keluarganya untuk dapat melakukan pekerjaan sampingan. Usia produktif menjadi modal mereka dalam semangat berusaha demi kesejahteraan keluarga.

Pendidikan gepeng sebagai warga binaan sosial di desaku menanti sebagian besar mereka tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yakni sebanyak 66,67 persen. Dalam penerapannya, pendidikan yang mereka miliki tidak dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Kota Surabaya, karena pendidikan tersebut tidak didukung dengan keterampilan yang memadai. Keterampilan menjadi penting dalam kaitan dengan perolehan pekerjaan seseorang. Pada dasarnya dengan pendidikan rendah mereka mampu meninggalkan pekerjaan lama sebagai pengemis dan melakukan pekerjaan sebagai wirausaha setelah mendapatkan bimbingan dan keterampilan. Mereka telah mengalami perubahan dalam berpikir, hal ini menunjukkan adanya kemajuan, bahwa mereka tinggal di lingkungan Desaku Menanti Margo Utomo (di Desa Prodo) merupakan proses terjadinya perubahan dalam mengentaskan masalah gepeng. Proses tersebut diperoleh melalui bimbingan dan keterampilan yang dilakukan pemerintah terkait. Bimbingan yang diperoleh memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan selama menjadi penghuni Desaku Menanti. Sebagaimana pendapat Rizky Dwitanto Putro, (2015) meskipun mereka berpendidikan rendah tetapi semangat untuk berubah meninggalkan pekerjaan lama sebagai gepeng menjadi modal utama dalam mensejahterakan keluarga

Mereka tidak mau lagi untuk mengemis dan memilih bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki pada saat mengikuti bimbingan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki membangkitkan semangat mereka untuk bekerja sekuat tenaga demi sejahteraan keluarga di kampung desaku menanti. Berikut disajikan data kepemilikan pekerjaan para penerima manfaat setelah mengikuti bimbingan keterampilan.



Data pada diagram di atas menunjukkan, bahwa para penerima manfaat seluruhnya telah memiliki pekerjaan pokok dan sebanyak 44,44 persen memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan yang ditekuni merupakan hasil dari bimbingan sosial dan keterampilan yang pernah diikuti di kampung desaku menanti. Disamping menekuni pekerjaan pokok, mereka juga memiliki pekerjaan sampingan yang dikelola oleh istri atau anggota keluarga lain yang tinggal di rumah. Pekerjaan sampingan merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah dengan melakukan kegiatan rutinitas keluarga, seperti menjual nasi pecel, membuat peyek kacang, membuka warung gorengan, *lotheek*, dan *handy-crafts* atau kerajinan tangan.

Kepemilikan pekerjaan dapat dimaknai bahwa penerima manfaat telah mengalami perubahan cara berpikir yang semula hanya mengemis dan menggelandang kini menjadi wirausaha. Seluruh penghuni Margo Utomo mengaku *kerasan* tinggal di lingkungan Margo Utomo terlebih karena sebagian besar telah mendapatkan registrasi identitas yang jelas. Berdasar hasil wawancara mereka mengaku

telah merasakan hidup tenang, nyaman tinggal di lingkungan Desaku Menanti Margo Utomo mendapat rumah dan pekerjaan yang layak. Penghasilan yang diperoleh dapat disimak pada sajian tabel 3.

Tabel 3. Penghasilan Keluarga Penerima Manfaat

No	Penghasilan (Rp)	f	Persen
1	501.000 – 1.000.000	6	13,33
2	1.001.000 – 1.500.000	25	55,55
3	1.501.000 – 2.000.000	8	17,77
4	2.001.000 – 3.000.000	6	13,33
5	>3.001.000	-	-
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Tabel 3 menunjukkan, bahwa seluruh keluarga penerima manfaat telah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan wirausaha. Penghasilan tersebut murni dari jerih payah mereka dalam melakukan pekerjaan sebagai wirausaha dan penjual jasa sesuai keterampilan yang dimiliki. Sajian data pada tabel 3 memberikan makna, bahwa penghasilan yang diperoleh dapat dikatakan layak dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan beban tanggungan keluarga. Sebanyak 45 keluarga penerima manfaat dengan penghasilan sebagian besar antara Rp. 1.001.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- sebanyak 39 keluarga (86,67 persen) yang artinya keluarga penerima manfaat dapat menggunakan keterampilan yang didapat pada saat bimbingan sosial dan keterampilan.

Keluarga nyaman tenteram tinggal bersama keluarga. Tidak semua Gepeng malas bekerja dan pasrah pada keadaan. Mereka menjadi gepeng karena kesulitan mendapatkan pekerjaan dan kemiskinan yang dialami. Mereka memiliki etos kerja yang tinggi untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga dengan semangat tidak mengenal menyerah terlihat pada pekerjaan yang ditekuni sebagai tukang bangunan dan sebagian anggota keluarga masih melakukan pekerjaan sampingan dengan usaha warung nasi pecel. Pada pagi sampai sore hari sebagian mereka lakukan pekerjaan sebagai tukang

bangunan selanjutnya pada malam harinya membantu keluarga menyiapkan barang usaha warung nasi pecel dan makanan kecil lainnya. Aktivitas tersebut menjadi rutinitas demi memperoleh penghasilan keluarga. Dari penghasilan tersebut mereka mengaku mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Keterpenuhan kebutuhan keluarga akan berpengaruh pada beban tanggungan keluarga. Banyaknya beban tanggungan keluarga dapat disimak pada sajian data pada tabel 4.

Tabel 4. Tanggungan Keluarga Penerima Manfaat

No	Tanggungan	f	Persen
1	2 - 3 orang	16	25,55
2	4 - 5 orang	22	48,88
3	6 - 7 orang	7	15,55
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Data pada tabel 4 menunjukkan, bahwa beban penerima manfaat sebagian besar dua sampai dengan lima orang yakni sebanyak 38 keluarga (84,44 persen). Sekitar tujuh keluarga (15,55 persen) memiliki tanggungan keluarga sebanyak enam sampai tujuh orang. Data pada tabel 4 dapat dimaknai, bahwa jumlah tanggungan penerima manfaat tidak menjadi masalah bagi mereka karena telah memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan sebagaimana pada sajian data pada tabel 3. Penghasilannya telah mencukupi dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan anak. Demikian juga pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sudah terdapat beberapa keluarga yang menambah ruang untuk kamar tidur. Renovasi bangunan tempat tinggal dengan menambah kamar ternyata telah disesuaikan dengan banyaknya beban keluarga penerima manfaat, sehingga meskipun tanggungan keluarga banyak dapat terpenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu keluarga yang memiliki beban tanggungan antara empat sampai dengan tujuh orang dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya

Kebutuhan keluarga yang semestinya harus terpenuhi dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Pemenuhan kebutuhan fisik mencakup pada terpenuhinya tempat tinggal, makan, pakaian, dan kesehatan (Edi Suharto, 1997) Terpenuhinya kebutuhan fisik dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, makan, pakaian, dan kebutuhan kesehatan pada keluarga penerima manfaat. Pemenuhan kebutuhan berdasar pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sebenarnya semua keluarga telah terpenuhi kebutuhannya. Namun keterpenuhan tempat tinggal perlu dilihat kembali terkait dengan penyediaan ruangan pada tempat tinggal dengan jumlah orang yang menjadi penghuni rumah. Terkait pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dapat disimak pada tabel 5.

Tabel 5. Kebutuhan Tempat Tinggal Keluarga Penerima Manfaat

No	Kebutuhan Ruangan	f	Persen
1	Kamar tidur sesuai kebutuhan tanggungan	39	86,67
2	Kamar tidur kurang sesuai kebutuhan	4	8,89
3	Kamar tidur belum terpenuhi	2	4,44
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Data pada tabel 5 menunjukkan, bahwa pemenuhan kebutuhan fisik pada aspek pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan ketersediaan ruangan ternyata sebagian besar telah tercapai. Sebanyak 39 keluarga atau 86,67 persen telah terpenuhi kebutuhan penyediaan ruang tidur bagi anggota keluarga. Masih terdapat empat keluarga atau 8,89 persen yang mengaku ketersediaan ruang tidur kurang sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga dan dua keluarga 4,44 persen mengaku belum terpenuhi. Hasil observasi menunjukkan, bahwa keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan ruang tidur bagi keluarga ternyata mereka sudah mulai melakukan renovasi rumahnya dengan menambah kamar tidur. Mereka telah mampu secara mandiri da-

lam mengusahakan penambahan ruang tidur, karena mereka bisa menjadi tukang sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tukang.

Kebutuhan makan merupakan suatu kebutuhan individu yang mutlak untuk dipenuhi. Frekuensi makan bagi setiap orang berbeda karena faktor seperti usia, kebutuhan asupan gizi, dan kebiasaan. Menurut ilmu kesehatan khususnya ilmu gizi, makanan yang memenuhi syarat kesehatan adalah dengan komponen menu empat sehat lima sempurna (Baliwati, dkk, 2004). Pada tabel 6 disajikan frekuensi kebutuhan makan per hari bagi keluarga penerima manfaat responden pengkajian.

Tabel 6. Pemenuhan Kebutuhan Fisik Berdasarkan Kebutuhan Makan

No	Kebutuhan Makan	f	Persen
1	Tiga kali sehari	41	91,11
2	Dua kali sehari	4	8,89
3	Satu kali sehari	-	-
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Data tabel 6 menunjukkan, bahwa dari seluruh penerima manfaat selaku responden terdapat 41 kepala keluarga (91,11 persen) yang mengaku telah memenuhi kebutuhan makan tiga kali sehari. Keterpenuhan kebutuhan makan tiga kali sehari dikarenakan kepala keluarga telah memiliki pekerjaan pokok dan penghasilan. Demikian juga yang mengaku pemenuhan kebutuhan makan dua kali sehari sebanyak empat kepala keluarga atau 8,89 persen mengaku, bahwa mereka makan nasi dua kali siang dan malam, tetapi pada pagi harinya makan dengan makanan kecil seperti pisang goreng atau singkong rebus. Dengan demikian seluruh penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan makan dengan memperoleh asupan gizi yang sehat.

Kondisi pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dimaknai, bahwa pada umumnya seluruh penerima manfaat telah mampu memenuhi kebutuhan makan keluarga dengan memperhatikan asupan gizi sehat, meskipun terdapat

beberapa keluarga makan dua kali sehari tetapi mereka sarapan dengan makanan selain nasi. Oleh karena itu mereka sebenarnya telah makan tiga kali dalam sehari. Berdasar penjelasan keluarga penerima manfaat terkait pemenuhan kebutuhan makan, pemenuhan kebutuhan makan bagi keluarga penerima manfaat dapat dikatakan 100 persen terpenuhi.

Mengenai pemenuhan kebutuhan pakaian para keluarga penerima manfaat selaku responden berhasil digali dan datanya dapat disajikan dalam tabel berikut. Kebutuhan pakaian secara kualitas dan kuantitas.

Tabel 7. Pemenuhan Kebutuhan Fisik Berdasar Kebutuhan Pakaian

No	Kebutuhan Pakaian	f	Persen
1	Kualitas baik	2	4,44
2	Kualitas cukup	10	22,22
3	Kualitas sederhana	33	73,33
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Kebutuhan pakaian para penerima manfaat seiring dengan kebutuhan makan mereka, artinya semakin tinggi status sosial ekonomi penerima manfaat, semakin tinggi pula tuntutan kebutuhan pakaian yang mereka gunakan. Sebaliknya semakin rendah status sosial ekonomi penerima manfaat, maka semakin sederhana pula kebutuhan pakaian. Data pada tabel 7 memperlihatkan, bahwa sebagian besar penerima manfaat ternyata hanya membutuhkan pakaian dengan kualitas sederhana, bahwa mereka membeli pakaian dari penjual keliling dan pakaian pantas pakai yang mereka beli, yakni 33 kepala keluarga (73,33 persen). Mereka sebagian terdiri dari keluarga berstatus sosial ekonomi menengah ke atas dan keluarga sederhana. Sebagian penerima manfaat yang lain yakni dua keluarga (4,44 persen) mampu memenuhi kebutuhan pakaian dengan kualitas baik. Pemenuhan kebutuhan pakaian dengan kualitas cukup dilakukan oleh 10 keluarga (22,22 persen).

Pada tabel 7 menunjukkan, bahwa kehidupan di lingkungan permukiman desaku menanti

ternyata telah tumbuh kelompok dan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga yang memiliki pekerjaan pokok dengan penghasilan lebih tinggi dan kepemilikan rumah telah direnovasi memiliki status sosial lebih tinggi. Hal ini karena penerima manfaat telah memiliki pekerjaan dan keterampilan yang bervariasi. Status sosial akan tumbuh sesuai dengan pekerjaan dan kepemilikan yang ada pada lingkungan tinggal (Haryanto, Sindung. 2011).

Di samping terungkap pemenuhan kebutuhan pakaian para penerima manfaat secara kualitas, terungkap pula pemenuhan kebutuhan pakaian secara kuantitas, dalam arti berapa kali dalam satu tahun keluarga penerima manfaat membutuhkan pakaian. Sebagian besar para penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pakaian untuk keluarga dilakukan satu kali dalam setahun yakni sebanyak 40 keluarga (88,89 persen). Mereka membeli pakaian pada hari raya Idul Fitri, dan sebanyak lima keluarga mengaku membeli pakaian sebanyak dua kali dalam setahun. Mereka yang mengaku membeli pakaian dua kali dalam setahun tersebut sering kali dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pada hari raya, keluarga membeli pakaian baru sebagai tradisi. Berdasar pengakuan keluarga penerima manfaat, mereka telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara fisik terutama dalam pemenuhan kebutuhan pakaian.

Mengenai data pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat dapat disimak pada sajian pada tabel 8

Tabel 8. Pemenuhan Kebutuhan Fisik Berdasar Kebutuhan Kesehatan

No	Kebutuhan Kesehatan	f	Persen
1	Dokter Praktek	-	86,67
2	Puskesmas	39	8,89
3	Tukang urut/pijat	4	4,44
4	Obat tradisional	2	
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Data pada tabel 8 menunjukkan, bahwa sebagian besar penerima manfaat telah melakukan perawatan kesehatan keluarga dengan cara memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah yakni puskesmas sebanyak 39 keluarga (86,67 persen). Artinya bahwa penerima manfaat telah sadar dan mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Mereka telah sadar dalam menjaga kesehatan keluarga melalui pengobatan medis, walaupun masih terdapat beberapa keluarga yang menggunakan pengobatan tradisional dan urut/pijat yakni enam keluarga (13,33 persen).

Pemenuhan kebutuhan psikis bagi keluarga penerima manfaat meliputi aspek kebutuhan rekreasi, keamanan/rasa tenteram, dan kepuasan batin. Pemenuhan kebutuhan rekreasi dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan pekerjaan yang ditekuninya. Bekerja disamping memperoleh penghasilan juga menjadi sarana untuk melampiaskan pemenuhan kebutuhan rekreasi. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai pedagang keliling dan buruh bangunan, dianggap sebagai hiburan atau rekreasi. Oleh karena itu dalam hal pemenuhan kebutuhan psikis terkait aspek rekreasi 41 keluarga (91,11 persen) dapat terpenuhi dengan baik. Keluarga lain sebanyak empat keluarga (8,89 persen) masih mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, dan mereka mengaku selalu menabung untuk kebutuhan rekreasi keluarga.

Pemenuhan kebutuhan psikis pada aspek rasa aman/nyaman sangat sulit untuk dilihat karena rasa aman dan nyaman sangat spesifik untuk diketahui. Berdasar wawancara diketahui, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan psikis khususnya rasa aman tinggal di lingkungan desaku menanti dapat dirasakan dari kondisi rukun dalam bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam kebersamaan. Berdasar informasi dan pengumpulan data dari keluarga penerima manfaat, ternyata kehidupan di lingkungan desaku menanti memberi ketenteraman bagi keluarga. Sebanyak 45 keluarga (100,00 persen) mengaku *kerasan* tinggal di lingkungan

desaku menanti. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan rasa aman oleh keluarga penerima manfaat dapat dinyatakan terpenuhi dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan pada aspek kepuasan batin bagi keluarga penerima manfaat dapat disimak dalam sajian data terkait pengakuan keluarga penerima manfaat pada tabel 9.

Tabel 9. Pemenuhan kebutuhan Psikis Berdasar Kebutuhan Rasa Puas

No	Kebutuhan Rasa Puas	f	Persen
1	Puas	39	86,67
2	Cukup Puas	4	8,89
3	Kurang Puas	2	4,44
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Sajian data pada tabel 9 memperlihatkan sebanyak 39 keluarga (86,67 persen) keluarga penerima manfaat mengaku puas dengan pemberian layanan bimbingan dan keterampilan. Keluarga penerima manfaat juga mengaku cukup puas dan bahkan ada juga yang memberi penjelasan dirinya kurang puas dengan kondisi di lingkungan desaku menanti, yakni empat atau 8,89 persen.

Kondisi tersebut artinya bahwa keluarga penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan akan rasapuas ketidakpuasan yang dirasakan hanya karena anaknya tidak naik kelas.

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan keluarga dalam kaitannya sebagai makhluk sosial yang selalu memiliki hasrat pemenuhan untuk berkelompok, berelasi dan berinteraksi, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Edi Suharto, 2010). Masyarakat selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain terlebih dalam kehidupan di lingkungan desaku menanti. Hidup bermasyarakat sangat diperlukan terutama dalam kehidupan di lingkungan tempat tinggal. Kehadiran dalam pertemuan warga merupakan wujud dalam pemenuhan kebutuhan sosial. Berdasar pengakuan keluarga penerima manfaat terkait dengan keterlibatan dan kehadiran dalam pertemuan warga sebanyak 45 ke-

luarga mengaku selalu hadir. Demikian juga dalam pelaksanaan gotong royong semua keluarga mengaku selalu terlibat dan hadir. Pada saat ada salah satu anggota keluarga penerima manfaat mengalami sakit mereka mengaku mengumpulkan dana dengan cara *serkileran* (iuran sukarela) untuk meringankan biaya pengobatan. Berdasar informasinya ternyata pelaksanaan pengumpulan dana tersebut dilakukan oleh semua ikut berpartisipasi serta menengok orang yang sakit. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan sosial para penerima manfaat telah dapat terpenuhi. Terlebih dalam kegiatan yang sifatnya kebersamaan dalam bermasyarakat

E. Penutup

Kesimpulan: Bahwa para penerima manfaat penghuni rumah di desaku menanti telah mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga penerima manfaat telah memiliki pekerjaan pokok yang memungkinkan untuk mensejahterakan kehidupan keluarga. Ternyata dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dilakukan secara bersamaan saling membantu diantara anggota keluarga melalui pekerjaan tambahan yang dikerjakan di rumah. Berkat pekerjaan sampingan tersebut mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan merenovasi rumah yang mereka tempati dengan menambah kamar tidur. Pemenuhan kebutuhan yang dapat terpenuhi tersebut adalah kebutuhan fisik, psikis, dan kebutuhan sosial.

Pemenuhan kebutuhan fisik dapat terpenuhi dengan baik keluarga penerima manfaat mampu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan bagi keluarga. Demikian juga pemenuhan kebutuhan psikis dapat terpenuhinya kebutuhan rekreasi, rasa aman, rasa kepuasan tinggal di desaku menanti. Demikian juga dalam pemenuhan kebutuhan sosial seluruh keluarga penghuni desaku menanti telah mampu memenuhi kebutuhan berkelompok, berrelasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasar hasil penelitian terhadap keluarga penghuni desaku menanti yang mengaku telah merasa sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga berkat program Desaku Menanti. Oleh karena itu menjadi penting keberlanjutan program Desaku Menanti di daerah lain di Indonesia

F. Rekomendasi

Kementerian Sosial bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi lokasi program desaku menanti untuk melakukan *monitoring* dan bimbingan secara berkala. Berkait dengan penelitian ini maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menjadi pusat dalam melakukan bimbingan terhadap keluarga penerima manfaat eks Gepeng

G. Ucapan Terima Kasih

Kepada warga Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan telah memberikan informasi, Kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial SAHAJA selaku pendamping dalam program Desaku Menanti di Kabupaten Pasuruan, juga kepada Ibu Eny Hekmawati sebagai pembimbing serta semua pihak yang telah mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian

Pustaka Acuan

- Arif Rohman, (2013). *Program Desaku Menanti: Rehabilitasi Sosial Gepeng Terpadu Berbasis Desa*. <http://arifrohman-socialworker.blogspot.c>
- Baliwati, dkk. (2004). *Pengantar Makan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Pramuwito. (1999). *Penelitian Ujicoba Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Usia senja Berbasis Masyarakat*. B2P3KS. Yogyakarta.
- Deddy Mulyana, (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin Yogyakarta.
- Edi Suharto. (2010). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Percikan Pemikiran*. Bandung: LSP.
- Ganes Gunansyah. (2015). *Masalah Sosial Gepeng*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Pendidikan.

- Haryanto, Sindung. (2011). *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Irsan Suani. (2015). *Masalah Gepeng di Kota Makasar*. Makasar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar.
- Kartini Kartono, (2010). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Keputusan Presiden No. 40, (1983). *Koordinasi Penanggulangan masalah Gelandangan dan pengemis*.
- Noeng Muhajir, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 31, (1980). *Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis*
- Rizky Dwitanto Putro, (2015). *Pembinaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Kartan Pemalang*. Semarang.
- Rancangan Peraturan Menteri Sosial. (2013) tentang *Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengurangi Konsumsi Rokok di Indonesia

The Effort of Poverty Alleviation by Reducing Cigarettes Consumption in Indonesia

Memi Almizi¹ dan Istiana Hermawati²

¹Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Colombo No.1, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan

²Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu Yogyakarta, Telp (0274) 377265

Email: memialmizi26@gmail.com, HP 087851810189 Email: istiana1410@gmail.com, HP 085228716070
diterima 06 Agustus 2018, diperbaiki 23 Agustus 2018, disetujui 07 September 2018

Abstract

Poverty is a main problem that should be seriously handled by the government. The second of the biggest poverty causes in Indonesia is the cigarettes smoking consumption. This research is aimed to analyze the connection between poverty and cigarette smoking consumption, its impact and the efforts of alleviating the poverty by reducing the consumption of cigarettes. This research is a bibliography study that uses descriptive qualitative approach. The data sources of this study comes from statistical data, articles on newspapers, and results of the previous research accordingly. The facts show that cigarette smoking consumption causes a bad impact in both, either health and economy that brings people get trapped in the circle of poverty. Poverty alleviation is a responsibility of both the government and the society. There are three recommendations as suggested by this research as follows: 1. The Directorate of Customs and Tax needs urgently to really increase the price of cigarettes; 2. The Ministry of Finance and State Budget Planning Body (Bappenas) needs to recalculate the budget for health expenses allocation and the customs revenue of the cigarettes; 3. The Social Ministry needs to tightly monitor those receive the social aid through Hoped Family Program (Program Keluarga Harapan) as they have to expend it productively and the Ministry needs to socialize it accordingly and to apply new regulations on the criteria of the social aid recipient, namely for those who are poor indeed and not cigarette smokers.

Keywords: *cigarette smoking consumption; poverty alleviation.*

Abstrak

Kemiskinan adalah masalah pokok yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Salah satu penyumbang kemiskinan terbesar kedua di Indonesia adalah konsumsi rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan dengan konsumsi rokok, dampak merokok, dan upaya pengentasan kemiskinan dengan mengurangi konsumsi rokok. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data statistik, berita koran dan hasil penelitian. Fakta membuktikan, bahwa konsumsi rokok memberikan dampak yang buruk, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi sehingga masyarakat terjebak pada lingkaran kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah melalui: 1. Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai agar benar-benar menaikkan harga rokok; 2. Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu memperhitungkan ulang pembiayaan untuk kesehatan dan pendapatan dari bea cukai rokok; 3. Kementerian Sosial perlu memberikan pengawasan kepada masyarakat penerima bantuan sosial melalui program keluarga harapan agar bantuan itu digunakan untuk hal yang produktif, perlu melakukan sosialisasi dan membuat aturan baru mengenai kriteria penerima bantuan sosial yaitu masyarakat miskin yang tidak merokok.

Kata Kunci: *konsumsi rokok; pengentasan kemiskinan.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah krusial yang dihadapi oleh setiap negara berkembang, ter-

masuk negara Indonesia. Secara umum kemiskinan digambarkan suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia, meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga digambarkan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Istiana dkk, 2015).

Ishartono dan Raharjo (2016) mendefinisikan kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok atau dasar yang pada gilirannya akan membawa dampak berbagai masalah. Kemiskinan akan memberikan dampak kekurangan gizi, cepat terkena penyakit, tidak mampu mengakses pendidikan yang pada akhirnya kemiskinan mewariskan generasi penyandang masalah sosial.

World Bank dalam Houghton dan Kandker (2009) menjelaskan, bahwa kemiskinan terkait dengan depreviasi kesejahteraan. Pandangan konvensional menyatakan, bahwa sejahtera pada dasarnya apabila semua kebutuhan hidup terpenuhi; maka orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan minimum secara layak. Pandangan ini melihat kemiskinan dalam koridor keuangan. Kemiskinan juga dapat dilihat pada jenis yang khusus, misalnya konsumsi, yakni orang yang berhak mendapatkan rumah sederhana, raskin, atau jamkesmas. Dimensi-dimensi tersebut seringkali bisa kita ukur secara langsung dengan mengukur malnutrisi (gizi buruk) atau buta huruf. Pendekatan lain untuk melihat kesejahteraan (dan kemiskinan) fokus pada kemampuan individu dalam menjalankan fungsi sosialnya. Orang miskin, dalam pendekatan ini, adalah mereka yang seringkali kualitas SDM-nya rendah, sehingga pendapatan/pendidikan mereka pun tidak memadai, atau kesehatannya yang buruk dan merasa tidak berdaya ataupun tidak memiliki kebebasan politik.

Kemiskinan sebagaimana digambarkan *Word Bank*, memiliki cakupan yang lebih luas, karena terminologi yang digunakan adalah terminologi kesejahteraan. Dalam konteks ini,

orang dikatakan miskin tidak terbatas pada ketidakmampuannya secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, sebagaimana dirumuskan pandangan konvensional, namun kemiskinan seseorang juga sangat dipengaruhi oleh dimensi lain, seperti kapabilitas individu yang relatif rendah dan ketidakberfungsian sosial.

Dalam perspektif hak asasi manusia, Tamme (2006) menyebutkan, bahwa kemiskinan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak yang melekat pada diri manusia seyogyanya tidak boleh dikurangi, terlebih dicabut. Oleh karenanya kemiskinan dalam perspektif ini tidak dapat dipandang dari kacamata statistik. Kecil ataupun besarnya kemiskinan menurut angka statistik terdapat persoalan manusia yang terancam hidupnya. Jika kemiskinan terjadi pada keluarga, maka anak-anak mereka pasti akan menghadapi problem hingga sampai pada tahap kelaparan, kurangnya gizi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan terampas, bahkan nyawanya juga ikut terancam. Itu merupakan hak asasi yang seharusnya terpenuhi dan menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat bahkan negara. Dengan bertitik tolak pada pemikiran, bahwa kemiskinan merupakan hak asasi manusia, maka pengentasan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan negara.

Berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September tahun 2017 tercatat sebanyak 26,58 juta jiwa (10,12%), angka ini berkurang sebesar 1,19 juta jiwa jika dibandingkan pada bulan Maret tahun 2017 sebesar 27,77 juta jiwa (10,64%). Penduduk miskin yang tinggal di wilayah perkotaan pada bulan September 2017 sebesar 7,26% (pada bulan Maret 2017 tercatat 7,72%), sedangkan yang tinggal di wilayah perdesaan sebesar 13,47% (pada bulan Maret 2017 sebesar 13,93 %) (BPS, 2/01/2018).

Pemicu kemiskinan adalah peran dari komoditi makanan dan non makanan, akan tetapi

sumbangan garis kemiskinan makanan sangat jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan non komoditi makanan. Pada bulan September 2017 tercatat sebesar 73,35% garis kemiskinan dipengaruhi oleh komoditi makanan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan berupa beras, rokok kretek, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang memberikan pengaruh terhadap garis kemiskinan, baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Data Badan Pusat Statistik (beberapa tahun terbitan) menunjukkan, bahwa setiap tahun alokasi anggaran rumah tangga miskin nomor dua adalah untuk membeli rokok, yakni 12,4%. Artinya, uang dan pendapatan mereka dihabiskan untuk membeli rokok. Persentase tersebut masih jauh di atas alokasi untuk kebutuhan lauk pauk dan pendidikan. Biaya konsumsi rokok sebesar 4,4 kali lipat dari biaya pendidikan dan 3,3 kali lipat dari biaya kesehatan. Tulus menambahkan, rokok juga memicu inflasi yang paling tinggi di ranah perkotaan dan perdesaan. Menurut data BPS, dampak inflasi konsumsi rokok di perdesaan dan perkotaan mencapai 10,7% per bulan. Dampak inflasi rokok juga dinilai memiskinkan masyarakat ketimbang pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA yang hanya 2,86%. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rokok juga merupakan salah satu komoditas penyumbang garis kemiskinan terbesar kedua setelah beras.

Berdasarkan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Indonesia, per September 2017, beras berkontribusi terhadap kemiskinan terbesar sebanyak 18,8% di perkotaan dan 24,52% di pedesaan. Faktor kedua yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah rokok kretek yang menyumbang sebesar 9,98% kemiskinan di perkotaan serta 10,7% di perdesaan.

Hal ini senada dengan hasil penelitian Irawan dalam Nasrudin & Piping (2013: 19) yang menemukan, bahwa masyarakat Indonesia

yang miskin menggunakan pendapatan mereka untuk membeli rokok, bukan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan pendidikan anak-anaknya, kesehatan dan lain sebagainya.

Fakta senada diungkapkan Ahmad pada peluncuran hasil penelitian Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018. Dalam hasil penelitiannya Ahmad menemukan, bahwa rokok merupakan kebutuhan kedua setelah beras yang dibeli oleh masyarakat sehingga rokok merupakan faktor yang sangat besar memberikan pengaruh terhadap garis kemiskinan (republika.co.id,2018). Rokok atau tembakau yang dikonsumsi ini membuat masyarakat terperangkap pada kemiskinan, apalagi masyarakat miskin ini menggunakan sedikit pendapatannya untuk membeli rokok, bukan untuk membeli kebutuhan pokok sehingga hal ini akan berdampak pada kesehatan dan kondisi gizi anak-anak mereka yang rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan Ahsan (2005) & Irawan (2012) menyimpulkan hal yang sama, bahwa apabila masyarakat memiliki tingkat kecanduan yang berat terhadap rokok, maka kondisi ekonomi akan semakin terpuruk. Anggaran pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, pendidikan anak dan kesehatan justru digunakan untuk membeli rokok. Fhatoni Azhar & Firmansyah (2015) juga menemukan, bahwa pendapatan rumah tangga total mengalami penurunan yang signifikan ketika konsumsi rumah tangga akan rokok mengalami peningkatan.

Terkait relevansi antara kemiskinan dan kebiasaan merokok, *World Health Organization* (WHO) punya data yang cukup menarik. Organisasi kesehatan dunia ini mencatat mayoritas perokok di seluruh dunia berasal dari negara miskin dan berkembang. Dalam laporannya soal fakta-fakta tentang tembakau (rokok) WHO menyebutkan, bahwa pada 2015 ada sekitar 1,1 miliar perokok di seluruh dunia. Dari jumlah

itu, sekitar 800 juta lebih atau 80% berasal dari negara dengan pendapatan rendah dan menengah, sisanya 20% dari negara kaya.

Dalam laporan yang berjudul *The Global Tobacco Crisis*, WHO mencatat orang miskin di Bangladesh menghabiskan 10 kali pendapatannya untuk membeli rokok dibandingkan biaya untuk pendidikan. Di Mesir, orang miskin membelanjakan 10% kebutuhan rumah tangga mereka hanya untuk rokok. Di Indonesia lebih parah lagi, keluarga miskin menghabiskan 15% pendapatannya untuk membeli rokok. Hal yang sama juga terjadi di Meksiko, 11% kebutuhan rumah tangga orang yang paling miskin juga habis untuk rokok. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa rokok telah jadi bagian dari kebutuhan dasar kaum miskin. Kebutuhan utama seperti kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal banyak terabaikan dibanding rokok.

Menkes Nila Moeloek saat membuka *Indonesian Conference on Tobacco or Health* di Balai Kartini Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 menyebutkan, bahwa lebih dari sepertiga atau 36,3% penduduk Indonesia saat ini (tahun 2017) menjadi perokok, bahkan 20% remaja usia 13-15 tahun adalah perokok (tempo.co.id, diunggah tanggal 30 Mei 2017). Hal yang lebih mencengangkan, jumlah remaja laki-laki yang merokok kian meningkat (sebesar 58,8%). Sementara data dari hasil Survei indikator kesehatan nasional (Sirkesnas) 2016 menunjukkan angka remaja perokok laki-laki mencapai 54,8%. Berarti telah terjadi peningkatan sebesar 4% pada tahun 2017. Ini berarti, bahwa lebih dari separuh remaja laki-laki di Indonesia adalah perokok.

Dengan perbedaan angka yang tipis, pengurus harian YLKI (Tulus) mengemukakan, bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia yang merokok sebanyak 35% dari total populasi atau sekitar 75 juta jiwa. Jumlah itu belum termasuk dengan pertumbuhan prevalensi perokok anak-anak dan remaja yang tercepat di dunia sebesar 19,4%. Bahkan, menurut data Atlas Pengendalian Tembakau di ASEAN,

sebanyak 30% anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 10 tahun atau sekitar 20 juta anak adalah perokok. Tulus melihat konsumsi rokok telah mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang sangat signifikan dan masif. Contohnya, rokok menyebabkan kemiskinan akut di rumah tangga miskin.

Kebiasaan merokok di Indonesia telah membunuh setidaknya 235 ribu jiwa setiap tahun. Menurut data *The Tobacco Atlas* Tahun 2015, sekitar 217.400 jiwa penduduk Indonesia meninggal dunia akibat mengkonsumsi rokok yakni sekitar 19,8% pria meninggal akibat dari mengkonsumsi rokok dan sisanya perempuan sebesar 8,1%.

Menurut Chriswardani.et all (2012:70) ada hubungan yang nyata antara angka kematian dengan kemiskinan. Masyarakat yang miskin memiliki tingkat pendapatan yang rendah sehingga kesempatan untuk mengakses kesejahteraan sosial seperti kesehatan menjadi terbatas.

Untuk menanggulangi penyakit dan menekan angka kematian akibat merokok, Pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional harus menanggung beban yang tidak sedikit. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ridwan Thaha menuturkan, bahwa biaya yang ditanggung akibat konsumsi tembakau saat ini sangat tinggi. Pada tahun 2013 saja, beban yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 378 triliun, sebuah angka yang sangat fantastis.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji keterkaitan kemiskinan dengan konsumsi merokok di Indonesia dan berbagai aspek terkait. Fakta menunjukkan, bahwa rokok menjadi salah satu kebutuhan “utama” konsumsi kaum miskin di Indonesia, setelah beras. Sebagian besar pendapatan penduduk miskin di Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan dihabiskan untuk membeli rokok, sehingga memperparah kemiskinan yang sudah ada. Kondisi ini berdampak pada buruknya gizi buruk masyarakat, kesehatan yang rendah dan rendahnya partisipasi

pasi pendidikan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dengan mengurangi konsumsi rokok. Upaya ini diharapkan masyarakat miskin dapat membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan pokok yang lebih bermanfaat dan memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian kepustakaan lebih banyak diperoleh dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih dikenal dengan istilah penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan karena datanya lebih banyak bersumber dari dokumentasi (Mukhtar, 2013). Sugiono (2012) mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai penelitian yang mengkaji teori dari sumber atau referensi yang berkaitan dengan masalah budaya, nilai dan norma yang berkembang pada penelitian sosial. Sedangkan Arikunto (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif kepustakaan sebagai penelitian yang sumber datanya diambil dari berbagai referensi buku, surat kabar atau berita dari koran, kajian penelitian yang sudah dilakukan untuk digunakan menyusun teori yang lebih kuat dan terbaru.

Penelitian studi kepustakaan menurut Zed (2008) merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka baik dari data hasil survey, berita dari koran atau surat kabar, membaca hasil penelitian sebelumnya dan mengolah data hasil penelitian. Oleh karenanya, pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis data hasil penelitian sebelumnya yang kemudian dikritisi dari perspektif kesamaan baik sifat dan jenis data yang ditampilkan serta didukung oleh data survey dari lembaga resmi ataupun berita koran yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sumber pustaka yang dimaksud pada penelitian ini adalah berupa berita dari koran, data statistik yang diterbitkan melalui internet, kajian jurnal yang telah terpublikasi di inter-

net, skripsi, tesis dan karya ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian. Data diambil dengan mengakses melalui komputer digital dengan memperhatikan fokus kajian yang sedang diteliti, mengumpulkan, memilah lalu membuat interpretasi dan menyimpulkan hasilnya menjadi sebuah temuan yang baru.

Setelah mendapatkan data penelitian selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan menggunakan formula Miles dan Hubermans melalui tiga tahapan, yaitu: pertama, pengumpulan data mengenai fokus yang sedang dikaji; kedua, reduksi data dengan cara menajamkan, menggolongkan data, serta membuang data yang tidak relevan dengan fokus yang dikaji sehingga data terorganisasi dan terpola agar dapat membantu menyusun suatu kesimpulan yang utuh; ketiga, penyajian data yang telah direduksi memungkinkan untuk dibuat pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Hubermans 2007: 16).

C. Konsep Kemiskinan, Fenomena Merokok dan Berbagai Aspek Terkait

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan yang serba kekurangan, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik itu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor (Sari, 2016).

Kemiskinan dapat juga didefinisikan sebagai kondisi ketidakberuntungan. Menurut Chambers (1981) lima ketidakberuntungan pada keluarga miskin, yaitu kerentanan, kelemahan fisik, derajat isolasi, keterbatasan pemilikan aset, dan ketidakberdayaan. Chambers menjelaskan bahwa masyarakat miskin umumnya ditandai ketidakberdayaan (*powerless*) untuk: 1) memenuhi kebutuhan dasar; 2) melakukan usaha produktif; 3) menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi; 4) menentukan nasib sendiri; dan 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

Terminologi lain yang pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural menurut Selo Soemarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh segolongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Sedang kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan.

Menurut BPS dan Depsos RI (2003:11) kemiskinan dimaknai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (*inability of the individual to meet basic needs*). Konsep tersebut sejalan dengan konsep Sen Meier (1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *'the failure to have certain minimum capabilities'*. Definisi ini mengacu pada standar kemampuan minimal tertentu, apabila penduduk tidak mampu melebihi kemampuan minimum tersebut, maka dapat dianggap sebagai miskin. Perhitungan penduduk miskin di Indonesia mengikuti konsep ini. Artinya, penduduk yang secara pendapatan tidak/kurang bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal dianggap miskin.

Biro Pusat Statistik (2006) dalam Istiana dkk (2015) membagi kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif didasarkan pada ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar kehidupan tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat setempat, sehingga proses penentuannya sangatlah subyektif. Dalam mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, garis kemiskinan relatif mencukupi untuk digunakan, kendati perlu disesuaikan dengan tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Misalnya garis kemiskinan US 1\$ per hari mungkin bermanfaat di Vietnam, ketika 27% penduduk tergolong miskin dengan standar ini (Haugton, 2000). Sedang kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmam-

puan seseorang dalam mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah *'garis kemiskinan'*. Garis kemiskinan absolut ini tidak berubah dalam hal standar hidup, karenanya garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum.

Garis kemiskinan menurut Biro Pusat Statistik merupakan sejumlah uang yang diperlukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makan yang setara dengan 2.100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya. Individu yang pengeluarannya lebih rendah daripada garis kemiskinan disebut penduduk miskin, yang terdiri dari penduduk fakir dan penduduk fakir miskin.

Kemiskinan dalam konsep kesejahteraan sosial dimaknai sebagai masalah sosial (ketunaan, keterasingan, kerentanan, keterlantaran) yang disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kesejahteraan sosial yang dimaksud menurut UU No 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Kelompok fakir miskin dan rentan miskin (seperti anak-anak, lansia, wanita, dan penyandang disabilitas) inilah yang menjadi amanah konstitusi sebagai sasaran/target untuk menerima bantuan negara dalam rangka melindungi dan menyediakan hak-hak dasar dan atau meningkatkan kemampuan dasar mereka, sehingga hidup mereka relatif sejahtera.

Dengan mencermati beberapa kajian tentang kemiskinan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan multidimensi. Namun dalam konteks penelitian ini, terminologi yang dipakai dalam memaknai kemiskinan lebih mengacu pada kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan individu (dan keluarganya) dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, sehingga mereka termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) dari program bantuan sosial pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos rastra/BPNT dan program lain yang sejenis.

Fenomena Merokok: Konteks Global dan Indonesia

Dalam konteks Indonesia, WHO menempatkan Indonesia sebagai pasar rokok tertinggi ketiga dunia setelah China dan India dan prevalensi perokok laki-laki Indonesia paling tinggi di dunia. Data 10 negara dengan konsumsi rokok terbanyak versi WHO tahun 2008 seperti yang dilansir pada Lombok Post tanggal 22 Maret 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Urutan dari 10 Negara Konsumsi Rokok Terbanyak

No	Negara	Jumlah Perokok/Juta Orang	% Penduduk
1	China	390	29
2	India	114	12,5
3	Indonesia	65	28
4	Rusia	61	43
5	Amerika	58	19
6	Jepang	49	38
7	Brazil	24	12,5
8	Bangladesh	23,3	23,5
9	Jerman	22,3	27
10	Turki	21,5	30,5

Sumber: www.nusantaranewss.wordpress.com, 2 Maret 2016

Data pada Tabel 1 menunjukkan, bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga untuk konsumsi rokok terbesar setelah China dan India dengan jumlah perokok sebanyak 65 juta jiwa

(28%). Di China (negara dengan perokok terbanyak di dunia), tercatat 390 juta penduduk adalah perokok (29%). Sedangkan di India (negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak kedua di dunia) tercatat 144 juta perokok atau 12,5%.

Di China, penduduk perkotaan yang merokok sebesar 30,5 juta jiwa dan di perdesaan sebesar 23,3 juta jiwa. Hasil penelitian di Cina menyimpulkan, bahwa pengeluaran pemerintah untuk medis lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak rokok sehingga hal ini juga akan membuat masyarakat Cina terperangkap pada garis kemiskinan (Liu.et.al, 2006).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jennifer L.et.all (2014) terhadap 1239 peserta didik di Kanada ditemukan, bahwa rata-rata peserta didik (75%) sudah mulai mengonsumsi rokok pada usia 22 tahun. Hal serupa juga terjadi di negara Rusia, yaitu rata-rata seseorang merokok pada usia muda dengan persentasi laki-laki lebih banyak kuantitasnya daripada perempuan yakni sebesar 55,5% untuk laki-laki dan sebesar 26,5 % untuk perempuan. Untuk kasus Indonesia, Smet (1994) menyimpulkan, bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai merokok pada umur 11 sampai 13 tahun. Perokok terbanyak masyarakat Indonesia rata-rata pada usia 25 sampai 34 tahun sebagai perokok aktif dan perokok berat dengan persentasi sebesar 31,1%.

Apabila data di atas diperbandingkan, ternyata kasus di Indonesia lebih parah karena dilihat dari usia awal mulai merokok, Indonesia lebih cepat dibanding negara lain. Data statistik menunjukkan, 30% anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 10 tahun atau sekitar 20 juta anak adalah perokok.

Dilihat dari perilaku merokok, penduduk yang memiliki kemampuan ekonomi kuat lebih besar peluangnya untuk mengonsumsi rokok daripada penduduk yang kurang mampu (Andrew Stickley & Carlson, 2009). Kasus di negara Tanzania, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi rokok telah memberikan dampak yang

luar biasa terhadap kemiskinan masyarakat, sebesar 24% jumlah penduduk miskin mengorbankan asupan kalori demi membeli rokok (Kidane, et.al, 2015). Sedangkan di negara China, perilaku merokok lebih banyak pada masyarakat yang memiliki pendapatan sendiri dan memiliki upah daripada yang menganggur dan didominasi pada usia tua (Payar Kahal, 2016).

Di negara Bangladesh, masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan 24 dolar setiap bulan memiliki kesempatan dua kali lipat membeli rokok daripada membeli kebutuhan pokok seperti pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi rokok di Bangladesh telah menurunkan standar hidup yang layak dan itu terjadi secara signifikan (Efroymsen, 2001).

Untuk kasus Indonesia, Bambang Bojonegoro selaku kepala PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) mengemukakan, bahwa pendapatan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan berkisar pada angka Rp. 361.990,- per kapita per bulan. Jika pendapatan masyarakat yang berkategori miskin (sebesar Rp. 361.990,- per kapita per bulan) dikalkulasikan dengan konsumsi kebutuhan rokok setiap orang per hari (minimal satu bungkus dengan harga Rp 16.000), maka total konsumsi satu bulan sebesar 480.000 dibelanjakan hanya untuk membeli rokok. Jika konsumsi rokok sekitar 30 ribu/bungkus dalam sehari, maka jumlah uang yang harus disisihkan perbulan adalah Rp 900.000, maka masyarakat akan terus berada dalam garis kemiskinan (berhutang) (Kompas.com, 06/07/2017). Hal ini menunjukkan, bahwa pendapatan rumah tangga miskin lebih kecil jika dibandingkan dengan konsumsi yang dibutuhkan. Kondisi ini akan memperparah kemiskinan yang sudah ada. Jika masyarakat miskin menggunakan pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok yang lebih produktif angka kemiskinan dapat ditekan jumlahnya.

Tingginya angka merokok di Indonesia di samping karena dipengaruhi faktor budaya berupa tradisi masyarakat untuk merokok (berkem-

bang sejak abad ke-4), juga karena tiga alasan utama yang lain. Ketiga alasan utama mengapa perokok makin banyak di Indonesia menurut dr HM Subuh (Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan RI adalah iklan rokok yang banyak, mudah akses untuk membeli rokok dan harga rokok yang murah (<https://health.detik.com>).

Iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan rokok bisa dilihat di mana saja, mulai dari televisi hingga poster dan *billboard* di jalan raya. Selain itu, perusahaan rokok juga sering menjadi sponsor utama penyelenggaraan acara musik hingga olahraga. Hal ini banyak menginspirasi remaja dan anak-anak sehingga memutuskan untuk menjadi perokok. Mudah akses untuk mendapatkan rokok juga menjadi alasan makin banyaknya perokok di Indonesia. Rokok bisa dibeli di mana saja, mulai dari pedagang asongan di lampu merah hingga warung-warung di pinggir jalan. Karena rokok dijual di mana-mana, anak-anak dan remaja bisa dengan mudah membelinya. Apalagi ditambah dengan harga rokok yang murah dan bisa dibeli eceran membuat jumlah perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat.

Murahnya harga rokok juga menjadi pemicu tingginya angka perokok di Indonesia. Sebagai ilustrasi, untuk rokok merk marlboro atau sejenis dengan kemasan isi 20 batang, di Bahrain dipatok harga 1.00BHD (setara Rp. 32.000,-). Untuk jenis yang sama di Indonesia dipatok harga Rp. 14.000,-. Jadi harga rokok di Bahrain lebih mahal 2,5 kali lipat dibanding harga rokok di Indonesia. Padahal, pendapatan perkapita Bahrain mencapai 24,613 US\$, sementara perkapita Indonesia 3,475 US\$ (worldbank.org, 2014). Dari pendapatan perkapita tersebut terlihat, bahwa daya beli rokok masyarakat di Bahrain lebih tinggi dibanding di Indonesia. Namun karena harga rokok di Indonesia relatif murah, jumlah perokok di Indonesia lebih banyak dibandingkan di Bahrain.

Menurut ketua YLKI, dengan menaikkan harga rokok menjadi 50.000 ribu rupiah per

bungkus akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia karena jika harga rokok mahal masyarakat akan mengurangi konsumsinya terhadap rokok sehingga penyumbang garis kemiskinan akan menjadi berkurang (kompas.com, 22/8/2016)

Terkait dengan tradisi, dalam perkembangannya tradisi merokok mendapat hujatan keras dari banyak kalangan karena dianggap merokok lebih banyak mendatangkan kerugian baik secara ekonomi maupun kesehatan bagi perokok aktif dan perokok pasif (Thomas Sunaryo, 2013:3). Kendatipun demikian, sebagian masyarakat mengabaikan hujatan ini dan terus mengkonsumsi rokok karena mereka menganggap rokok adalah tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan.

Masyarakat Indonesia (yang mayoritas beragama Islam) juga berasumsi, bahwa rokok tidak menjadi masalah untuk dikonsumsi, karena dalam hukum Islam hukum merokok adalah makruh dan banyak tokoh atau pemuka agama juga melakukannya. Memang, sebagian organisasi Islam seperti Muhammadiyah telah mengharamkan rokok dalam fatwanya, namun para perokok memberikan dalih seperti yang dilansir dalam berita CNN, bahwa rokok telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara dari bea cukai rokok. Perolehan APBN dari bea cukai rokok ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 155,4 triliun lebih tinggi dan semakin naik jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 147,9 triliun (Jumat, 27/10/2017).

Motif Perilaku Merokok.

Merokok adalah menikmati asap nikotin yang terkandung di dalam rokok secara perlahan dan membuat si perokok memiliki ketergantungan dengan berbagai macam zat seperti senyawa gula, zat adiktif, pemberi rasa, saus dan aroma dengan bahan tambahan berupa cengkeh dan mentol, sehingga terbentuklah rasa sesuai selera dan dinikmati oleh para perokok (Samsuri & Murdiyati, 2010:34).

Awal mengenal sebuah rokok biasanya diawali dari usia muda dimana ada stimulus dari lingkungan sekitarnya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan pergaulan. Dalam lingkup sosial, seorang anak akan memiliki perasaan yang kuat untuk mencoba rokok karena tekanan dari orang-orang sekitar, seperti teman sebaya atau kelompok sosial mereka. Apabila tidak mau merokok, anak-anak akan dicap sebagai banci atau lebih parah lagi akan dikucilkan. Selain itu, kesadaran akan sebuah rokok juga tidak lepas dari paparan media yang kerap kali muncul.

Secara sosiologis Muhadjir Darwin (2007:201) menyatakan merokok adalah cara seseorang mengekspresikan dirinya dalam pergaulan sosial sebagai simbol jati diri dengan merasa, rokok dapat menghilangkan perasaan stres, bosan, dan membuat mereka lebih konsentrasi dalam beraktifitas.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh CNN melalui media sosial pada tahun 2016 didapatkan fakta, bahwa remaja Indonesia merokok karena dipengaruhi oleh faktor diajak oleh teman dan ledakan jika tidak ikut merokok, sehingga dengan terpaksa mereka mencoba untuk menghisap rokok kemudian menjadi ketagihan dan pada akhirnya membeli rokok (Ratnawati, et.al 2017). Menurut Kurt Lewin yang dikutip oleh Haifa Nurdiennah (2017: 501) seseorang mengkonsumsi rokok disebabkan oleh faktor lingkungan dan motif yang ada dalam diri individu sendiri.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Green (dalam Amalia, 2010), bahwa perilaku yang ditampakkan oleh seseorang termasuk memilih untuk merokok adalah mengikuti para pendahulunya, pengetahuan yang dimilikinya, tradisi dan kepercayaan yang diyakininya, faktor pendukung dan perilaku orang yang ada di sekitar lingkungannya. Lebih lanjut hasil survey yang dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Indonesia di 5 kota besar di Indonesia menunjukkan alasan 1500 sopir merokok dan terus konsumsinya adalah untuk mengurangi ketegangan (Pratiwi, 2007).

Senada dengan hasil survey di atas, Wismanto dan Sarwo (2007:14), mengemukakan bahwa individu merokok untuk mendapatkan kesenangan, rasa nyaman, merasa lepas dari kegelisahan dan juga mendapatkan rasa percaya diri. Faktor psikologis ini tentu tidak lepas dari faktor sosial, dampak paparan dari orang sekitar dan juga media sehingga tercipta sebuah persepsi tentang rokok. Dalam situasi yang kurang menyenangkan, rokok sering dijadikan sebuah pelarian untuk mendapatkan rasa kenyamanan. Dengan demikian, faktor psikologis dari menghisap rokok adalah rasa nyaman dan merasa lepas dari kegelisahan, meskipun sebenarnya itu hanyalah persepsi.

Menurut Rifqi A. Fattah dalam Agus Alamsyah & Novianto (2017: 26) 70% perilaku merokok disebabkan oleh pengetahuan perokok yang rendah terhadap rokok dan bahayanya. Sedangkan Ajzen (2005:25) dalam teorinya menyebutkan, bahwa faktor utama yang mendorong seseorang terus mengkonsumsi rokok adalah tiga faktor dasar perilaku yaitu: sikap terhadap perilakunya, sikap terhadap keterlaksanaan perilakunya dalam keadaan tertentu dan norma subyektif yang dianut oleh individu tersebut.

Berdasarkan beberapa kajian di atas dapat disimpulkan, bahwa perilaku merokok disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, terkait dengan motivasi, persepsi dan sikap seseorang sehingga memiliki perilaku merokok. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar individu yang memberikan pengaruh cukup besar bagi individu sehingga memutuskan untuk menjadi perokok. Faktor luar tersebut diantaranya pengaruh teman pergaulan, iklan media massa, tradisi, kemudahan akses untuk mendapat rokok, harga yang terjangkau dan sebagainya.

Dampak Merokok

Merokok sudah menjadi sebuah kegiatan bagi mereka yang aktif, bahkan orang yang pasif

pun harus dipaksa untuk merasakan dampaknya (Wismanto dan Sarwo: 2007:13). Dilihat dari aspek kesehatan, rokok terbukti memberikan dampak yang merugikan, baik bagi diri perokok (aktif) maupun orang di sekitarnya (perokok pasif). Dari aspek ekonomi, rokok juga telah membuat masyarakat terjerat kemiskinan.

WHO (2008) sebagaimana dikutip Noni Hilda Bawuna (2017:2) menyatakan, bahwa sebanyak lima juta orang lebih masyarakat Indonesia meninggal dunia disebabkan oleh konsumsi rokok yang berlebihan. Bahkan pada tahun 2030, diprediksi lebih dari 80% orang meninggal karena rokok. Menurut Nururrahmah (2014) ada beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok sehingga menyebabkan dari tahun ketahun kuantitas orang meninggal semakin meningkat. Penyakit yang disebabkan rokok diantaranya jantung koroner, trombosis koroner, kanker, dan bronkitis. Penelitian di Inggris menunjukkan, bahwa 50% remaja yang meninggal dunia karena mengkonsumsi rokok mengalami penyakit kanker mulut, esopagus, paring, laring, paru paru, jantung koroner, pankreas, kandung kemih, dan pembuluh darah. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa 87 % orang Indonesia meninggal dunia disebabkan oleh penyakit kanker paru-paru. Merokok menjadikan paru-paru tidak normal karena sel darah merah lebih mudah membawa karbondioksida membentuk menjadi karboksimoglobin daripada oksigen sehingga kerja paru-paru menjadi terhambat (Nururrahmah, 2014).

Selain memberikan dampak pada penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan penyakit psikologis. Albery & Mupeno (2011:101) mengatakan, bahwa kecanduan akan rokok dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa ketika tidak ada rokok dan berusaha mencari alternatif lain untuk memenuhi ketergantungan walaupun menguras ekonomi. Dengan kata lain, mereka rela menghabiskan uang untuk membeli rokok daripada membeli kebutuhan pokok yang lebih utama.

Terkait dengan pendapat Albery & Mupeno, Nasrudin & Piping (2013:19) juga menemukan, bahwa masyarakat Indonesia yang miskin menggunakan pendapatan mereka untuk membeli rokok, bukan untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan anak-anak, kesehatan dan lain sebagainya. Hasil seminar yang dilakukan oleh sekjen ASEAN di Australia yang dikutip oleh Agnes Marisca Dian Sari (2016) menyebutkan, bahwa konsumsi rokok telah memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan suatu bangsa, oleh karenanya konsumsi rokok harus menjadi perhatian negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.

Subhan Hasan selaku pelaksana harian Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dilansir pada web resmi Dinas Sosial Provinsi NTB juga menyampaikan hal yang sama, bahwa rokok memberikan kontribusi kedua terhadap garis kemiskinan, sehingga merupakan salah satu indikator kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi rokok oleh masyarakat (sosial@ntb.go.id). Lebih lanjut disebutkan bahwa, Subhan dalam kebijakannya akan fokus untuk mengentaskan kemiskinan langsung kepada keluarga penerima manfaat program Kemensos, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) melalui bantuan non tunai yang diterimanya. Masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak boleh menggunakannya untuk membeli rokok (Subhan Hasan, 2018).

Terkait anggaran kesehatan untuk menanggulangi dampak negatif merokok, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Soewarta Kosen menyebutkan, bahwa Pemerintah dan masyarakat mengeluarkan biaya kesehatan per tahun rata-rata sebesar 596,61 triliun rupiah atau setara dengan US\$ 45,9 Miliar (Merdeka.com 2017). Angka ini tentu tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh negara dari bea cukai hasil tembakau sebesar 149,7 triliun rupiah per tahun. Dengan demikian perlu dicari upaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui

penurunan konsumsi rokok di samping program penanggulangan kemiskinan yang lain.

Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengurangan Konsumsi Merokok

Menurut Saragih (2015:53) untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan secara langsung seperti mencatat atau melakukan pendataan ulang masyarakat yang memang benar-benar miskin, penyediaan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, program pembangunan wilayah, penganggaran dana penanggulangan kemiskinan, baik di daerah maupun di pusat, dan pemberian kredit kepada masyarakat berupa KUR. Sedangkan penanggulangan secara tidak langsung dapat berupa menciptakan ketentraman baik secara ekonomi, sosial, politik, melestarikan lingkungan hidup dan memberikan pelatihan pada kelompok masyarakat miskin. Kebijakan tidak langsung akan mendukung kebijakan langsung sehingga perekonomian rakyat dapat menjadi tonggak perekonomian secara nasional.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berhasil apabila berangkat dari akar permasalahan kemiskinan itu sendiri. Berbagai kajian yang dilakukan menemukan, bahwa rokok telah memberikan dampak yang merugikan, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Bahkan rokok merupakan penyumbang garis kemiskinan terbesar kedua setelah beras dan konsumen terbesar rokok adalah masyarakat dengan penghasilan rendah. Kondisi ini memperparah kemiskinan yang terjadi, sehingga dalam upaya menurunkan kemiskinan, rokok tidak bisa dikesampingkan dan perlu menjadi perhatian berbagai pihak.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi konsumsi rokok diantaranya melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No.81/1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan tentang aturan iklan rokok yang tayang di televisi, peringatan ba-

haya kesehatan, batasan kadar nikotin serta tar yang terkandung pada rokok, menyampaikan kepada khalayak tentang isi produk tembakau, sanksi serta hukuman, pengaturan wewenang masyarakat dan perannya pada kawasan bebas asap rokok.

Selain itu, Undang-Undang Kesehatan No. 23/1992 yang diamandemen menjadi UU No. 36/2009 telah mencantumkan masalah pengamanan zat adiktif (Juanita, 2012). Dalam pasal 113 UU No. 36/2009 ayat 1 ditegaskan, bahwa pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Selain itu, dijelaskan pula pada pasal 115 ayat (2), bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan bebas asap rokok, tidak boleh melakukan produksi, promosi dan konsumsi.

Dalam praktiknya, peraturan pemerintah mengenai tembakau yang mengandung zat adiktif ini mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Dalam menerapkan aturan tersebut pemerintah pusat secara jelas juga mengalami dilema, antara memilih kesehatan atau ekonomi sehingga peraturan tersebut terkesan setengah hati dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, rokok memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar terhadap pendapatan negara, di sisi lain jika masyarakat terus mengkonsumsi rokok, maka kesehatan akan semakin menurun dan angka kematian meningkat.

Sementara aturan terkait kawasan bebas asap rokok yang dicanangkan pemerintah pusat juga kurang direspon dengan baik oleh pemerintah daerah karena kurangnya sinergi dan sosialisasi terkait aturan tersebut. Peraturan yang dimaksud oleh pemerintah pusat sebenarnya bukan tentang melarang merokok dan meng-

hentikan produksi tembakau, tetapi lebih kepada pencegahan para perokok baru. Oleh karenanya, pemerintah pusat hendaknya bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga kebijakan yang dilaksanakan sejalan dan mendapat dukungan dari Pemda.

Dalam implementasi aturan tentang kawasan bebas asap rokok, dari 497 Kabupaten yang ada di Indonesia, hanya 9 Kabupaten yang melaksanakan aturan tersebut (Juanita, 2012:116). Daerah yang telah menerapkan aturan tersebut juga masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Menurut Soekanto (2011: 5) aturan perda tersebut susah dilaksanakan karena disebabkan oleh penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan masyarakat yang selalu disuguhkan rokok.

Peraturan pemerintah terkait tembakau terus diperbarui hingga diterapkan peraturan pemerintah No 109/2012 dan Permenkes No 28/2013. Peraturan tersebut menjelaskan tentang pencantuman pesan bergambar pada bungkus rokok tembakau yang diterapkan pada tanggal 24 Juni 2014 dan di beberapa negara terbukti efektif (Kurniawan, 2017:20). Namun di Indonesia, hasilnya belum kelihatan. Artinya, meskipun pesan bergambar sudah dicantumkan di dalam kemasan merokok tetapi masyarakat tetap saja mengkonsumsi rokok dalam jumlah banyak karena masyarakat memiliki kebiasaan atau tradisi merokok, sehingga peraturan pemerintah itu masih memiliki kendala.

Berangkat dari kurang efektifnya beberapa aturan terkait pengurangan konsumsi rokok, pemerintah perlu mengupayakan beberapa cara untuk mengurangi konsumsi rokok pada masyarakat Indonesia, yaitu dengan menerapkan kebijakan mengenai bea cukai hasil tembakau. Empat hal yang harus diperhatikan diantaranya: (1) konsumsi akan rokok perlu dikendalikan kuantitasnya, (2) peredaran tembakau atau rokok perlu diawasi, (3) konsumsi rokok menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan, (4) pemakainya perlu diberikan beban yang proporsional dari negara agar ter-

cipta keadilan dan keseimbangan (Doni Triono, 2017:2).

Kebijakan pemerintah ini memang terasa belum memberikan efek yang jera terhadap para perokok di Indonesia. Hal ini terlihat dari kuantitas perokok di Indonesia semakin meningkat. Menurut Diana Martiany (2016) jika pemerintah ingin mengurangi konsumsi masyarakat Indonesia maka isu kenaikan harga rokok Rp 50.000 harus benar-benar diterapkan agar masyarakat lebih berfikir jika ingin membeli rokok dengan harga yang sangat tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatoni Ashar & Firmansyah (2015) menyimpulkan, bahwa kenaikan tarif bea cukai yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap rokok. Penelitian yang dilakukan oleh Doni Triyono (2017) menunjukkan, bahwa kenaikan bea cukai terhadap rokok memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara sehingga sampai tahun 2016 jumlah pabrik rokok semakin berkurang, namun kendati demikian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengalami kendala terhadap banyaknya rokok ilegal yang beredar sehingga masyarakat akan lebih mengonsumsi produk rokok ilegal yang lebih murah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengawasi dan mengontrol peredaran barang ilegal yang ada di tanah air.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Puput Arisna & Eddy Gunawan (2016) menyimpulkan, bahwa bea cukai yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia, sedangkan kebijakan area bebas asap rokok yang diterapkan oleh pemerintah tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kuantitas orang merokok, namun hanya mengurangi frekuensi merokok sehingga di tempat kawasan boleh merokok mereka kembali untuk mengonsumsi rokok dengan kuantitas yang lebih banyak. Selanjutnya kebijakan pemerintah pada pesan bergambar dan iklan bergambar pada rokok sebagai bentuk tanggungjawab sosial pabrik rokok juga tidak memberikan pengaruh terhadap konsumsi rokok di Indonesia.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap bea cukai hasil tembakau/rokok tidak dapat memberikan efek jera bagi perokok di Indonesia malah justru kuantitas perokok di Indonesia semakin meningkat. Hal ini karena harga rokok masih terbilang rendah dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Di Indonesia, masyarakat dengan mudah bisa membeli rokok batangan, tidak seperti negara lain.

Dalam rangka mengurangi konsumsi rokok, pemerintah dalam mengambil kebijakan perlu bersifat tegas dengan meningkatkan bea cukai dan menetapkan harga rokok yang tinggi sehingga masyarakat (terutama masyarakat miskin yang mayoritas merokok) akan berpikir panjang untuk membelinya karena mahal. Sudah lama beredar isu, bahwa harga rokok akan naik tiga kali lipat dari harga biasanya, namun sampai sekarang hal itu masih sebatas wacana, belum menjadi kebijakan.

Upaya lain yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan mempertegas aturan untuk melarang sponsor rokok dalam kegiatan sosial dan pendidikan di kampus dan sekolah-sekolah. Di samping itu pemerintah juga perlu melarang iklan rokok tayang di media publik seperti televisi. Media melalui tayangan demi tayangan iklan rokok yang dipaparkan secara berkelanjutan terbukti dapat menimbulkan *aware* sebuah produk atau jasa dan ini akan menginspirasi masyarakat untuk mengonsumsinya karena ingin menjadi seperti apa yang dilihatnya dalam tayangan iklan. Menurut hasil kajian Widiarso (2017) Indonesia adalah negara yang masih menerapkan aturan, bahwa iklan rokok masih diperbolehkan untuk tayang. Berbeda dengan negara lain yang sudah menerapkan aturan bahwa iklan rokok tidak boleh tayang di televisi.

Pemerintah perlu mengapresiasi Pemprov/kabupaten/kota yang memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan faktor resikonya sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas yang tertuang dalam Instruksi Presiden

Republik Indonesia No.1/2017. Inpres ini secara spesifik menginstruksikan agar kabupaten/kota segera menetapkan aturan dan kebijakan yang mendorong agar masyarakat hidup sehat, termasuk menetapkan aturan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan mengimplementasikannya. Saat ini, dari 515 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 258 kabupaten/kota yang menetapkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR), 152 kabupaten/kota yang telah menetapkan peraturan daerah dan 65 di antaranya telah mengimplementasikannya, serta 106 kabupaten/kota baru yang mempunyai peraturan bupati/wali kota. Terkait iklan rokok, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah melarang iklan rokok yang dapat mempengaruhi anak-anak untuk memulai merokok antara lain Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Klungkung, Kota Bogor, Kabupaten Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Denpasar, dan Provinsi DKI.

Di samping upaya yang telah dilakukan, pemerintah juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat akan bahaya merokok bagi kesehatan dan bahkan berdampak pada kematian. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aturan terkait persyaratan pemberian bantuan kepada keluarga miskin yang tidak merokok, sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan taraf kesejahteraan.

D. Penutup

Kesimpulan: Kemiskinan merupakan masalah krusial yang harus ditanggulangi oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun hasilnya belum optimal. Kemiskinan disebabkan banyak faktor, dengan memfokuskan kajian pada keterkaitan antara konsumsi rokok dan kemiskinan kajian ini menemukan, bahwa konsumsi rokok di Indonesia merupakan penyumbang garis kemis-

kinan terbesar kedua setelah komoditi beras, sehingga untuk mengatasi kemiskinan bisa dilakukan dengan mengurangi konsumsi rokok.

Perilaku merokok disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu seperti motivasi dan sikap seseorang sehingga mengarahkan perilakunya untuk menjadi perokok. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar individu seperti pengaruh lingkungan pergaulan, teman sebaya, tradisi, dan sebagainya yang menyebabkan seseorang menjadi perokok.

Konsumsi rokok di Indonesia telah memberikan dampak negatif, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Dampak secara fisik yang terjadi akibat merokok diantaranya terjadinya serangan jantung, kanker paru paru, bronkitis, gangguan kehamilan dan janin, serta berbagai macam penyakit yang lain. Selain secara fisik, merokok juga berdampak secara psikologis, yakni gangguan jiwa dan depresi akibat ketidakmampuan seseorang untuk membeli rokok, sehingga ketika kebutuhan untuk merokok tidak terpenuhi, maka perokok merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya akibat telah tercandu oleh nikotin yang terkandung dalam tembakau yang dikonsumsi secara terus menerus.

Secara ekonomi, merokok dapat menyebabkan masyarakat menjadi miskin dan yang miskin menjadi lebih terpuruk. Fakta menunjukkan, bahwa konsumsi rokok di Indonesia berada pada urutan konsumsi kedua setelah beras sehingga rokok memberikan pengaruh secara signifikan terhadap garis kemiskinan.

Hasil dari beberapa kajian menunjukkan, bahwa pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk mengurangi konsumsi rokok dan akibat yang ditimbulkannya. Namun upaya itu belum berhasil secara optimal karena kurang adanya sinergitas dari berbagai pihak terkait.

Rekomendasi: Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terutama kepada pengambil kebijakan sebagai berikut: (1) Pemerintah melalui Direktorat

Jenderal Pajak dan Bea Cukai perlu segera menaikkan harga rokok, sehingga masyarakat terdorong untuk mengurangi konsumsi terhadap rokok karena harganya mahal; (2) Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu memperhitungkan ulang pembiayaan untuk kesehatan yang lebih besar dibanding pendapatan dari bea cukai rokok; (3) Pemerintah perlu menerbitkan aturan tentang larangan iklan rokok tayang di media elektrik seperti televisi dan menjadi sponsor untuk kegiatan sosial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah-sekolah; (4) Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial mengenai dampak mengonsumsi rokok bagi kesehatan dan perekonomian serta perlu membuat aturan baru mengenai kriteria penerima bantuan yaitu keluarga miskin yang tidak merokok; (5) Kementerian Sosial perlu memberikan pengawasan kepada masyarakat penerima bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH) dan program terkait lainnya agar bantuan yang diterimanya tepat sasaran dan digunakan untuk hal yang produktif, tidak digunakan secara konsumtif untuk membeli rokok. Apabila dalam pelaksanaan ditemukan pelanggaran, bantuan bisa dicabut dan dialihkan kepada KPM lain yang memenuhi persyaratan; (6) Perlu ketegasan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dalam memberikan Jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin, alokasi bantuan berobat secara gratis kepada masyarakat yang menderita sakit akibat merokok haruslah dibatasi, sehingga masyarakat tidak mengonsumsi rokok secara terus menerus karena kesempatan untuk mendapat pengobatan secara gratis bagi mereka sangat terbatas.

Ucapan Terima Kasih

Kepada editor, pembimbing dan rekan-rekan civitas akademika di Penelitian Evaluasi Pendidikan UNY yang memberikan masukannya

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan:

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ahsan & Abdullah, (2012). *Perokok Ancam Tinggal Landas Ekonomi Indonesia*. Diunduh dari <http://www.tempo.co/read/news/2018/07/14/090410527/> Perokok-Ancam-Tinggal-Landas-Ekonomi-Indonesia.
- Alfian, Mely G. Tan, Selo Soemardjan. (1980). *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Ilmu Persada
- Ashar.F & Firmansyah. (2015). Peningkatan Tarif Cukai Rokok dan Dampaknya terhadap Perekonomian dan Pendapatan Sektoral Jawa Tengah, *KINERJA*, Volume 19, No.2, Th. 2015.
- Arisna. P & Gunawan. E. (2016). Pengaruh Tarif Cukai Tembakau Dan Pesan Bergambar Bahaya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Di Banda Aceh Puput. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* Volume 3 Nomor 2, November 2016.
- Ahmad (2018). Rokok Beri Pengaruh Besar Terhadap AngkaKemiskinan.<https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/25/pavxg383-bps-rokok-beri-pengaruh-besar-terhadap-angka-kemiskinan>
- Alamsyah. A. & Nopianto (2016). Determinan Perilaku Merokok Pada Remaja, *Journal Endurance* Volume 2 No (1) February 2017.
- Bawuna. N.H. (2017). Hubungan Tingkat Strees Dengan Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Ratulangi, *e. Jurnal keperawatan* Volume 5 No 2 Agustus 2017.
- Chambers, D., Wedel, K., and Rodwell, M. (1981). *Evaluating social programs*. New York, USA: Boston: Allyn & Bacon.
- Chriswardani. S, Kartikawulan. L.R & Ki Hariyadi (2012). Konsumsi rokok rumah tangga miskin di Indonesia dan penyusunan agenda kebijakannya, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 01, No. 2 Juni 2012.
- Darwin. M. (2017). Perilaku merokok dan pengalaman regulasi di berbagai negara, *Jurnal Populasi* Volume 18 no 2. Tahun 2007.
- Dian. S. (2016). Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Diana. M. (2016). Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuan, *Majalah Info Sing-*

- kat Kesejahteraan Sosial*, Volume 8 no 16 Agustus 2016
- Efroymson, D., Ahmed, S., & Townsend, J. (2001). Hungry For Tobacco: An Analysis Of The Economic Impact Of Tobacco Consumption On The Poor In Bangladesh. *Tobacco Control*, 212-217.
- Hermawati, I. dkk. (2015) *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Houghton, J. and Shahidur R. Kandker. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC., USA: World Bank.
- Ishartono & Raharjo. (2016). Sustainable Development Goal dan pengentasan kemiskinan, *Social work journal*, volume 6 no 2. Januari 2016.
- Jennifer L.,Dugas.E. N, Erin K. O'Loughlin, Karp.I, and Sylvestre.M.P (2014). Incidence and Determinants of Cigarette Smoking Initiation in Young Adults. *Jurnal Society for Adolescent Health and Medicine*.2014.
- Juanita. (2012). Smoking Free Area Policy: Opportunities and Threats. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*.Volume 01 No. 02 Juni 2012
- Kahar. P. (2016). Sociodemographic Correlates of Tobacco Consumption in Rural Gujarat, India. *Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International*/Volume 2016,Article ID 5856740,9pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2016/5856740.
- Kurniawan.R.N. (2017). Respon Masyarakat Terhadap Peringatan Bergambar Pada Kemasan Rokok di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Promotif*, Vol.7 No.1, Juli 2017. 18-26
- Liua. Y, Raob. K, and Maoe.Z. (2006). Cigarette smoking and poverty in China. *Journal Social Science & Medicine* 63 (2006) 2784–2790.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. (2007). *“Qualitative Data Analysis (terjemahan).”* Jakarta: UI Press.
- Nasruddin D.S. & Piping. S. H. (2013). Dampak Pendapatan dan Harga Rokok Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok Pada Rumah Tangga Miskin Di Indonesia, *Jurnal BPPK*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2013.
- Nurdiennah. H.,Cahyo.K. & Indraswari.R. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Sopir Bus Akap Di Terminal Terboyo Kota Semarang, *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)* Volume 5, Nomor 1, Januari 2017.
- Nururrahmah. (2014). Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia, *proceeding seminar nasional*, Volume 1 No 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.81 Tahun 1999 tentang *Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*.
- Pratiwi, A. D. (2007). Perbedaan Kepercayaan Diri Antara Perokok Pria dan Perokok Wanita dalam Pergaulan Sehari-hari di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma*.
- Pratiwi.A.D.(2007). Epidemiologi, Program Penanggulangan dan Isu Mutakhir Diabetes Mellitus. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanudin. Makasar.
- Ratnawati.E., Siwu J.F & Rivelino S. (2017) Perbedaan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa Perokok Dan Bukan Perokok Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi. *e-journal Keperawatan (eKp)* Volume 5 Nomor 1, Februari 2017.
- Saragih.J.P. (2014). Ebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (*Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta*). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Stickley.A. & Carlson.P (2009). The Social And Economic Determinants Of Smoking In Moscow, Russia. *Sage Journal* Volume: 37 issue: 6, page(s): 632-639.
- Sari. A. M.D (2016), Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah, *skripsi*, Universitas Negeri Semarang April 2016.
- Soekanto. S, (2011). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Sunaryo.T. (2013). *Kretek Nusantara*, tanpa tempat terbit: Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI).
- Smet, Bart. (1994). *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Satria & Dawood, (2017). Korelasi Jumlah Pengeluaran Konsumsi Rokok Dengan Jumlah Pengeluaran Konsumsi Makanan Pada Masyarakat Miskin (Studi Kasus Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2, 84-93, 2549-836302.
- Trixie S, & Amalia R. (2010) Perilaku Merokok di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. *Pros Semin Nas*. Semarang; 2010:2(1):172-80.
- Tammie O’Nei, 2006, *Human Rights and Poverty Reduction: Realities, Controversies and Strategies, An ODI Meeting Series* (editorial), Overseas Development Institute 2006.
- Triono. D. (2017) Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Dan Produksi Tembakau Domestik, *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.1, No.1, November 2017
- Tirtosastro.S. & A. S. Murdiyati (2010). Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok, *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri* 2(1), April 2010.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- United Nation, (2006a). *Millenium Development Goals indicator database*. Departemen of Economic and Social Affairs, Statistic Division. New York. (<http://mdgs.un.org>.) Accessed May 2008.
- WHO. (2008). *WHO report on the Global Tobacco Epidemic*. from: http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf. (Diakses 12 Juli 2018)
- Zed, M, (2008). *Metode Penelitian kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3222227/3-penyebab-utama-makin-banyak-perokok-di-indonesia-iklan-mudah-dan-murah>, diakses 1 Agustus 2018, jam 12.52.
- <http://www.depkes.go.id/development/site/depkes/pdf.php?id=1-15112500016>
- <https://sosial.ntbprov.go.id/menurunkan-angka-kemiskinan-dengan-tekan-konsumsi-rokok/>
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/08/22/075526823/ylki.harga.rokok.mahal.turunkan.kemiskinan>
- <https://www.merdeka.com/peneliti-kerugian-akibat-rokok-tembus-rp-59661-triliun>
- <https://bisnis.tempo.co/read/879829/perokok-indonesia-rating-3-dunia-ylki-ancaman-nawa-cita-jokowi>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171027122305-78-251549/sri-mulyani-ketok-palu-naikkan-cukai-rokok-2018>.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.
- <http://lifestyle.bisnis.com/read/20170713/106/671371/kemenkes-jumlah-perokok-remaja-terus-meningkat>

**Resiliensi Kepala Keluarga Perempuan (Keppa)
dalam Memenuhi Fungsi Keluarga pada Anggota PJJl Armalah Yogyakarta**
*Resilience of Women Family Head (Keppa) in Meeting Family Functions
in Members PJJl Armalah Yogyakarta*

Rr. Christiana Mayang Anggraeni Stj¹. dan Kokom Komariah²

Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Colombo No.1, Karangmalang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,

email: rr.christiana2016@student.uny.ac.id, 087715284007.

diterima 24 Juli 2018, diperbaiki 31 Juli 2018, disetujui 23 Agustus 2018

Abstract

This study aims to describe (1) the resilience level of Keppa, (2) differences in Keppa resilience in terms of age, (3) differences in Keppa resilience in terms of education level, and (4) differences in Keppa resilience in terms of household income. This research is a quantitative research. The sampling technique using simple random sampling. The sample of research is Keppa in PJJl Armalah Association as many as 84 people. Methods of data collection using questionnaires. Data analysis techniques in this study using crosstabb analysis. The results showed that (1) The resilience level of Keppa majority was in the high category of 51 people (60,7%). (2) There is a positive and significant difference between the age level of Keppa resilience in fulfilling the family functions of PJJl Armalah Yogyakarta members. This is indicated by a significance value of 0.007 less than 0.05 ($0.007 < 0.05$). (3) There is a positive and significant difference between the level of education towards Keppa resilience in fulfilling the family functions of PJJl Armalah Yogyakarta members. This is shown from the significance value of 0.005 is smaller than 0.05 ($0.005 < 0.05$). (4) There is positive and significant difference between the income level of Keppa resilience in fulfilling the family functions of PJJl Armalah Yogyakarta members. This is shown from the significance value of 0.032 greater than 0.05 ($0.032 < 0.05$).

Keywords: *Keppa Resilience, Family Function*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) tingkat resiliensi Keppa, (2) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari usia, (3) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari tingkat pendidikan, dan (4) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari pendapatan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Sampel penelitian adalah Keppa di Perhimpunan PJJl Armalah sebanyak 84 orang. Metode pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *crosstabb*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat resiliensi Keppa mayoritas berada pada kategori tinggi sebanyak 51 orang (60,7%). (2) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat usia terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi keluarga pada anggota PJJl Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). (3) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi keluarga pada anggota PJJl Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). (4) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendapatan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi keluarga pada anggota PJJl Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih besar dari 0,05 ($0,032 < 0,05$).

Kata Kunci: *Resiliensi Keppa, Fungsi Keluarga*

A. Pendahuluan

Kekokohan suatu bangsa ditentukan oleh keluarga, karena keluarga adalah pilar kekuatan bangsa. Apabila pilar tersebut keropos, maka

landasan bangunan suatu bangsa tidak akan kokoh. Pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Berbagai tan-

tangan pembangunan bangsa muncul mulai dari pengangguran, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ekonomi global. SDM yang berkualitas perlu disiapkan melalui keluarga, karena merupakan pondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat dan bernegara.

Ketahanan keluarga (*family resilience*) penting dimiliki guna pengembangan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Menjadi orang tua dalam keluarga merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia sebagai makhluk sosial, terlebih bagi seorang istri atau ibu sebab ditangannya, akan lahir generasi hebat yang dapat menjadi kebanggaan keluarga (Harbiyallah, 2015:3).

Tidak semua keluarga menjadi keluarga utuh. Banyak keluarga yang harus mengalami perpisahan baik karena perceraian (*divorce*), kematian atau *Long Distance Single Parenting*. Tidak semua orang dapat merasakan keluarga yang sempurna seperti yang didambakan. Apabila ada ketidakcocokan atau masalah dalam keluarga, tidak jarang kedua belah pihak memilih jalan untuk bercerai. Seiring perkembangan zaman, posisi keluarga dalam sebuah rumah tangga mengalami perubahan yang tajam. Perubahan posisi anggota keluarga sering terjadi karena perceraian dan kematian masing-masing pasangan dalam rumah tangga ataupun tuntutan pekerjaan.

Perceraian (*divorce*) terjadi diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tentunya tidak terlepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Faktor tersebut diantaranya adalah moral (poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu), meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab), terus berselisih (gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan) menikah di bawah umur, penganiayaan. Beberapa faktor di atas yang menyebabkan runtuhnya keluarga dan

membuat mentalitas seorang Kepala Keluarga Perempuan (Keppa) menjadi rapuh.

Sejalan dengan maraknya kasus perceraian yang terjadi membuat sebagian besar keluarga menjadi tidak lengkap baik tanpa ayah maupun ibu. Data survei BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2016 mengalami peningkatan semula di tahun 2014 sebanyak 24.161 pasangan perihal pernikahan dengan kasus talak dan cerai 5.598 pasangan, tahun 2015 menjadi 23.734 pernikahan dengan 5220 kasus talak dan perceraian, tahun 2016 menjadi 33.521 pernikahan dengan 6781 kasus talak dan perceraian.

Tren perceraian didominasi oleh kasus gugat cerai (istri yang melakukan gugatan). Secara nasional, kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2013, sebanyak 13,4% merupakan kasus gugat cerai, dan kasus cerai talak hanya berkisar 1,09% saja. Ini berbanding terbalik dengan tren perceraian yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kecenderungan perubahan tren perceraian sebagaimana digambarkan di atas menjelaskan berbagai perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat terkait dengan posisi perempuan dalam perceraian. Dalam perilaku perceraian konvensional, perempuan cenderung menempati sebagai obyek untuk tidak menyebutnya sebagai korban perceraian.

Saat ini posisi tersebut mulai bergeser, mayoritas perempuan menempati peran sebagai subyek yang mengendalikan keputusan cerai. Berhubungan dengan maraknya perceraian yang terjadi, baik laki-laki atau perempuan akan memilih untuk menikah lagi, namun sebagian besar dari mereka yang mengalami perceraian juga merasa trauma dan tidak menikah lagi, hal ini dibuktikan dengan jumlah orangtua tunggal di Indonesia tercatat sebanyak 18,25% dari total penduduk yang menjadi orang tua tunggal (Badan Pusat Statistik, 2013). Sedangkan di Indonesia jumlah KEPPA (Kepala Keluarga Perempuan) lebih banyak dari ayah tunggal. Hal ini dibuktikan dengan persentase ibu tunggal sebesar 14,84%, jauh lebih besar dibandingkan ayah tunggal yang hanya 4,05%. (Badan Pusat Statistik, 2013).

Orang tua tunggal segala tugas dan tanggung jawabnya dilakukan seorang diri. Tugas tersebut antara lain mengasuh anak sendiri, mencari nafkah dan melakukan pengambilan keputusan penting. Menjadi orangtua tunggal adalah pilihan hidup yang tidak mudah, namun tetap harus dihargai sebagai suatu bentuk kekuatan perempuan dan laki-laki yang dapat dibanggakan. Dibalik keputusan tersebut terkandung permasalahan yang kompleks dan perjuangan amat berat bagi sang orangtua tunggal yang tidak mungkin dibahas secara gamblang di media apapun.

Meningkatnya perceraian, terutama yang diajukan perempuan jumlahnya lebih dari 2 kali lipat perceraian yang diajukan laki laki. Tahun 2016 terdapat 5.492 kasus perceraian di DIY yang diputus oleh Pengadilan Agama dan 181 kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Kemandirian, optimisme, kesejahteraan batin dan rasa syukur dalam jiwa Keppa sangat dibutuhkan untuk dapat eksis dalam menjalani hidup yang berpengaruh terhadap keberlangsungan ketahanan keluarganya.

Seorang Keppa harus mampu menjalankan peran ganda di sektor domestik, yaitu bertugas dalam urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci piring dan pakaian, membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk keluarga, merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Di sektor publik yaitu bertugas secara ekonomi agar kebutuhan tetap terpenuhi dengan mencari nafkah bagi keluarganya dan secara sosial yaitu bersosialisasi dengan masyarakat.

Keseimbangan peran domestik dan publik perlu dicapai dengan usaha ekstra melalui proses kesabaran, konsistensi, dan keyakinan yang kuat untuk menjalankannya. Bagi seorang ibu tunggal untuk bekerja mencari nafkah banyak yang harus dipertimbangkan mulai dari sumber penghasilan yang relatif, waktu yang efisien agar tetap dapat menjalankan tugas utama tanpa mengesampingkan tugas rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa Keppa menjelaskan tentang beratnya mengem-

ban tugas tersebut. Para Keppa ini terpaksa mulai bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya dengan gaji yang tidak begitu banyak. Beberapa diantaranya juga memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan mantan suaminya. Meskipun putusan perceraian mereka memberikan hak kepada Keppa untuk mendapatkan hak nafkah, hak biaya hidup dan sebagainya.

Pada anak Keppa dengan ekonomi rendah, nutrisi tidak seimbang sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Keinginan kuat untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya mampu memberikan spirit baru bagi ibu tunggal. Bagi ibu tunggal bagaimanapun beratnya tekanan yang dirasakan, hal tersebut tidak mempengaruhi tekad mereka dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Anak merupakan alasan terkuat ibu tunggal bertahan dalam keadaan yang penuh tekanan. Proses mendidik anak dalam keadaan sendiri bukan perkara hal yang mudah, tidak hanya mendidik, Keppa harus mengasuh dan membesarkan anak, tanpa anak yang mendapat *figure* seorang ayah. Di bidang pendidikan, Keppa sibuk untuk mencari nafkah sehingga pendidikan anak kurang sempurna dan tidak optimal. Dasar pendidikan agama pada anak seorang Keppa biasanya kurang sehingga anak jauh dari nilai agama. Keppa kurang bisa melindungi anaknya dari gangguan orang lain, dan bila dalam jangka waktu lama, maka akan menimbulkan kecemasan pada anak atau gangguan psikologis yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, oleh karena itu mengabaikan perlindungan terhadap anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”

Lingkungan sosial mempengaruhi kehidupan Keppa, stigma negatif yang didapat mempengaruhi mental Keppa maupun anak-anaknya. Hal-hal yang memberatkan adalah anggapan dari lingkungan yang sering memojokkan Keppa. Status janda membuat Keppa dalam keadaan tertekan akan tetapi, diharapkan Keppa memiliki resiliensi yang baik, namun pada kenyataannya masih banyak Keppa yang tidak memiliki ketahanan yang baik, cenderung kurang mampu dalam menghadapi masalah sehingga berdampak pada kehidupan sehari.

Seorang individu diharapkan dapat memahami apa yang terjadi sebagai suatu pembelajaran dan mengambil sisi positif dari permasalahan yang ada. Resiliensi sangat penting untuk menjaga kesinambungan hidup secara optimal. Kepala Keluarga Perempuan (Keppa) yang memiliki resiliensi yang tinggi akan mampu segera bangkit dan memulihkan dirinya dari keadaan buruk. Namun Kepala Keluarga Perempuan (Keppa) dengan resiliensi rendah akan cenderung membutuhkan waktu yang agak lama untuk mampu menerima dan bangkit dari cobaan hidup.

Begitu banyaknya rintangan-rintangan yang dilalui oleh keluarga yang tidak sempurna tersebut, segala urusan rumah tangga ditanggung oleh seorang *single mom*. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan anak, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sehingga melihat dari latar belakang di atas, maka penulis merasa

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ketangguhan diri (resiliensi) KEPPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) tingkat resiliensi Keppa, (2) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari usia, (3) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari tingkat pendidikan, dan (4) perbedaan resiliensi Keppa ditinjau dari pendapatan rumah tangga.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data menggunakan kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian dilakukan bulan April 2018. Lokasi penelitian berada di Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta.

Populasi penelitian adalah Kepala Keluarga Perempuan (Keppa) di Perhimpunan PJJI Armalah dengan jumlah keseluruhan anggota 150 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Sampel penelitian adalah Keppa yang hidup sendiri dengan anak usia sekolah sebanyak 84 orang.

Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis *crostabb*.

C. Tingkat Resiliensi Keppa di PJJI Armalah Yogyakarta

Hasil analisis data diketahui bahwa tingkat resiliensi Keppa dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 51 orang (60,7%), responden yang memberikan penilaian dalam kategori sedang yaitu sebanyak 33 orang (39,3%), dan tidak ada responden yang memberikan penilaian dalam

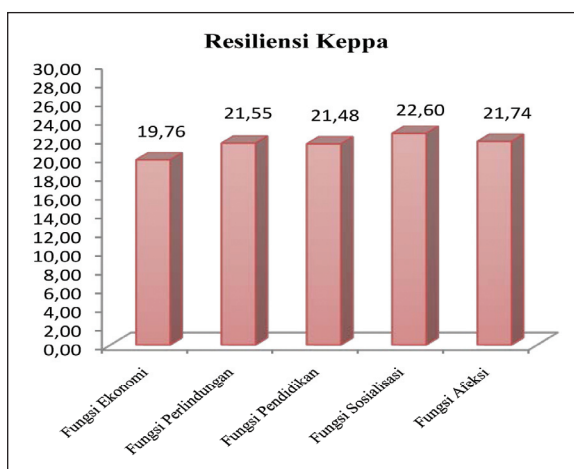
kategori rendah (0,00%). Jadi, mayoritas kecenderungan penilaian responden pada tingkat resiliensi Keppa berada pada kategori tinggi sebanyak 51 orang (60,7%). Hal ini dapat diartikan jika para Keppa menilai resiliensinya tinggi karena sepeninggal pasangan para Keppa menjadi lebih mampu memimpin keluarga dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan pada keluarganya.

Tingkat resiliensi Keppa diwakili oleh lima indikator yaitu fungsi ekonomi, fungsi perlindungan/ pemeliharaan, fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, dan fungsi afeksi. Penggambaran nilai rata-rata variabel resiliensi Keppa berdasarkan masing-masing indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Penggambaran Nilai Mean

Jumlah Butir Pernyataan	Indikator	Mean
7	Fungsi Ekonomi	19.76
7	Fungsi Perlindungan/ Pemeliharaan	21.55
7	Fungsi Pendidikan	21.48
7	Fungsi Sosialisasi	22.60
7	Fungsi Afeksi	21.74

Nilai rata-rata masing-masing sub variabel tersebut dapat digambarkan pada diagram batang berikut.



Gambar 1. Diagram Batang Nilai Mean Resiliensi Keppa

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa variabel diwakili oleh lima indikator memiliki rata-rata tertinggi pada indikator yaitu fungsi sosialisasi dengan nilai *mean* sebesar 22,60, fungsi afeksi dengan nilai *mean* sebesar 21,74, fungsi perlindungan dengan nilai *mean* sebesar 21,55, fungsi pendidikan dengan nilai *mean* sebesar 21,48, dan fungsi ekonomi dengan nilai *mean* sebesar 19,76.

Pengujian Hipotesis Tingkat Usia Terhadap Resiliensi Keppa

Adapun pengujian hipotesis perbedaan tingkat usia terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJI) Armalah Yogyakarta diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Crostabb Pada Usia

Tingkat usia terhadap resiliensi Keppa	Sig	Ket.
	0,007	Signifikan

Dari tabel di atas, hasil analisis data diketahui bahwa nilai signifikansi pada usia sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan **di-terima**. Artinya, terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat usia terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJI) Armalah Yogyakarta.

Pengujian Hipotesis Tingkat Pendidikan Terhadap Resiliensi Keppa

Adapun pengujian hipotesis perbedaan tingkat pendidikan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJI) Armalah Yogyakarta diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Crostabb pada Pendidikan

Tingkat Pendidikan terhadap resiliensi Keppa	Sig	Ket.
	0,005	Signifikan

Dari tabel di atas, hasil analisis data diketahui bahwa nilai signifikansi pada pendidikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$), maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan **diterima**. Artinya, terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta.

Pengujian Hipotesis Tingkat Pendapatan Terhadap Resiliensi Keppa

Adapun pengujian hipotesis perbedaan tingkat pendapatan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Crostabb Pada Pendapatan

Tingkat Pendapatan terhadap resiliensi Keppa	Sig	Ket.
	0,032	Signifikan

Dari tabel di atas, hasil analisis data diketahui bahwa nilai signifikansi pada pendidikan sebesar 0,032 lebih besar dari 0,05 ($0,032 > 0,05$), maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan **diterima**.

Tingkat Resiliensi Keppa dalam Memenuhi Fungsi-Fungsi Keluarga di PJJI Armalah Yogyakarta

Hasil analisis data tentang tingkat resiliensi Keppa di PJJI Armalah Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa responden yang memberikan penilaian terhadap variabel tingkat resiliensi Keppa dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 51 orang (60,7%), responden yang memberikan penilaian dalam kategori sedang yaitu seba-

nyak 33 orang (39,3%), dan tidak ada responden yang memberikan penilaian dalam kategori rendah (0,00%). Jadi, mayoritas kecenderungan penilaian responden pada tingkat resiliensi Keppa berada pada kategori tinggi sebanyak 51 orang (60,7%). Hal ini dapat diartikan jika para Keppa menilai resiliensinya tinggi karena sepeninggal pasangan para Keppa menjadi lebih mampu memimpin keluarga dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan pada keluarganya.

Keppa adalah suatu keadaan seseorang dimana menyebut perempuan yang berperan ganda, sebagai ibu sekaligus ayah. Julia Cleves Mosses (2007:55 dalam Ernawati, 2013:97) menjelaskan jika Keppa (Kepala Keluarga Perempuan) yaitu perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal menghidupi keluarganya, bertanggungjawab baik secara ekonomi maupun sosial terhadap keluarganya.

Keppa resiliensi menjadi penting karena resiliensi adalah keberhasilan individu menghadapi tekanan yang terjadi. Resiliensi memiliki makna yang luas dan beragam, mencakup kepulihan dari masa traumatis, mengatasi kegagalan dalam hidup, dan menahan stres agar dapat berfungsi dengan baik dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Hal ini sejalan dengan teori Ana Setyowati (2010: 69) yang menyebutkan jika resiliensi adalah kemampuan individu untuk mengatasi tantangan hidup serta mempertahankan kesehatan dan energi yang baik sehingga dapat melanjutkan hidup secara sehat.

Teori Ana Setyowati (2010: 69) dapat dijelaskan jika resiliensi pada wanita dalam menghadapi kehidupan setelah kehilangan pasangan, melibatkan pentingnya memaknai serangkaian peristiwa yang terjadi, sehingga muncul keinginan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya dengan rasa optimis. Selain itu, resiliensi juga ditunjukkan dengan adanya pembentukan tujuan-tujuan baru sebagai seorang wanita maupun sebagai orang tua tunggal, yang melibatkan adanya *control*, *commitment*, dan *challenge*.

Resiliensi juga erat kaitannya dengan munculnya kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki wanita sepeninggal pasangan. Selain itu, wanita menjadi lebih mampu memimpin keluarga dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan, serta menjalin hubungan yang lebih erat dengan anak-anak sebagai support system bagi satu sama lain setelah kematian suami sekaligus ayah dalam sebuah keluarga. Ketahanan keluarga (*family resilience* atau *family strenght*) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas suatu ketahanan sumberdaya, strategi *coping* dan "*appraisal*". Hal ini sejalan dengan teori McCubbin et al. (1988 dalam Herien Puspitawati 2013:3) yang menyatakan jika ketahanan keluarga (*family resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga.

Perbedaan Tingkat Usia Terhadap Resiliensi Keppa

Hasil penelitian dapat disimpulkan jika terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat usia terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). Hasil penelitian juga menemukan jika usia dewasa akhir merupakan usia yang dianggap paling tinggi dalam penanganan resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta.

Menurut Notoatmodjo (2003) mengatakan bahwa usia merupakan variabel yang selalu diperhatikan dalam penelitian-penelitian epidemiologi yang merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pengetahuan dan kematangan mental. Singgih (1998) mengemukakan bahwa makin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik. Teori Singgih (1998) tersebut sejalan dengan

temuan penelitian yang menemukan jika pada usia dewasa akhir merupakan usia yang dianggap paling tinggi dalam penanganan resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta.

Pentingnya usia dalam mengatasi resiliensi keluarga bukan hanya kemampuan mengatasi dan bertahan terhadap tekanan akibat keterpurukan tetapi mampu mengubah kesulitan yang dialami menjadi peluang mengembangkan keluarga dan hubungan terhadap orang lain. Hal ini sejalan dengan teori Alrisa Naufaliasari dan Fitri Adriani (2013:267) yang menjelaskan jika seorang wanita yang ditinggal oleh suami dan memiliki beban psikologis yang berat, menyang status baru dengan stigma negatif namun dapat kembali bangkit dari keterpurukan dengan mengambil sisi positif dari dukungan sosial yang didapat.

Perbedaan Tingkat Pendidikan Terhadap Resiliensi Keppa

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). Hasil penelitian juga menemukan jika pendidikan SMA merupakan tingkat pendidikan yang dianggap paling tinggi dalam penanganan resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan SMA dapat lebih fleksibel memasuki dunia kerja tanpa perlu gengsi dengan gelar sarjana maupun diploma yang disandangnya. Ibu fokus pada pencarian kerja yang halal dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Pendidikan adalah kegiatan secara sadar dalam proses belajar dan pembelajaran untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya yaitu yang berkepribadian dan terjadinya perubahan yang positif dalam diri individu peserta didik yang berlangsung secara terus menerus. Menurut Redja Mudyahardjo (2012:3-6), “pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal”.

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang bertanggungjawab, yang mampu memanfaatkan potensi yang ada dalam diri dan lingkungan sekitar untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat menjadi pendorong kearah kemajuan. Hal ini diartikan jika pendidikan menjadi landasan pembentuk pola pikir dalam menghadapi permasalahan hidup. Semakin tinggi pendidikan Keppa diharapkan semakin baik analisisnya dalam menjalani persoalan hidup. Semakin tinggi pendidikan diharapkan Keppa memperoleh pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak menyita seluruh waktu dan tenaga, tetapi pekerjaan yang dapat dibagi waktunya untuk mengasuh dan mendidik anak. Terutama untuk Keppa yang merupakan orangtua tunggal yang hidup tanpa didampingi oleh seorang suami yang seharusnya menjadi teman diskusi.

Perbedaan Tingkat Pendapatan Terhadap Resiliensi Keppa

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendapatan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih besar dari 0,05 ($0,032 < 0,05$). Hasil penelitian juga menemukan jika pendapatan sebesar Rp. 1.330.000,- sampai dengan Rp 3.990.000,- merupakan tingkat pendapatan

yang dianggap paling tinggi dalam penanganan resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta. Hal ini dikarenakan pendapatan sebesar Rp. 1.330.000,- sampai dengan Rp 3.990.000,- sesuai dengan pendapatan dengan tingkat pendidikan SMA di kota Yogyakarta.

Menjadi Keppa bagi seorang ibu tentu memiliki kesulitan tersendiri, dimana ia beserta anak-anaknya harus bisa memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat dan mereka harus bisa melewati itu semua tanpa adanya seorang kepala keluarga lagi. Begitu banyaknya rintangan-rintangan yang dilalui oleh keluarga tersebut, segala urusan rumah tangga di tanggung oleh seorang ibu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan anak, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Usaha-usaha apa saja akan dilakukannya agar keluarga dapat hidup dengan kerja apa saja akan dilakukannya oleh status orangtua tunggal ini.

Ibu akan menggantikan semua tanggung jawab ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, baik itu dalam memenuhi kebutuhan materi maupun kebutuhan kasih sayang orang tua pada anaknya, kondisi tersebut akan sulit dijalani oleh seorang ibu, ibu sepenuhnya menjadi tulang punggung keluarga, ibu juga harus bekerja ekstra dalam memperhatikan pendidikan anaknya sehingga anaknya bisa menjadi anak yang sukses yaitu berhasil dalam dunia pendidikan dan bisa mendapatkan pekerjaan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya.

Hal ini sejalan dengan teori Rahim (2006 : 35) menyebutkan bahwa ibu tunggal yang juga didefinisikan sebagai Keppa sebagai ibu yang menanggung anak-anak berumur sekitar 16 tahun atau 19 tahun kebawah yang masih berada dibawah tanggungan dan mendapat *self esteem* sepenuhnya tanpa kehadiran pasangan masing-masing dalam hidup. Ibu tunggal didefinisikan sebagai seorang ibu yang memikul tanggung jawab mendidik, membimbing, menjaga dan membiayai dan membesarkan anak-anaknya tanpa keterlibatan aktif seorang suami.

Menjadi ibu tunggal dituntut untuk mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada dalam keluarganya sepeeninggal suaminya. Pentingnya pendapatan dalam penanganan resiliensi sejalan dengan teori Rinaldi (2010: 100) yang mengemukakan bahwa resiliensi adalah keberhasilan individu menghadapi tekanan yang terjadi.

Resiliensi memiliki makna yang luas dan beragam, mencakup kepulihan dari masa traumatis, mengatasi kegagalan dalam hidup, dan menahan stres agar dapat berfungsi dengan baik dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Resiliensi berarti juga pola adaptasi yang positif dalam situasi yang sulit. Artinya, ketika ada ketimpangan dalam pencarian nafkah setidaknya pendapatan yang cukup akan mampu meminimalisir permasalahan yang akan muncul kedepannya yang tidak di duga-duga oleh ibu dan keluarga.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terkait resiliensi responden menjadi Keppa ditinjau dari konteks pemenuhan fungsi keluarga pada cara mengatur pengeluaran bulanan mayoritas mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan sebanyak 64 responden (76,19%). Hal ini dikarenakan responden tersebut merupakan satu-satunya sumber finansial yang akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarganya sehingga kebutuhan primer seperti makan, membayar sekolah, membayar listrik, uang ronda, serta jika ada acara di lingkungan sekitar warga menjadi prioritas utama dibandingkan dengan keperluan lain yang tidak penting dan mendesak.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Erma Yuliani Saputri (2016: 219) yang menjelaskan jika orangtua mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melakukan pengaturan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua, dan sebagainya.

D. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat resiliensi Keppa mayoritas berada pada kategori tinggi sebanyak 51 orang (60,7%). (2) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat usia terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota PJJl Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). (3) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota PJJl Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). (4) Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara tingkat pendapatan terhadap resiliensi Keppa dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga pada anggota PJJl Armalah Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,088 lebih besar dari 0,05 ($0,032 < 0,05$).

Hasil penelitian diketahui bahwa dari ibu yang menjadi Keppa mengalami kesulitan/hambatan ketika mendidik anak terutama dalam menasihati anak karena tidak penurut. Oleh karena itu, ibu yang menjadi Keppa disarankan lebih banyak menjalin komunikasi dengan anak, bicara apa adanya dan sejujurnya tentang situasi kondisi yang dialami sehingga anak akan semakin mudah serta menjadi penurut dalam menerima keadaan keluarganya.

Bagi pemerintah hendaknya penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di seleksi kembali supaya manfaat yang diterima benar-benar sampai kepada Keppa yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Ucapan Terimakasih

Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana UNY yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Ke dua kepada anggota PJJl Armalah Yogyakarta yang bersedia mengisi angket dan meluangkan waktunya untuk diwawancara. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-

persatu yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Alrisa Naufaliasari dan Fitri Adriani. (2013). Resiliensi pada Wanita Dewasa Awal Pasca Kematian Pasangan. *Jurnal Psikologi Indutri dan Organisasi* Vol. 2 No.2 Agustus 2013. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ana Setyowati, Sri Hartati, dan Dian Ratna Sawitri. (2010). Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Resiliensi Pada Siswa Penghuni Rumah Damai. *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 7, No. 1, April 2010. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Budi, Deny Hertanto. (2011). Upaya Meningkatkan Kualitas Kuliah Jaringan Komputer Melalui Penerapan Media Pembelajaran Packet Tracer 5.0. *Vol 20. No 1. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Depdiknas. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Kemendiknas
- Ernawati. (2013). Menyibak Perempuan Kepala Keluarga. *Jurnal Muwazah* Vol. 5, No 2. Pekalongan: PSG STAIN Pekalongan.
- Gunarsa, Singgih. Dkk. (1998). *Psikologi Olahraga Teori dan Praktik*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Hasbiyallah. (2015). *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Herien Puspitawati. (2013). Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Bogor: IKK Fema IPB.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV. Lintas Kharulistiwa
- Kemis & Ati Rosnawati. (2013). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita*. Jakarta. PT. Luxima Metro Media.
- Notoatmadjo. (2003). *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991. Tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Redja, Mudyahardjo. (2012). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahim, dkk. (2006). *Krisis dan Konflik Institusi Keluarga*. Kualalumpur: Maziza SDN, BHD.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017

Evaluation on Regional Government Policy in Solving the Problem of Indonesian Migrant Workers in East Lombok District in Year 2015-2017

Siti Hidayatul Jumaah¹, Rahmawati Husein²

Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, Jln. Brawijaya Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Telp (0274) 387646, email: hidayatulu@gmail.com, HP. 082340087379
diterima 17 Mei 2018, diperbaiki 23 Juli 2018, disetujui 03 Oktober 2018

Abstract

East Lombok is the region with the largest number of migrant workers. The main factor that drives the high number of migrant workers (TKI) is the economic factor; namely, working abroad can solve various economic problems of TKI's family. On the other hand, the sending of migrant workers also has some negative impact as seen from various problems suffered by the workers since pre, during, until post placement. This article aims to evaluate the implementation of local policies in overcoming the problems of migrant labors. This study used qualitative method in which the data collected was gained by conducting interviews and FGD. The results showed that from the business evaluation point of view, it was found out that; the allocation of human resources who worked and handled the migrant labors was at low quality and small quantity, from the handling time of migrant workers issues, it was noticed that it was conducted in time-consuming and slow action, and the expenses allocation point of view, it showed the incapability of the authorities in making use of high allocated budget. The evaluation on the process of handling the issues showed that the policies implementation was neither effective nor efficient. From the achieved results evaluation, it showed that the authorities had not handled the issues optimally as there were a lot of migrant issues that had not been handled and settled yet. And from the evaluation on impact point of view, it proved that the implementation of policies had not brought significant resolution on migrant workers issues yet. Based on these facts, it is recommended that the local government improves it by adding a comprehensive regulation on workers brokerage (=Calo/Tekong) and that of procedures in forwarding complaints, in enhancing human resources competences of the authorities and in tightening more on monitoring the use of the allocated budget.

Keywords: *policy evaluation; problems of migrant workers; protection; impact.*

Abstrak

Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar. Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah TKI adalah faktor ekonomi, yaitu bekerja di luar negeri mampu memecahkan berbagai permasalahan ekonomi keluarga. Disisi lain, pengiriman TKI juga memiliki dampak negatif yang dilihat dari banyaknya masalah yang menimpa para TKI sejak pra, selama, hingga pasca penempatan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan TKI. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi usaha ditemukan; alokasi SDM yang digunakan rendah secara kuantitas dan kualitas, alokasi waktu menunjukkan proses penanganan masalah TKI yang lambat, dan alokasi biaya menunjukkan ketidakmampuan pelaksana kebijakan dalam memanfaatkan tingginya anggaran yang ada. Evaluasi proses ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif dan efisien. Evaluasi hasil menunjukkan hasil yang belum optimal sebab banyak permasalahan TKI yang belum dapat diselesaikan. Evaluasi dampak, ditemukan bahwa: pelaksanaan kebijakan belum menghasilkan dampak yang signifikan pada penyelesaian masalah TKI. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah menambah regulasi mengenai calo/tekong dan regulasi mengenai prosedur untuk melakukan pengaduan, meningkatkan kompetensi SDM, dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

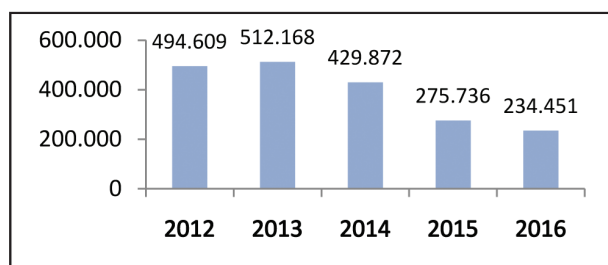
Kata Kunci: evaluasi kebijakan; masalah TKI; perlindungan; dampak.

A. Pendahuluan

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, sebagaimana BPS menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia mencapai angka 5,33 persen atau 7,01 juta orang. Tingginya angka tersebut menyebabkan perlu adanya sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran, salah satunya adalah dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Data dari BNP2TKI menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) jumlah TKI cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium pengiriman TKI di dua Negara, yaitu Arab Saudi dan Malaysia. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terbilang besar. Berikut adalah grafik pengiriman TKI tahun 2011-2016.

Grafik 1. Jumlah Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2012-2016



Sumber: (LAKIPBNP2TKI, 2016)

Dari keseluruhan jumlah pengiriman TKI, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengirim TKI terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total penempatan TKI asal NTB pada tahun 2016 mencapai 40.415 orang, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki sebesar 33.827 orang dan perempuan 6.588 orang. Sementara itu, berdasarkan 25 kabupaten-kota di Indonesia, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penempatan terbesar, yaitu mencapai 19.274 orang di tahun 2016. Berikut adalah tabel penempatan TKI di

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016, yaitu:

Tabel 1. Penempatan TKI Asal Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Total
1.	2012	19.936
2.	2013	33.287
3.	2014	29.510
4.	2015	25.772
5.	2016	19.274
Total		127.779

Sumber: (LAKIP BNP2TKI, 2016)

Tingginya jumlah pengiriman TKI ke luar negeri akan berdampak pada jumlah remitansi yang diterima oleh pemerintah di daerah asal. BNP2TKI mencatat jumlah remitansi yang dihasilkan TKI pada tahun 2015 mencapai angka US\$9,429 atau kurang lebih Rp 98,015 triliyun, sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah US\$ 8,85. Sementara itu, sebagai daerah dengan jumlah penempatan TKI yang terbesar, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah remitansi yang diterima oleh pemerintah daerah NTB pada tahun 2016 mencapai Rp 1,76 triliyun, dan pada bulan Maret 2017 mencapai Rp 347,9 milyar dengan penyumbang terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur sebanyak Rp 67 milyar atau 24,71%, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah Rp 62 milyar atau 22,60%, Kabupaten Sumbawa Rp 34 milyar, Lombok Barat Rp 24 milyar, dan Kota Bima Rp 2 milyar (www.suarantb.com, 2017).

Selain berdampak positif pada penerimaan negara dan daerah asal, remitansi yang dihasilkan oleh para TKI juga mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi keluarga, misalnya: untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga, kebutuhan pendidikan anak, bahkan juga kebutuhan untuk membangun atau merenovasi rumah. Selain itu, remitansi yang dibawa TKI juga tidak hanya berupa uang atau materi, tetapi juga berupa wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja yang

nantinya akan bermanfaat bagi TKI itu sendiri (Novianti, 2016).

Disisi lain, pengiriman TKI juga tidak terlepas dari dampak negatif. Dampak negatif dirasakan langsung oleh individu yang menjalaninya sangat beragam, mulai dari adanya masalah seperti gaji yang tidak dibayarkan, penganiayaan, bahkan sampai pelecehan seksual.

Dari masalah tersebut, NTB menduduki peringkat ke 2 (dua) setelah Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pengaduan terbesar, yaitu mencapai 2.478 pengaduan dalam kurun waktu 2011-2016. Sementara itu, jumlah pengaduan berdasarkan 25 kabupaten/kota, Lombok Timur menempati posisi ke-8 (delapan) dengan total pengaduan dari tahun 2011-2016 sebesar 577. Permasalahan yang paling banyak dialami oleh para TKI asal Lombok Timur adalah masalah deportasi dari negara tujuan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen (TKI

berangkat melalui jalur non-prosedural/ilegal) dan TKI sudah melampaui batas waktu tinggal (*overstay*).

Sebagai daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar, Provinsi NTB pada dasarnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur juga telah memberikan upaya perlindungan kepada para TKI dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan, dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur. Meskipun demikian, upaya tersebut nyatanya tidak mengurangi permasalahan yang terjadi, bahkan permasalahan TKI di Lombok Timur cenderung meningkat.

Masih tingginya permasalahan TKI di Lombok Timur dapat dilihat dari banyaknya TKI yang berangkat melalui jalur non prosedural (ilegal), sehingga banyak dari mereka kemudi-

Tabel 2. Kasus/Permasalahan TKI Asal Lombok Timur saat Bekerja di Luar Negeri

Nama/Tempat Bekerja	Kasus/Masalah
2011: Saripatun Hikmah (Yordania)	- Meninggal dunia di Yordania karena sakit, - walnya akan berkerja di Malaysia, namun dialihkan ke Yordania tanpa alasan yang jelas, - Berangkat melalui jalur ilegal (calo) yang ada di Lombok, kemudian diserahkan ke PPTKIS yang ada di Jawa.
2012: Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon (Malaysia)	Meninggal dunia akibat tembakan aparat Malaysia, dan saat diotopsi ketiganya juga sudah kehilangan organ tubuhnya.
2015: Norfia Linda (Malaysia)	- Mengalami penyiksaan dan dibuang ke hutan oleh majikannya. - Dijanjikan gaji 800 Ringgit per bulan (sekitar Rp. 2,8 juta), namun gaji tersebut belum dibayar karena Norfia baru bekerja selama 1 bulan, bahkan gaji untuk 3 bulan pertama digunakan untuk membayar biaya calo pengiriman TKI. - Menjadi TKI ilegal (non-prosedural) dengan menggunakan visa turis.
2016: Samsudin, dan Ahmad Suparlan (Malaysia)	- Menjadi korban kapal tenggelam yang mengangkut TKI untuk menyeberang dari Malaysia menuju Batam, kepulauan Riau. - Melampaui izin tinggal (<i>oversaty</i>) di Malaysia sehingga pulang melalui jalur ilegal
2017: Sehabudin (Amaq Enul) (Malaysia)	Merupakan TKI ilegal, dan menjadi korban kriminalitas salah satu rekannya
2017: Nape Urohman Mahuni (Malaysia)	Merupakan TKI non prosedural, dan mengalami patah tulang dan cacat seumur hidup akibat kecelakaan lalu lintas saat bekerja di Malaysia

Sumber: *Olah data sekunder*

an mendapat masalah di negara tempat mereka bekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mencatat jumlah TKI ilegal yang kemudian dideportasi dari Malaysia mencapai 3.310 orang pada tahun 2014, dan jumlah tersebut didominasi oleh TKI asal Lombok Timur sebanyak 1.324 orang (DPR, 2015). Sementara itu, pada Januari 2017, Disnaker menyebutkan sebanyak 348 orang TKI dideportasi karena memiliki dokumen pemberangkatan yang prosedural (ilegal), kemudian pada Februari hingga Juli 2017, 763 orang TKI dipulangkan karena *overstay*, dan sebagian besar diantaranya adalah TKI asal Lombok Timur, yaitu 490 TKI dan 62 TKW (Suara NTB, 2017).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur, dan menganalisis bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap permasalahan TKI baik permasalahan yang dirasakan oleh individu TKI maupun keluarga TKI. Selain itu, dari sisi teoritik, penelitian ini juga mencoba untuk menjawab kekurangan dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya lebih banyak membahas objek TKI itu sendiri, dan membahas kebijakan TKI yang berada di pusat. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji kebijakan pemerintah di level daerah (khususnya tingkat kabupaten), dimana kajian tersebut bersifat dua arah, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Ditinjau dari permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di daerah dengan kantorng TKI terbesar, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang

berkaitan dengan masalah penelitian, meliputi: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, BP3TKI Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Desa, PPTKIS, dan NGO yang fokus pada permasalahan buruh migran.

Sementara itu, *Focus Group Discussion* (FGD) baik terhadap individu TKI maupun eks-TKI yang telah berangkat dari tahun 2012 dan pernah mengalami masalah selama proses migrasi (pra, selama, maupun pasca penempatan). FGD ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pandangan dari individu TKI terkait masalah yang dihadapi, proses penyelesaian masalah, dan tanggapan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

FGD dilaksanakan di Kecamatan Terara dengan asumsi bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah TKI terbesar yaitu mencapai 7,19 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur. Jumlah peserta FGD yaitu 15 orang dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni terlebih dahulu meminta rekomendasi dari beberapa pihak, yaitu pemerintah desa dan LSM. Setelah menemukan kriteria peserta yang sesuai, maka peserta tersebut selanjutnya merekomendasikan warga lain untuk bergabung dalam FGD.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) yang terdiri dari: *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion darwing/verivication*.

C. Hasil dan Pembahasan Evaluasi Kebijakan

Anderson mengartikan evaluasi kebijakan, yakni kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implentasi, dan dampak. Dari definisi tersebut, Winarno kemudian memandang evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan fungsional yang

tidak hanya dilakukan pada tahap akhir dalam proses kebijakan, melainkan juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan (Winarno, 2012).

Subarsono (2011) selanjutnya memaparkan tujuan evaluasi kebijakan publik secara lebih rinci, yakni: a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan; c) mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, yakni mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan; d) mengukur dampak suatu kebijakan, baik positif maupun negatif; e) untuk mengetahui apabila ada penyimpangan dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; dan f) sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Sementara itu, Howlet dan Ramesh (dalam Nugroho, 2012) mengelompokkan evaluasi kebijakan menjadi tiga, yaitu Evaluasi administratif, evaluasi judisial dan evaluasi politik. Evaluasi administratif adalah evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif - anggaran, efisiensi biaya - dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi *input* program yang dikembangkan oleh kebijakan; *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan; *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan; *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut; dan *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

Evaluasi judisial adalah evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran konstitusi, sistem hu-

kum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Evaluasi politik menilai sejauhmana penerimaan konstituen terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Selain itu, Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003) menyebutkan empat indikator utama untuk mengevaluasi kebijakan, yaitu pertama Indikator *Input* (masukan) memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya; kedua Indikator *Process* (proses), memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu; ketiga Indikator *Output* (keluaran), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya, berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu; dan keempat Indikator *Outcome* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Berdasarkan teori kebijakan yang telah dipaparkan, maka evaluasi kebijakan dalam tulisan ini menggunakan teori Howlet dan Rames yang dikolaborasikan dengan teori Bridgman dan Davis. Penggabungan dari kedua teori ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif, mulai dari evaluasi usaha yang menilai *input* kebijakan, evaluasi proses, evaluasi hasil yang menilai *output* kebijakan, dan evaluasi dampak yang menilai manfaat dari adanya kebijakan.

Evaluasi Usaha

Input Sumber Daya Manusia. Dalam rangka mencapai hasil kebijakan publik yang maksimal, maka diperlukan SDM yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pertama, secara kuantitas jumlah SDM yang menanganani masalah TKI di Disnakertrans

Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGKAT/GOL.	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL
SD : 1	I : 2	Eselon II/b : 1	Fungsional Instruktur : 7
SLTP : 1	II : 17	Eselon III/a : 1	
SLTA : 20	III : 25	Eselon III/b : 3	
D.I – D.III : -	IV : 8	Eselon IV/a : 10	
D.IV : 1		Eselon IV/b : 1	
S.1 : 25		Eselon V/a : -	
S.2 : 4		Eselon V/b : -	
S.3 : -			
Jumlah : 52	Jumlah : 52	Jumlah : 45	

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

Dari jumlah SDM di Disnakertrans, hanya ditugaskan tiga personil untuk mengurus masalah penempatan maupun perlindungan. Tiga personil tersebut terdiri dari satu orang kepala seksi, dan dua orang staf yang mengurus administrasi dan wawancara TKI. Jika dilihat dari tingginya jumlah penempatan dan permasalahan TKI di Lombok Timur, maka *input* SDM tersebut sangat kurang karena tidak sebanding dengan permasalahan yang ada.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, Disnakertrans tidak dapat bekerja sendiri, karena penyelesaian kasus yang ada di Disnakertrans terbatas pada kasus tertentu, sehingga Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram juga memiliki peranan yang penting. Berikut jumlah SDM yang bertugas untuk melakukan perlindungan TKI.

Tabel 4. Jumlah Sumber Daya Manusia BP3TKI Mataram

Bagian/Seksi	Jumlah	Pangkat/Gol				Struktural		Status Kepegawaian	
		I	II	III	IV	ES.III	ES IV	PNS	CPNS
Kepala BP3TKI	1	-	-	-	1	1		1	-
Sub. Bagian Tata Usaha	7	-	-	7	-	-	1	7	-
Seksi Penyiapan Penempatan	9	-	-	9	-	-	1	9	-
Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan	7	-	1	6	-	-	1	7	-
Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program	4	-	-	4	-	-	1	4	-
Total	28	-	1	26	1	1	4	28	-

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram

Dari data di atas, jumlah SDM BP3TKI Mataram yang khusus mengatasi masalah TKI terdiri dari tujuh personil, sehingga jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang masuk untuk setiap bulannya, yaitu mencapai 50 kasus TKI (Lakip BP3TKI Mataram, 2017).

Kedua, dari sisi kualitas SDM baik yang ada di Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram memiliki kemampuan yang rendah, dimana mereka cenderung hanya menjalankan tugas dan fungsi yang sudah ditentukan tanpa adanya motivasi untuk melakukan inovasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih

efektif. Selain itu, rendahnya kemampuan SDM untuk memahami kondisi negara penempatan menjadi salah satu kendala untuk melakukan mediasi maupun advokasi dalam penanganan masalah TKI selama penempatan.

Winarno (2012) menyebutkan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan SDM baik melalui penambahan jumlah personil, maupun dengan meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Input Waktu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam mengatasi masalah TKI membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bagian khusus untuk mengaduan baik dari Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram yang ada di Lombok Timur (Wawancara NGO, 21 Maret 2018). Selain itu, dalam melakukan pelaporan, kurangnya data TKI yang mengalami masalah, terutama TKI non prosedural menjadi kendala untuk mempercepat proses penyelesaian masalah (Wawancara BP3TKI Mataram, 19 Maret 2018). Disisi lain, rendahnya jumlah SDM sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya juga turut mempengaruhi lambatnya penanganan masalah TKI.

Penting untuk menambah *input* SDM baik secara jumlah maupun secara kompetensi, dengan tujuan agar penyelesaian masalah TKI dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Disamping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama bersama BP3TKI Mataram dalam rangka menciptakan ruang pengaduan yang bisa dijangkau dengan mudah dan cepat oleh para TKI yang mengalami masalah.

Input Biaya. Dilihat dari *input* biaya yang dialokasikan menunjukkan jumlah yang cukup besar, namun ketika dianalisis, ditemukan bahwa *input* anggaran belum dimanfaatkan secara

maksimal untuk menjalankan kebijakan penanganan masalah TKI, sebab masih rendahnya tingkat serapan anggaran baik oleh Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram.

Tabel 5. Penyerapan Anggaran Penanganan Masalah TKI oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2018

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2015	56.927.000	36.282.800	63,74%
2016	85.000.000	57.344.000	67,46%
2017	125.402.000	123.912.000	98,81%

Sumber: Olah Data Sekunder.

Tabel 6. Penyerapan Anggaran Penanganan Masalah TKI di BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2015	6.289.009.000	3.828.737.993	60,88%
2016	1.992.510.000	1.627.621.341	81,69%
2017	3.368.709.000	2.468.095.755	73,27%

Sumber: Olah Data Sekunder.

Tingginya serapan anggaran oleh Disnakertrans tahun 2017, disebabkan oleh adanya reformasi struktur organisasi, dimana awalnya Disnakertrans digabung dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, sedangkan serapan anggaran tertinggi di BP3TKI Mataram pada tahun 2016 disebabkan oleh penghematan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, sehingga BP3TKI harus merincikan anggaran secara lebih jelas dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Dengan demikian, adanya reformasi birokrasi dan rincian anggaran yang jelas berpengaruh pada arah penggunaan anggaran.

Pemaparan tersebut sesuai dengan Kuswoyo (2011) yang menyebutkan bahwa serapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang dimaksud adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk merealisasikan semua rencana kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Semakin jelas perencanaan

anggaran, maka pelaksanaannya akan semakin maksimal, sehingga tingkat serapan anggaran akan semakin tinggi. Dengan demikian, maka pemerintah perlu merencanakan anggaran yang baik dimana rincian peruntukkan dan pelaksanaan anggaran harus dirincikan secara jelas guna mencapai serapan anggaran yang tinggi sehingga tercapai pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang menilai efektifitas dan efisiensi dari metode pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur. Efektifitas yang dimaksud adalah sejauh mana metode pelaksanaan kebijakan yang digunakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari metode pelaksanaan suatu kebijakan.

Efektifitas. Perda No. 12/2006 telah mengatur mengenai perlindungan yang dapat diberikan kepada para TKI yang mengalami masalah baik sebelum, selama, ataupun setelah penempatan, yaitu a) Perlindungan melalui prosedur yang dilaksanakan saat pra, selama, dan purna penempatan; b) Perlindungan melalui Asuransi; c) Perlindungan melalui Pengaturan Biaya; d) Perlindungan melalui Pembelaan TKI; dan e) Perlindungan melalui Penyelesaian Sengketa TKI

Dalam rangka melaksanakan aturan tersebut, Disnakertrans telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur. *Pertama*, meningkatkan informasi pasar kerja di luar negeri yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah TKI yang berangkat secara non prosedural, juga untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap calo/tekong dalam memberikan informasi pekerjaan di luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode ini belum efektif untuk me-

ngatasi masalah TKI di Lombok Timur. Hal ini disebabkan oleh pemberian informasi tersebut hanya disampaikan melalui pengumuman di depan kantor Disnakertrans dan pengumuman kepada pemerintah desa melalui surat. Dengan demikian, informasi tidak sampai secara maksimal kepada masyarakat, sebagian besar para TKI memilih calo/tekong untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri. Perda No. 12/2006 telah mengamanatkan bahwa disnakertrans harus memberikan informasi dan melakukan pendataan TKI bekerjasama dengan pemerintah desa.

Hal tersebut diperkuat hasil FGD yang menunjukkan bahwa pemberian informasi pasar kerja oleh calo/tekong jauh lebih rinci, dimana mereka dijelaskan mengenai jenis pekerjaan, gaji, dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, peserta FGD juga mengaku bahwa pemberian informasi tersebut dilakukan di rumah masing-masing, sehingga menjadi TKI melalui calo/tekong dirasa jauh lebih mudah.

Kedua, melakukan kerjasama dengan pihak imigrasi untuk memudahkan pengurusan dokumen TKI. Kerjasama ini dilakukan dengan membangun sebuah Unit Layanan Pembuatan Paspor (ULP) di Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ULP Lombok Timur nyatanya belum memberikan hasil yang efektif bagi penanganan masalah TKI, sebab dalam pengurusan dokumen TKI, lebih banyak dilakukan oleh calo/tekong yang memberangkatkan TKI ke luar negeri.

Ketiga, memberikan perlindungan melalui prosedur baik pada saat pra, selama, dan purna penempatan yang dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan. Kedua perjanjian tersebut dapat memudahkan TKI dalam meminta tanggungjawab dari PPTKIS apabila terjadi masalah selama penempatan TKI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut juga belum efektif untuk mengatasi permasalahan TKI. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tanggungjawab dari calo maupun

PPTKIS ketika para TKI mengalami masalah (FGD Individu TKI, 2018).

Selain itu, dilihat dari sisi regulasi, Perda No. 12/2006 hanya mengatur mengenai tanggungjawab pihak PPTKIS, belum mengatur mengenai tanggungjawab calo/tekong, padahal mayoritas masyarakat berangkat menjadi TKI melalui calo/tekong. Kurangnya aturan mengenai calo/tekong menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban ketika terjadi masalah selama penempatan.

Rendahnya *monitoring* dan pengawasan terhadap TKI saat sampai dinegara tujuan juga menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya perlindungan TKI melalui prosedur. Perda No. 12/2006 telah mengamanatkan bahwa Disnaker dan PPTKIS harus melakukan *monitoring* perkembangan TKI selama penempatan. Pihak PPTKIS juga diharuskan untuk melapor secara berkala, yaitu setiap enam bulan sekali kepada Disnaker terkait perkembangan TKI pada saat sudah sampai di negara penempatan.

Keempat, penanganan masalah TKI melalui asuransi. Metode ini juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dilihat dari hasil FGD yang menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta tidak menerima asuransi ketika mengalami masalah. Lebih lanjut, mereka menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam melakukan klaim asuransi adalah ketidaktahuan tentang proses dan mekanisme yang harus ditempuh untuk memperoleh asuransi tersebut, sebab mayoritas mereka memiliki tingkat pendidikan rendah. Selain itu, kurangnya peran pemerintah dalam membantu proses klaim asuransi juga menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya penanganan masalah TKI melalui pemberian asuransi.

Kelima, melakukan pembelaan terhadap TKI bermasalah dan penyelesaian sengketa TKI. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan

bahwa metode ini juga belum menunjukkan hasil yang efektif untuk mengatasi masalah TKI. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya; 1) masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pengaduan, mengingat latar belakang pendidikan TKI rendah sehingga pemerintah kesulitan untuk memberikan pembelaan, 2) terbatasnya peran Disnakertrans dalam melakukan pembelaan terhadap TKI, dimana kasus TKI yang masuk ke Disnakertrans hanya terbatas pada kasus tertentu, misalnya kasus pemalsuan dokumen.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan beberapa metode sesuai dengan amanat Perda No. 12/2006, namun dalam pelaksanaannya belum memberikan hasil yang efektif untuk mengatasi permasalahan TKI.

Selain disnakertrans, salah satu lembaga khusus yang berperan dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur adalah BP3TKI Mataram. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram untuk mengatasi permasalahan TKI,

1. Meningkatkan informasi pasar kerja melalui *job info*. *Job Info* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram untuk memberikan informasi pekerjaan, dan kemudahan untuk melakukan pendaftaran berbasis *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ini juga belum efektif untuk mengatasi masalah TKI, sebab dilihat dari tingkat pendidikan TKI, mayoritas berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat SD, sehingga untuk mengakses informasi pekerjaan atau untuk mendaftar menjadi TKI melalui *job info* yang dilakukan secara online sangat sulit. Hal ini didukung data BP3TKI Mataram tentang jumlah TKI yang mendaftar pada *Job Info* pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Jumlah TKI yang Mendaftar pada Job Info BP3TKI Mataram

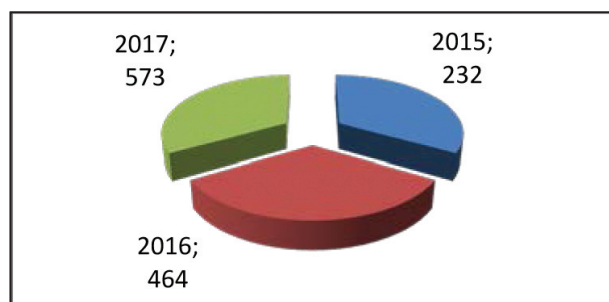
Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Potensi Calon TKI	2.833	11.295	11.881
Jumlah CTKI yang mendaftar pada <i>Job Info</i>	-	233	-

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

2. Meningkatkan jumlah pengaduan melalui pelayanan *crisis center* untuk meningkatkan jumlah penanganan masalah TKI.

Jumlah pengaduan yang diterima melalui layanan *crisis center* BP3TKI Mataram dari tahun 2015 – 2017 ditunjukkan pada Diagram 1.

Diagram 1. Jumlah Pengaduan yang Masuk pada Layanan Crisis Center BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017



Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017

Diagram 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2017, jumlah pengaduan TKI mengalami peningkatan yang menandakan permasalahan TKI juga semakin meningkat. Hasil FGD menunjukkan keadaan yang sebaliknya, dimana seluruh peserta FGD mengaku tidak pernah melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah, sebab tidak tahu prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan TKI yang rendah sehingga mereka mengalami kendala dalam melakukan pengaduan.

3. Meningkatkan Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Metode ini juga belum menunjukkan hasil yang efektif untuk mengatasi masalah TKI.

Hal ini dilihat dari rendahnya kemampuan TKI untuk melakukan pengaduan yang disebabkan oleh tidak adanya pendidikan mengenai mekanisme dalam melakukan pengaduan ketika TKI mengalami masalah. Farbembelum, Nicholson, dan Paoletti (2013) menyebutkan bahwa salah satu penyumbang tingginya masalah TKI di luar negeri adalah pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai, dimana calon TKI tidak diberikan pendidikan dan pelatihan terkait mekanisme atau cara yang harus ditempuh ketika mereka mengalami masalah.

4. Mediasi dan advokasi TKI bermasalah. Untuk melaksanakan upaya ini, BP3TKI Mataram mengalami kendala terutama dalam melakukan mediasi dan advokasi TKI non prosedural yang tidak memiliki kelengkapan data.

5. Melakukan pemberdayaan kepada TKI purna. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha dalam rangka mencegah mantan TKI untuk kembali melakukan migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ini belum berjalan optimal sebab: a) rendahnya kemampuan masyarakat yang diberikan pemberdayaan, b) rendahnya daya beli masyarakat di wilayah kantong TKI sehingga pemberdayaan yang dilakukan menjadi kurang berhasil.

Islamy (2010) menyebutkan bahwa suatu kebijakan akan efektif apabila dilaksanakan dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Disnakertrans dan BP3TKI Mataram tidak efektif, sebab masyarakat masih bertindak jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Metode pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Edward dalam Subarsono (2011) menyebutkan bahwa syarat kesuksesan pelaksanaan kebijakan adalah implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dengan demikian, implementator yang memiliki kualitas yang tinggi akan menciptakan metode yang paling efektif untuk melaksanakan kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara maksimal.

Selain sumber daya manusia yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, komunikasi antar organisasi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi efektif tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan. Sebagaimana Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, seharusnya Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dapat meningkatkan kerjasama dari berbagai instansi/organisasi yang berkaitan dengan permasalahan TKI.

Metode yang dapat dilakukan adalah meningkatkan informasi pasar kerja melalui kerjasama dengan pemerintah desa, sebab desa merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui pemerintah desa, dapat dibentuk sebuah tim yang secara khusus menangani masalah TKI. Melalui tim tersebut, informasi mengenai pekerjaan di luar negeri dapat sampai kepada masyarakat dengan cepat dan mudah.

Efisiensi. Dunn (2003) menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dan penggunaan sumberdaya. Berdasarkan hal tersebut, analisis efisiensi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan sumberdaya

anggaran yang dibutuhkan dengan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan. Berikut disajikan data alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

1. Peningkatan Informasi Pasar Kerja di Luar Negeri

Peningkatan informasi pasar kerja ke luar negeri ditunjukkan dengan membandingkan jumlah anggaran dan output yang dicapai. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Output yang dicapai dari Peningkatan Informasi Pasar Kerja di Luar Negeri.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	21.927.000	10.065.500	1000 orang	1000 orang
2016	50.000.000	31.002.750	20 Kec	20 Kec
2017	25.000.000	24.936.000	1000 orang	1000 orang

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017.

Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah sumber daya anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan capaian yang diperoleh, dimana pada tahun 2015 dan 2017 menunjukkan realisasi anggaran yang digunakan memiliki besaran yang berbeda, yaitu Rp. 10.065.500,- untuk tahun 2015 dan Rp. 24.936.000,- untuk tahun 2017. Jumlah penggunaan anggaran yang berbeda menghasilkan capaian yang sama, yaitu 1000 orang. Padahal, dengan jumlah anggaran yang lebih besar, maka capaian yang diperoleh juga seharusnya lebih besar. Dengan demikian, maka peningkatan informasi pasar kerja di Lombok Timur belum efisien untuk mengatasi masalah TKI.

2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jumlah anggaran juga dapat digunakan untuk mengetahui penyelesaian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	35.000.000	26.217.300	15	15
			Kasus	Kasus
2016	35.000.000	26.342.000	15	15
			Kasus	Kasus
2017	100.402.000	98.976.000	15	15
			Kasus	Kasus

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017.

Tabel 9 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, fasilitasi hanya dilakukan terhadap 15 kasus, padahal jika dilihat dari *input* sumber daya anggaran yang digunakan cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2017, yakni mencapai Rp. 100.402.000,- jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016 yang hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-. Meningkatnya *input* anggaran yang digunakan, nyatanya tidak ikut meningkatkan jumlah kasus atau masalah yang ditangani. Dengan demikian, maka fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan juga belum efisien untuk mengatasi masalah TKI yang ada di Lombok Timur.

Selanjutnya, alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram dalam pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	2.105.500.000	1.460.968.750	4000	28905
			orang	orang
2016	1.296.900.000	1.230.670.000	35500	22901
			orang	orang
2017	1.821.400.000	1.152.523.200	39500	20891
			orang	orang

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Tingginya *input* sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan PAP oleh BP3TKI Mataram nyatanya juga belum menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini dilihat dari anggaran yang dialokasikan memiliki tingkat penyerapan yang rendah. Rendahnya serapan anggaran tersebut kemudian berpengaruh pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2015, target pelaksanaan PAP yaitu mencapai 4000 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 28.905 orang. Begitupun pada tahun 2016, dari 35.500 orang yang telah ditargetkan, hanya tercapai 22.901 orang. Pada tahun 2017, jumlah target adalah 39.500 orang dan tercapai hanya 20.891 orang.

2. Pelayanan Mediasi dan Advokasi

Pelayanan mediasi dan advokasi diketahui melalui membandingkan jumlah anggaran dan hasil yang dicapai, dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang dicapai dari Pelayanan Mediasi dan Advokasi.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	28.600.000	20.234.000	70,75%	70,75%
2016	42.000.000	36.965.926	100%	573
				kasus
2017	39.580.000	34.589.776	100%	454
				kasus

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Berdasarkan target dan capaian yang dihasilkan dalam pelaksanaan penanganan masalah TKI melalui mediasi dan advokasi, ditunjukkan hasil bahwa belum efisiennya pelaksanaan me-

diasi dan advokasi. Hal ini dilihat dari jumlah TKI yang diadvokasi tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Jumlah TKI yang mendapat pendampingan hukum pada tahun 2016 hanya mencapai tujuh orang. Sementara, untuk tahun 2017 hanya ada dua kasus yang mendapat pendampingan hukum.

3. Pencegahan dan Penindakan TKI Ilegal.

Alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan TKI ilegal ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Pencegahan dan Penindakan TKI Ilegal.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	732.826.000	539.308.804	25	25
			orang	orang
2016	19.500.000	11.893.050	40	20
			orang	orang
2017	-	-	20	20
			orang	orang

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Tahun 2015, *input* anggaran sebesar Rp. 732.826.000,- hanya mampu mencegah 25 orang TKI ilegal. Tahun 2016 *input* anggaran menurun drastis, yaitu Rp. 19.500.000,- dengan capaian sebanyak 20 orang dari 40 target yang ditentukan. Pada tahun 2017, anggaran pencegahan dan penindakan TKI ilegal digabungkan dengan anggaran penanganan TKI bermasalah, yaitu sebesar Rp. 313.000.000,- dengan tingkat capaian yang sama, yaitu 20 orang. Tingginya *input* anggaran yang tidak sebanding dengan capaian, menyebabkan tidak efisiennya pencegahan dan penindakan TKI ilegal yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram. Sulitnya pencegahan dan penindakan TKI ilegal, disebabkan oleh banyaknya jalur yang dapat dilewati TKI untuk ke luar negeri.

4. Penanganan TKI Bermasalah.

Alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram dalam pelaksanaan penanganan TKI bermasalah ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Pelayanan Mediasi dan Advokasi.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	222.955.000	153.616.639	232	160
			kasus	kasus
2016	164.200.000	121.055.050	573	341
			kasus	kasus
2017	313.000.000	195.319.145	454	364
			kasus	kasus

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Berdasarkan tabel 13, penanganan TKI bermasalah belum efisien, dimana tahun 2015 menunjukkan dari 232 kasus yang ada, hanya 160 kasus yang dapat diselesaikan, padahal besaran anggaran untuk penanganan TKI bermasalah pada tahun tersebut mencapai Rp. 222.955.000,-, tahun 2016 penanganan yang dilakukan hanya mencapai 341 dari 573 kasus yang masuk dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.200.000,-, sedangkan untuk tahun 2017, dari 454 kasus TKI, yang berhasil ditanganani oleh BP3TKI Mataram mencapai 364 kasus/masalah dengan jumlah pagu anggaran Rp. 313.000.000.

5. Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI.

Alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram dalam pelaksanaan pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI ditunjukkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	3.199.128.000	1.600.609.700	300 orang	300 orang
2016	220.259.000	195.611.591	50 orang	50 orang
2017	940.799.000	877.834.000	1300 orang	300 orang

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Pemberdayaan terhadap TKI purna beserta keluarganya membutuhkan *input* sumber daya anggaran yang paling besar jika dibandingkan dengan penanganan masalah TKI lain. Namun, *input* sumber daya tersebut tidak dibarengi dengan hasil yang maksimal, khususnya pada tahun 2017, dimana *input* anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 940.799.000,- hanya menghasilkan output 300 orang dari 1300 target yang ditentukan.

Dunn (2003) menyebutkan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan sumberdaya yang digunakan. Dilihat dari paparan perbandingan alokasi anggaran dengan output yang dicapai menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur belum efisien, sebab tingginya anggaran yang telah dialokasikan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil (*output*), justru banyak anggaran yang tidak terserap secara maksimal.

Rendahnya serapan anggaran tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang memiliki motivasi dan kemampuan yang rendah tidak mampu menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan, sehingga mereka cenderung hanya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, rendahnya kemampuan masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada pemerintah juga turut berpengaruh pada jumlah masalah yang diselesaikan, baik oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun oleh BP3TKI Mataram. Sedikitnya pengaduan yang

masuk dan yang ditangani juga turut mempengaruhi rendahnya serapan anggaran. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan mekanisme untuk melakukan pengaduan ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama, dan pasca penempatan.

Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat menunjukkan kurangnya kerjasama antara pemerintah pelaksana kebijakan dengan instansi lain yang terkait. Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, selaku lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, kerjasama dalam meningkatkan penanganan masalah TKI juga dapat dilakukan dengan LSM yang memiliki konsen terhadap permasalahan buruh migran di Lombok Timur. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi terkait pengaduan dan pelaporan masalah TKI kepada masyarakat, sehingga jumlah pengaduan TKI meningkat, dan penanganan masalah TKI dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil merupakan evaluasi yang menilai dari sisi *output* (keluaran) kebijakan. *Output* dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan perbandingan jumlah antara individu TKI yang mengalami masalah baik sebelum, selama maupun setelah penempatan dengan jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kasus yang masuk ke Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2015-2017 mencapai 45 kasus dengan jumlah kasus untuk setiap tahunnya yakni 15 kasus. Rendahnya jumlah penanganan masalah TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram disebabkan oleh kasus yang masuk hanya terbatas pada kasus tertentu, misalnya masalah pemalsuan dokumen, sehingga untuk masalah-masalah lain, lebih banyak diadukan ke BP3TKI Mataram

(Wawancara, Lalu Taufikurrahman, tanggal 20 Maret 2018).

Jumlah kasus yang masuk di BP3TKI Mataram dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15: Jumlah Masalah Pengaduan TKI
Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
1.	2015	232	160	70
2.	2016	573	341	232
3.	2017	464	364	90

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Berdasarkan tabel 15, dilihat dari sisi *output*, hasil pelaksanaan program kebijakan untuk mengatasi masalah TKI masih belum optimal. Hal ini dilihat dari jumlah kasus TKI yang masuk ke BP3TKI masih banyak yang belum dapat diselesaikan. Rendahnya *output* yang dihasilkan oleh program kebijakan, menunjukkan bahwa *input* baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran belum berjalan secara maksimal, sehingga kurangnya *input* mempengaruhi hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tidak efektif dan efisiensinya pelaksanaan program kebijakan yang telah ditetapkan, juga menjadi faktor pendorong minimnya hasil yang dicapai oleh pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi Dampak

Dye dalam Winarno (2012) menyebutkan bahwa untuk melihat dampak dari sebuah kebijakan, maka dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: 1) dampak kebijakan pada masalah-masalah publik atau orang-orang yang terlibat, 2) dampak kebijakan pada kelompok-kelompok di luar sasaran, 3) dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengevaluasi dampak kebijakan dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, maka akan dilihat melalui beberapa aspek berikut:

Pertama, dampak kebijakan pada masalah publik. Evaluasi dampak kebijakan pada masalah TKI perlu dilihat sejauhmana manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan baik oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun oleh BP3TKI Mataram.

1. Dampak Peningkatan Informasi Pasar Kerja di Luar Negeri

Pengumpulan data TKI yang dilakukan oleh Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur di lima desa, yaitu Desa Suradadi Kecamatan Terara, Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak, Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela, dan Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba menunjukkan bahwa peningkatan informasi pasar kerja baik yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram belum memberikan dampak yang maksimal.

Tabel 16. Akses Informasi Pasar Kerja oleh TKI dan CTKI Lima Kecamatan Di Kabupaten Lombok Timur.

Desa	Menerima Informasi melalui						Jumlah
	Calo/ Tekong	Teman	Keluarga	Agen PPTKIS	Pemerintah	Lain-lain	
Desa Suradadi Kecamatan Terara	318	28	35	10	-	4	395
Desa Anjani Kecamatan Suralaga	302	2	3	17	1	2	326
Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	487	30	11	85	3	11	627
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	189	14	2	94	-	28	327
Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	330	-	1	6	2	2	341
Total	1626	74	52	212	6	47	2016

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

Tabel 16 menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui peningkatan informasi pasar kerja belum menghasilkan dampak maksimal untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur. Data menunjukkan bahwa informasi pekerjaan di luar negeri lebih banyak diperoleh dari calo/tekong yang datang ke rumah masing-masing TKI/CTKI, sementara masyarakat yang memperoleh informasi dari pemerintah hanya beberapa orang.

2. Dampak pelaksanaan kebijakan melalui kemudahan pengurusan paspor di ULP Lombok Timur.

Adanya ULP Lombok Timur ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal oleh individu TKI dan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan hasil FGD yang menunjukkan dalam pengurusan dokumen pemberangkatan TKI lebih banyak dilakukan oleh calo/tekong yang merekrut mereka untuk bekerja di luar negeri.

Tabel 17. Pihak yang Mengurus Dokumen Pemberangkatan TKI

Desa	Pihak yang Mengurus				Jumlah
	Calo/ Tekong	Pihak PPTKIS	Mengurus Sendiri	Lain-lain	
Desa Suradadi Kecamatan Terara	296	34	57	8	395
Desa Anjani Kecamatan Suralaga	287	18	16	5	326
Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	460	102	52	13	627
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	176	108	21	22	327
Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	245	33	61	2	341
Total	1464	295	207	50	2016

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

Laster dan Stewart menyebutkan bahwa dampak kebijakan dapat dilihat dari kemampuan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada. Dilihat dari tabel 17, banyak TKI ataupun Calon TKI yang masih mempercayakan pengurusan dokumen pemberangkatan kepada calo/tekong. Dengan demikian, manfaat pelaksanaan kebijakan ini lebih banyak dirasakan oleh kelompok di luar sasaran, yakni calo/tekong. Hal ini kemudian dapat menimbulkan masalah baru,

dimana kemudahan dalam mengurus dokumen TKI oleh calo/tekong dapat menimbulkan tingginya jumlah TKI ilegal di Lombok Timur.

3. Dampak Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
Dampak peningkatan kualitas PAP ditunjukkan dalam jumlah TKI yang memperoleh pendidikan dan pelatihan ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah TKI yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan di Lombok Timur

Desa	Jumlah TKI		Total
	Memperoleh Pelatihan	Tidak Memperoleh Pelatihan	
Desa Suradadi Kecamatan Terara	267	128	395
Desa Anjani Kecamatan Suralaga	277	49	326
Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	132	495	627
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	226	101	327
Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	331	10	341
Total	1233	783	2016

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

PAP yang telah diberikan ternyata tidak berdampak maksimal pada penyelesaian masalah TKI. Hal ini dibuktikan dari tingginya jumlah TKI yang belum memperoleh pendidikan dan pelatihan. Selain itu, TKI yang sudah memperoleh pelatihan juga memiliki tingkat pemahaman yang bervariasi, sehingga materi yang diberikan tidak sampai secara maksimal kepada masyarakat, dan untuk pengaplikasiannya pada saat di negara tujuan juga akan sangat rendah. Hasil FGD menunjukkan, bahwa sebagian besar TKI saat mengikuti PAP hanya cenderung sebagai formalitas.

Selain itu, tidak memadainya materi yang diberikan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya dampak dari pelaksanaan PAP, dimana yang diberikan hanya sebatas pada pelatihan kompetensi dan pendidikan mengenai budaya dan bahasa di negara penempatan.

4. Dampak Perlindungan TKI melalui Prosedur

Hasil FGD menunjukkan bahwa meskipun ada kontrak kerja dan perjanjian penempatan, namun sebagian besar TKI yang mengalami masalah tidak melapor kepada pemerintah maupun kepada PPTKIS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya hak mereka ketika perjanjian kontrak kerja dan perjanjian penempatan ditandatangani.

Pendataan yang telah dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur terhadap lima desa dan kecamatan juga menunjukkan bahwa dari 202 orang yang mengalami masalah terkait gaji maupun penempatan, seluruh dari mereka tidak pernah meminta tanggungjawab dari PPTKIS maupun melakukan pelaporan kepada pemerintah, mereka hanya mengeluhkan permasalahan tersebut kepada keluarga masing-masing.

5. Manfaat perlindungan TKI melalui Asuransi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar TKI yang berkerja di luar negeri tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak menerima asuransi atau jaminan ketika mengalami masalah. Data ADBMI Lombok Timur menunjukkan bahwa dari 2016 jumlah TKI, hanya 160 atau delapan persen yang terdaftar sebagai peserta asuransi dari lima desa dan kecamatan yang ada di Lombok Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dengan memberikan perlindungan asuransi kepada para TKI belum memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan masalah TKI.

6. Manfaat Perlindungan melalui Penyelesaian Masalah TKI.

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pengaduan ketika mengalami masalah menyebabkan tidak maksimalnya penanganan masalah yang diberikan oleh Disnakertrans dan BP3TKI Mataram.

Tabel 19. Jumlah TKI yang Mengalami Masalah dan Pernah Melapor

Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Mengalami Masalah	Jumlah TKI yang Melaporkan Masalah
Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	28	1
Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	61	-
Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	56	1
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	17	-
Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	40	6
Jumlah	2016	202	8

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

Tabel 19 menunjukkan jumlah TKI yang pernah melaporkan masalahnya kepada pemerintah ada delapan orang dari 202 orang yang pernah mengalami masalah. Sedikitnya jumlah masyarakat yang melapor menyebabkan rendahnya tingkat penyelesaian masalah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan masalah TKI oleh pemerintah belum begitu berdampak optimal pada masyarakat.

Kedua, dampak kebijakan pada kelompok di luar sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pemerintah daerah telah memiliki program kebijakan untuk mengatasi masalah TKI, pihak LSM nyatanya masih memiliki kendala dalam hal mendampingi para TKI untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Pihak LSM menyebutkan bahwa kendala tersebut terkait dengan tidak adanya lembaga khusus yang menangani masalah TKI di Lombok Timur, sehingga ketika ada masalah pihak LSM melapor kepada BP3TKI yang ada di Mataram yang jaraknya cukup jauh dari Kabupaten Lombok Timur.

Ketiga, dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dampak kebijakan pada keadaan sekarang masih belum maksimal. Hal ini dilihat berdasarkan kurangnya peran pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk program kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada TKI. Akan tetapi, jika pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang ada saat ini, dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, maupun pengawasan terhadap alokasi anggaran, kebijakan pada masa yang akan datang dapat memberikan dampak yang lebih maksimal bagi penanganan masalah TKI di Lombok Timur.

D. Penutup

Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Evaluasi usaha yang menilai *input* kebijakan ditentukan melalui pertama *Input* SDM, ditemukan bahwa secara kuantitas dan kualitas masih sangat kurang. Secara kuantitas, jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang ada. Secara kualitas, tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM masih kurang, baik pengetahuan mengenai kondisi di negara penempatan, maupun pengetahuan atau kemampuan untuk menciptakan inovasi dalam penanganan masalah TKI. Kedua *Input* waktu, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah TKI membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh; 1) rendahnya *input* sumber daya manusia yang digunakan, 2) laporan dan pengaduan yang diajukan tidak didukung dengan data yang memadai, khususnya untuk TKI non prosedural, dan 3) tidak adanya perpanjangan tangan dari BP3TKI Mataram yang ada di Lombok Timur juga menjadi faktor yang memperlambat proses penyelesaian masalah TKI. Ketiga *Input* biaya menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi masalah TKI sudah cukup besar, namun kemampuan pelaksana kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran masih sangat rendah.

Evaluasi proses yang menilai efektifitas dan efisiensi menunjukkan bahwa pada nilai efektifitas, metode pelaksanaan kebijakan belum menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: rendahnya kualitas sumber daya pelaksana kebijakan, dan rendahnya kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait. Nilai efisiensi menunjukkan bahwa metode pelaksanaan kebijakan juga belum efisien, sebab tingginya input sumber daya anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan *output* yang dihasilkan.

Evaluasi hasil yang menilai *output* kebijakan menunjukkan hasil yang belum optimal, sebab banyak masalah atau kasus TKI yang belum berhasil diselesaikan.

Evaluasi dampak ditunjukkan melalui Dampak pada kelompok sasaran menunjukkan

bahwa pelaksanaan kebijakan belum memberikan dampak yang maksimal bagi penyelesaian masalah TKI dan dampak pada kelompok di luar sasaran juga belum maksimal, sebab adanya kebijakan tidak memberikan kemudahan akses pada kelompok di luar sasaran dalam melakukan pendampingan penanganan masalah TKI.

Saran: berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu: 1) mengingat tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calo/tekong dalam melakukan penempatan TKI, perlu ditambah regulasi mengenai calo/tekong yang digabungkan dalam aturan PPTKIS ataupun diatur secara terpisah; 2) menambah regulasi mengenai prosedur bagi TKI maupun masyarakat sipil untuk melakukan pengaduan yang dapat mendorong investigasi dan pemberian sanksi; 3) perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya kompetensi untuk melakukan pendampingan dan penanganan masalah TKI; 4) pada pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), perlu ditambah materi mengenai mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh TKI ketika mengalami masalah pada saat pra, selama, dan setelah penempatan; 5) meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien; 6) pemerintah daerah dapat membentuk posko pengaduan bekerjasama dengan pemerintah desa selaku instansi paling dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pembentukan posko tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengakomodir masalah TKI di tingkat desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan informasi mengenai lapangan pekerjaan di luar negeri, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara dan keuntungan menjadi TKI prosedural.

Ucapan Terimakasih

Disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang

telah menyediakan waktu untuk memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Pustaka Acuan

- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. (2003). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Lombok Timur dalam Angka Tahun 2017*. Lombok Timur: BPS
- BP3TKI. (2016). *Laporan Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*. Mataram: BP3TKI.
- . (2015). *Laporan Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015*. Mataram: BP3TKI.
- . (2017). *Laporan Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2017*. Mataram: BP3TKI.
- BNP2TKI. (2016). *Laporan Kinerja Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: BNP2TKI.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta Review.
- Suara NTB. (Mei 2017). Hingga Maret Remitansi TKI NTB Capai Rp 347,9 Miliar. Diakses tanggal 16 Oktober 2017 melalui <http://www.suarantb.com/news/2017/05/02/237572/> Hingga Maret, Remitansi TKI NTB Capai Rp. 347,9 Miliar.
- Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. (2017). *Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017*. Lombok Timur: Disnakertrans.
- Dunn, William N., (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farbembelum, B., Taylor-nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Migrant workers' access*

- to justice at home: Indonesia*. New York: Open Society Foundation.
- Islamy, Irfan. (2010). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuswoyo. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja diakhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayan KPPN Kediri). *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Novianti, K. (2016). Analisis trend dan dampak pengiriman TKI: kasus dua desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5(1), 15–39.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy (IV)*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Suara NTB. (Juni 2017). Lagi Jenazah TKI Asal Lotim Dipulangkan. Diakses tanggal 6 Maret 2017 melalui <http://www.suarantb.com/news/2017/06/02/239558/Lagi,Jenazah.TKI.Asal.Lotim.Dipulangkan>.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publisihing Service.

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 17 Nomor 3 September 2018, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM (Manajemen Pemerintahan dan Reformasi Administrasi Publik, UMM)
3. Drs. Latiful Khuluq, M.A, B.Sw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, USU)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS